



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
GERAKAN PEMUDA ANSOR DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN  
NILAI-NILAI BELA NEGARA GUNA Mendukung  
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA**

**AFRIZAL ZURMAN  
NIM 120190101001**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

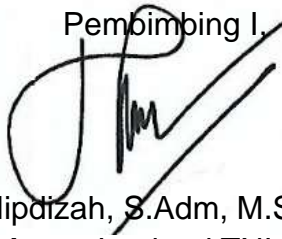
**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Afrizal Zurman  
NIM : 120190101001  
Program Studi : Strategi Perang Semesta  
Fakultas : Strategi Pertahanan  
Judul Tesis : Strategi Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda  
Ansor Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela  
Negara Guna Mendukung Sistem Pertahanan dan  
Keamanan Rakyat Semesta

Pembimbing I,



Dr. Hipdizah, S.Adm, M.Si, CIQnR  
Mayor Jenderal TNI (Purn)

Tanggal: Oktober 2020


Pembimbing II,



Dr. Surryanto D.W, M.H., M.M,CiQaR  
Kolonel Ca/ 32874

Tanggal: Oktober 2020






Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Strategi Pertahanan



Dr. Deni Dadang AR., S.Sos., M.Si. (Han)  
Mayor Jenderal TNI

Tanggal: Oktober 2020

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Afrizal Zurman NIM : 120190101001 Program Studi : Strategi Perang Semesta Fakultas : Strategi Pertahanan Judul Tesis : Strategi Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela Negara Guna Mendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta			
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I:  Dr. Hipdizah, S.Adm, M.Si, CIQnR Mayor Jenderal TNI (Purn)		17/10/20
2.	Pembimbing II:  Dr. Surryanto D.W, M.H., M.M,CiQaR Kolonel Caj 32874		16/10/20
3.	Reviewer I:  Dr. Rizerius Eko H, S.E, S.AP, M.Si Mayor Jenderal TNI		15/10/20
4.	Reviewer II:  Dr. Joni Widjayanto, S.Sos, M.M, CIQaR, CIQnR Brigadir Jenderal TNI		15/10/20
5.	Reviewer III:  Dr. Lukman Yudho P, S.IP, M.AP Kolonel Laut (E) TNI		15/10/20

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia manerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia Nya penulisan tesis yang berjudul “Strategi Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela Negara Guna Mendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini peneliti menghaturkan terima kasih, penghargaan dan rasa hormat kepada:

1. Laksdya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., selaku Rektor Universitas Pertahanan yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan, serta memberikan arahan, bimbingan dan fasilitas dalam penyusunan tesis.
2. Mayjen TNI Dr. Deni Dadang AR, S.Sos., M.Si.(Han), selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta dukungan dalam penyusunan tesis ini.
3. Mayjen TNI (Purn) Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Kolonel Caj. Dr. Surryanto D.Waluyo, M.H., M.M., CIQaR., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
5. Mayjen TNI Dr. Rizerius Eko H, S.E, S.AP, M.Si; Brigjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos, M.M, CIQaR, CIQnR; dan Kolonel Laut (E) TNI Dr. Lukman Yudho P, S.IP, M.AP selaku Dosen Penguji I, II, dan III yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan juga koreksi dalam proses sidang Tesis.
6. Kolonel Czi Helda Risman, M.Si. (Han)., CIQaR., selaku Sesprodi Program Studi Strategi Perang Semesta yang telah banyak memberikan nasihat, semangat, serta dukungan moril dan materiil dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Ibu Suri Lesmanawati, M.Si.(Han)., dan Mas Cut Akhmad Moeda Defriandi, M.Han., selaku Staf Prodi SPS yang senantiasa membantu peneliti dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan dan penyusunan tugas akhir.
8. Para narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai, dari GP Ansor (Bpk. Abdul Rachman; Bpk. Hasan Basri S, M.Si; dan Bpk. Ruchman Basori, S.Ag, M.Ag), Bpk. Dr. Sutrimo S, M.Si, M.M, serta Bpk. Kol. Arh. Luhkito, S.T, M.Si (Han) (Kemhan RI), sehingga dapat membantu peneliti untuk menulis tesis ini.
9. Para mentor dan rekan-rekan Prodi SPS Co-11 yang telah banyak memberikan masukan, nasehat dan juga *sharing* ilmu kepada peneliti selama perkuliahan.
10. Istri dan anak-anakku tercinta, Zhafa dan Qina yang selalu memberikan dukungan kasih sayang dan perhatiannya untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, namun kontribusi dan dukungannya telah banyak membantu peneliti untuk menyelesaikan studi.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam upaya pembinaan kesadaran bela negara dan strategi dalam implementasi nilai-nilai bela negara, khususnya di lingkungan Ormas.

Bogor, Oktober 2020

Afrizal Zurman

## ABSTRAK

### STRATEGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN GERAKAN PEMUDA ANSOR DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI BELA NEGARA GUNA Mendukung SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA

AFRIZAL ZURMAN

Perjuangan merebut kemerdekaan salah satunya ditentukan oleh adanya pergerakan kaum muda yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan (Ormas). Kohesifitas antar Ormas yang terbangun saat itu, mampu menjadi kekuatan nyata menghadapi musuh. Namun, semangat bela negara yang menguat saat itu semakin jarang ditemukan pada beberapa Ormas di masa kini. Fenomena aksi premanisme, kriminalitas, hingga anti terhadap ideologi Pancasila muncul di beberapa Ormas akibat kurangnya kesadaran bela negara. Sebagai salah satu Ormas yang berkomitmen dengan bela negara, banyak aktivitas GP Anzor yang mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat, namun ada juga sedikit kalangan yang berpandangan negatif terutama dalam menghadapi kelompok yang dianggap radikal. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis bagaimana pembinaan kesadaran bela negara dan strategi dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di lingkungan Ormas GP Anzor, yang secara tidak langsung akan berdampak pula pada optimalnya GP Anzor sebagai komponen pendukung pertahanan negara untuk memperkuat Sishankamrata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan GP Anzor sudah terlaksana secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Selain itu, strategi Ormas GP Anzor dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara antara lain diwujudkan dalam bentuk menjaga tegaknya ajaran agama serta tetap mempertahankan eksistensi NKRI (*ends*), dengan sumber daya (*means*) berupa militansi kader, adanya kader-kader yang menempati posisi strategis di birokrasi, serta kekuatan struktur organisasi. Sedangkan metode (*ways*) yang digunakan adalah penguatan sistem kaderisasi, pemberdayaan satuan tugas Banser, sinergi dengan pemerintah dan TNI/Polri, mekanisme kontrol terhadap kinerja organisasi, serta responsif dan solutif terhadap isu permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.

Kata kunci: strategi, implementasi, nilai bela negara, sishankamrata, GP Anzor

## **ABSTRACT**

### **STRATEGY OF COMMUNITY ORGANIZATION GERAKAN PEMUDA ANSOR IN IMPLEMENTING STATE DEFENSE VALUES TO SUPPORT TOTAL PEOPLE DEFENSE SYSTEM**

**AFRIZAL ZURMAN**

*The struggle for independence was partly determined by the movement of young people who were members of mass organizations (Ormas). The cohesiveness between the mass organizations that were built at that time was able to become a real force in facing the enemy. The phenomena of thuggery, crime, and anti-Pancasila ideology emerged in several mass organizations due to a lack of state defend awareness. As one of the organizations committed to defending the country, GP Anzor is also inseparable from the pros and cons. Some of the work actions of GP Anzor have received a lot of positive appreciation from the community, but some parties also have negative views, especially in dealing with groups that are considered radical. This research tries to analyze how the development of state defense awareness and strategy in implementing the values of state defense in the GP Anzor environment, which indirectly will also have an impact on the optimal of the GP Anzor as a supporting component of national defense to support Sishankamrata. This study uses a qualitative method with a phenomenological design. The results showed that the development of awareness of state defense in the GP Anzor environment had been carried out in a planned, directed and sustainable manner, through formal and nonformal methods although there are still shortcomings. In addition, GP Anzor's strategy in implementing the values of state defense includes maintaining the upholding of religious teachings and maintaining the existence of the Republic of Indonesia (ends), with resources (means) in the form of cadre militancy, the existence of cadres who occupy strategic positions in the bureaucracy, governance, and the strength of the organizational structure. While the methods used are strengthening the regeneration system, empowerment of the task force, synergies with the government and TNI/Polri, control mechanisms on organizational performance, and responsiveness and solutions to issues that arise in society.*

*Keywords : strategy, implementation, state defense value, sishankamrata, GP Anzor*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	12
1.4.2 Manfaat Praktis .....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Teori Strategi .....	13
2.1.2 Teori Implementasi .....	15
2.1.3 Teori Pembinaan.....	17
2.1.4 Konsep Pertahanan Negara .....	19
2.1.5 Konsep Bela Negara.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	25
2.3 Kerangka Berpikir.....	31
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....	34
3.1 Metode dan Desain Penelitian .....	34
3.1.1 Metode Penelitian .....	34
3.1.2 Desain Penelitian.....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
3.2.1 Tempat Penelitian.....	37

3.2.2 Waktu Penelitian .....	37
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian .....	38
3.3.1 Subyek Penelitian .....	38
3.3.2 Obyek Penelitian.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4.1 Wawancara mendalam ( <i>in depth interview</i> ) .....	41
3.4.2 Dokumentasi.....	42
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	48
4.1.1 Profil Gerakan Pemuda Ansor .....	48
4.1.2 Profil Kementerian Pertahanan.....	52
4.1.3 Pembinaan Kesadaran Bela Negara.....	54
4.1.4 Strategi dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela Negara .....	55
4.2 Hasil Penelitian .....	55
4.2.1 Pembinaan Kesadaran Bela Negara di lingkungan GP Ansor .....	55
4.2.2 Strategi Ormas GP Ansor dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela Negara .....	64
4.3 Pembahasan .....	77
4.3.1 Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkungan GP Ansor .....	77
4.3.2 Strategi Ormas GP Ansor dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela Negara .....	87
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	105
5.1 Kesimpulan .....	105
5.2 Rekomendasi .....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112
RIWAYAT HIDUP PENELITI .....	123

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Strategi Art. Lykke.....	15
Gambar 2.2 Komponen Pertahanan Militer .....	21
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir .....	33
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber.....	44
Gambar 3.2 Komponen Analisis Data: Model Interaktif .....	47
Gambar 4.1 Struktur Hirarki Kebijakan Bela Negara di lingkungan Ormas.....	53

## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Indikator Nilai Bela Negara .....	24
Table 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	28
Table 3.1 Jadwal Penelitian.....	37
Table 3.2 Data Narasumber .....	40

## DAFTAR SINGKATAN

Aswaja	: Ahlusunnah wal jama'ah
Banser	: Barisan Ansor Serbaguna
Diklatsar	: Pendidikan dan Latihan Dasar
Kemhan	: Kementerian Pertahanan
NU	: Nahdlatul Ulama
PKBN	: Pembinaan Kesadaran Bela Negara
PKD	: Pelatihan Kader Dasar
PKL	: Pelatihan Kader Lanjutan
PKN	: Pelatihan Kader Nasional
PSDN	: Pengelolaan Sumber Daya Nasional
Sako	: Satuan Komando
Satkornas	: Satuan Koordinasi Nasional
Sishankamrata	: Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
Susbalan	: Kursus Banser Lanjutan
Susbanpim	: Kursus Banser Pimpinan

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan sebuah hasil akumulasi perjuangan dari banyak unsur komponen bangsa. Sejarah mencatat, bahwa kesamaan cita-cita untuk meraih kemerdekaan di tengah masyarakat menjadi energi yang besar untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Keterlibatan rakyat dalam pergerakan perjuangan menuju kemerdekaan ditandai dengan semakin kuatnya kohesifitas sosial yang terbangun pada saat itu, yang termanifestasikan dalam bentuk pergerakan organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang mulai menggeliat di awal abad ke-XX, termasuk di dalamnya ormas-ormas keagamaan Islam.

Diawali dengan pembentukan organisasi Budi Utomo, yang didirikan pada 1908 oleh sekelompok mahasiswa sekolah kedokteran untuk kaum pribumi, STOVIA, pimpinan Dr. Soetomo yang kemudian seolah bergema terhadap pendirian organisasi pergerakan lainnya seperti Sarikat Dagang Islam (SDI) oleh H. Samanhudi pada 1911, *Indische Partij* pada tahun 1913, serta dua Ormas Islam yang terbesar sekarang ini, yaitu Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama yang lahir pada tahun 1926. Hingga pada akhirnya, kemunculan Ormas-ormas lain pun semakin menggeliat menjelang kemerdekaan seperti misalnya Persatuan Islam atau Persis (1923), Al Jami'atul Washliyah (1930), serta Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi (1943). Berdirinya berbagai organisasi tersebut menandai terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam mengusir kolonialisme, perjuangan yang selama ini didominasi oleh perjuangan fisik dan cenderung bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi bentuk perjuangan yang bersifat pergerakan nasional untuk mencapai Indonesia merdeka. Hal ini karena telah munculnya kesadaran akan pentingnya organisasi sebagai instrumen strategis dalam sebuah perjuangan menentang kolonialisme. Gambaran tersebut di atas memunculkan

argumentasi bahwa eksistensi dan peran Ormas pada masa kolonial tidak bisa dilepaskan begitu saja dari momentum kemerdekaan. Kehadiran Ormas, dengan segala kekurangannya pada saat itu, mampu mentransformasikan spirit yang muncul di masyarakat menjadi sebuah kekuatan ideologi perlawanan terhadap kolonialisasi untuk mewujudkan bangsa yang merdeka. Rakyat beserta Ormas yang bergerak dalam berbagai bidang, mampu bersenyawa dalam suatu semangat bela negara dalam rangka mengusir penjajah. Selain itu pula, kohesifitas antar Ormas yang terbangun saat itu, mampu menjadi kekuatan ampuh dalam menghadapi musuh. Adanya kesamaan cita-cita perjuangan telah menjadi daya rekat yang kuat antar Ormas serta memberikan inspirasi dan semangat yang berkesinambungan bagi para pelaku pergerakan untuk melepaskan belenggu penjajahan.

Akan tetapi, potret yang cukup berbeda ditemukan pada kondisi beberapa Ormas yang ada pada masa sekarang ini. Nilai-nilai perjuangan yang dahulu menjadi *basic value* (nilai dasar) dari sebuah Ormas pada masa perlawanan terhadap kolonial, kini seakan menghilang dan berganti dengan munculnya gejala lain seperti aksi premanisme, kriminalitas, hingga terdapat pula perlawanan terhadap ideologi negara Pancasila. Beberapa stigma negatif pun dilekatkan kepada beberapa Ormas akibat kiprah yang dihadirkan Ormas tersebut jauh dari idealita yang diharapkan.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan Ormas yang didirikan oleh K.H Hasyim Asy'ari sejak era kolonial. Keterlibatan NU dalam narasi besar sejarah perjuangan Indonesia memberikan sumbangsih besar terhadap kemerdekaan yang telah diraih. Sejak kelahirannya, NU telah menjadi wadah perjuangan dalam melawan setiap bentuk kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan RI dari kolonial Belanda dan Jepang, serta turut aktif dalam melakukan aktivitas dakwah dalam menjaga keutuhan NKRI. Menurut Anam (1998), keterlibatan perjuangan NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setidaknya dilatarbelakangi oleh tiga hal, yakni, pertama ialah motif spiritual (agama), kedua adalah alasan

untuk melestarikan paham *Aswaja*, dan ketiga adalah adanya motif nasionalisme yang mendasari (Farih, 2016, p. 252).

Motif nasionalisme yang menjadi salah satu dasar perjuangan di NU, muncul karena NU lahir dengan niat untuk mempersatukan ulama serta tokoh agama dalam melawan kolonialisme. Semangat nasionalisme juga terlihat dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni yang bermakna “Kebangkitan Para Ulama” (Sitompul, 2010, p. 50). Nasionalisme NU ini pun juga ditunjukkan dengan membentuk sebuah gerakan organisasi pemuda berbasis keagamaan, kerakyatan dan juga kebangsaan yakni organisasi Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), yang menjadi pelengkap kesatuan berbagai organisasi kepemudaan yang bersifat nasionalis pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 yang mempertemukan berbagai organisasi pemuda kedaerahan se-nusantara.

Dalam kongresnya yang ke-9 pada 21-26 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur, NU mendeklarasikan berdirinya Ansor Nahdlatul Ulama (ANO) yang kelak menjadi embrio organisasi kepemudaan GP Ansor saat ini. Organisasi ini pada awalnya merupakan hasil peleburan dari dua organisasi pemuda yang berkembang dan sudah ada sebelumnya di wilayah Surabaya, Jawa Timur, yakni *Syubhunal Wathan* (Pemuda Tanah Air) dan *Da'watus Syubban* (Panggilan Pemuda) yang melebur menjadi *Nadhatus Syubban* (Kebangkitan Pemuda). Kelompok *Nadhatus Syubban* inilah yang kemudian bermetamorfosis menjadi Ansor Nahdlatul Ulama dan seiring perjalanan waktu kemudian berubah menjadi Gerakan Pemuda Ansor (Triyanto & Bawono, 2018, p. 15). Selain GP Ansor, beberapa organisasi lainnya juga lahir dari rahim NU berupa laskar-laskar perjuangan fisik, seperti laskar *Ḥizbullāh* yang dipimpin KH. Zainul Arifin serta laskar *Sabillillāh* yang dipimpin KH. Masykur (Farih, 2016, p. 253). Laskar-laskar tersebut berjuang dan berjihad menegakkan agama dan membela bangsa, untuk mengusir kolonialisme dari tanah air.

Sebagai salah satu organisasi banom yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan representasi dari kaum muda NU,

GP Ansor berperan strategis dan signifikan dalam perkembangan perjalanan masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu organisasi kepemudaan, kebangsaan, dan keagamaan yang juga berwatak kerakyatan, GP Ansor telah mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Selama 86 tahun eksis dalam gerakan kepemudaan dan sosial-kemasyarakatan, Ormas GP Ansor telah tumbuh berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda yang cukup besar saat ini. Dengan jumlah anggota yang hampir mencapai lebih dari 7 juta anggota, 34 Pengurus Wilayah (tingkat Provinsi), serta 498 Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) hingga ke tingkat desa di seluruh Indonesia, menjadikan GP Ansor saat ini sebagai organisasi pemuda yang patut diperhitungkan. Selain itu, GP Ansor juga memiliki organisasi para-militer tersendiri yang dibekali dengan kemampuan fisik khusus yang dikenal dengan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) yang telah banyak berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berkontribusi dalam menjaga keharmonian dan hubungan sosial antar agama.

GP Ansor memiliki visi antara lain melakukan revitalisasi nilai dan tradisi, penguatan sistem kaderisasi, pemberdayaan potensi kader, dan juga kemandirian organisasi. Adapun tujuan didirikannya GP Ansor adalah untuk 1) membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih, 2) menegakan ajaran Islam Aswaja dengan menempuh *manhaj* salah satu madzhab empat di dalam wadah NKRI, 3) Berperan aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi Allah SWT (Ansor, n.d.).

Sebagai organisasi kepemudaan yang lahir dari rahim NU, GP Ansor konsisten mencetak kader yang profesional. Banyak kader GP Ansor yang

menjadi birokrat, pengusaha, dosen, hingga politisi, serta tokoh sentral pemuda di beberapa daerah. Ide dasar pendirian untuk menjaga NU dan NKRI telah menjadi modal semangat kader GP Ansor dalam berkiprah. Selain itu, organ paramiliter GP Ansor, yakni Banser telah menjadi andalan dalam skema paramiliter dalam konteks menjaga perdamaian, harmoni dan hubungan antar agama. Hal ini dibuktikan oleh anggota Banser yang acapkali menjamin keamanan dan kenyamanan warga agama lain, seperti pengamanan perayaan keagamaan di Gereja, Vihara dan tempat ibadah lainnya. Fenomena tersebut, menjadikan Banser bertindak sebagai penjaga keseimbangan demokrasi dari maraknya ancaman beberapa tokoh ataupun kelompok radikal yang mengatasnamakan agama (Aziz, 2015).

Sebagai bagian dari Ormas di Indonesia, keberadaan GP Ansor sebagai Ormas secara legal-formal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Ormas). Pada Pasal 1 angka (1) UU tersebut, mendefinisikan Ormas sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat karena adanya aspirasi, kehendak, dan kepentingan yang sama dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk kepentingan tercapainya tujuan NKRI. Pembentukan Ormas merupakan manifestasi dari adanya partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada kemandirian pengabdian. Munculnya Ormas terkait pula dengan adanya kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan serta melakukan perubahan sosial bagi masyarakat itu sendiri, di mana adanya keterbatasan dalam pemenuhan aspek kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berasal dari pemerintah saja (Herdiansah, 2016).

Adapun tujuan didirikannya Ormas menurut UU Ormas Pasal 5 antara lain dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; memelihara nilai agama moral dan juga etika; menjaga

lingkungan hidup dan sumber daya alam; menghidupkan sikap toleransi antar sesama serta budaya gotong royong; serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai tujuan negara. Lebih lanjut, pasal 21 UU tersebut, disebutkan pula bahwa Ormas memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Fenomena yang berkembang dewasa ini menunjukkan adanya penurunan wawasan kebangsaan serta bela negara di kalangan masyarakat khususnya para pemuda. Degradasi moral kaum muda seperti maraknya peredaran narkoba, tawuran, radikalisme, pornografi, melemahnya identitas budaya nasional akibat menguatnya infiltrasi budaya asing, dsb, menjadi sebuah *early warning* terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif pertahanan negara, fenomena tersebut dapat menjadi ancaman tersendiri. Menurut Hartono (2020, p. 17), hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran bela negara, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara dan belum sinergisnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Oleh karena itu, perlunya upaya masif untuk membangun kesadaran bela negara di tengah masyarakat yang dapat dilakukan oleh segenap komponen bangsa.

Sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia, Ormas juga memiliki peran dalam melakukan upaya bela negara. Dalam UUD 1945, pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tiap warganegara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan pertahanan-keamanan negara, menjadi pegangan bahwa keterlibatan Ormas dalam usaha bela negara menjadi sesuatu kebutuhan yang tak terhindarkan. Peran Ormas sangat strategis, selain sebagai instrumen penting dalam membangun kelancaran proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga dalam membangun sistem pertahanan negara yang kuat. Hal ini sejalan dengan

konsepsi Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut UU Hanneg) pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa sistem pertahanan yang bersifat semesta bercirikan adanya keterlibatan segenap warga negara, teritorial, dan juga ketersediaan sumber daya nasional lainnya. Dalam konteks ini, posisi organisasi masyarakat (Ormas) merupakan salah satu bentuk pelibatan warganegara dalam sistem pertahanan rakyat semesta yakni sebagai komponen pendukung yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman. Selain itu, keterlibatan Ormas dalam melakukan bela negara sebagai komduk pertahanan negara dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk implementasi Sishankamrata. Oleh karena itu, pemahaman Ormas terhadap nilai-nilai bela negara menjadi sesuatu keharusan dalam mendukung terciptanya pertahanan negara yang kuat.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (selanjutnya disebut UU PSDN) bahwa penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) merupakan salah satu bentuk keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara. PKBN dilaksanakan dalam lingkup pendidikan, kemasyarakatan dan juga pekerjaan. Pasal 9 UU PSDN menyebutkan bahwa PKBN di lingkup masyarakat salah satunya ialah ditujukan pada kader Ormas. Hal ini berarti kesempatan dan peran serta setiap warga negara dalam melakukan upaya pembelaan negara sesuai profesi dan kemampuannya adalah sama, baik sebagai individu maupun secara kelompok.

Dalam perspektif pertahanan negara, Ormas dapat ditempatkan sebagai bagian komponen pertahanan negara yakni komponen pendukung. Keberadaan Ormas sebagai komponen pendukung pertahanan negara telah mendapatkan legitimasi formal dalam UU PSDN. Pada Pasal 20 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa komponen pendukung pertahanan

negara terdiri atas anggota Polri, warga negara yang terlatih, tenaga ahli serta warga lain yang merupakan bagian dari unsur warga negara. Dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan warga terlatih ialah warga negara yang terlatih dan terorganisir dalam lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap didayagunakan menjadi komponen pertahanan negara. Adapun, salah satu unsur yang termasuk ke dalam kelompok warga terlatih ialah Ormas. Hal ini karena pada dasarnya Ormas merupakan kumpulan warga negara yang memiliki kesamaan tujuan, aspirasi, kehendak, dsb, dalam suatu bidang tertentu.

GP Ansor merupakan Ormas kepemudaan yang telah memiliki komitmen dalam melakukan bela negara. Hal ini salah satunya ditandai dengan dilakukannya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau kesepakatan bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dengan beberapa Ormas termasuk GP Ansor tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Plt. Dirjen Pothan Kemhan RI, Timbul Siahaan dengan Nusron Wahid, selaku Ketum GP Ansor (2011-2015), pada 4 Januari 2014 (Sukoyo, 2014). Penandatanganan kesepakatan bersama ini ditujukan untuk menyamakan persepsi/pandangan tentang usaha bela negara, khususnya bela negara di lingkungan Ormas yang juga menjadi hak dan kewajiban komponen bangsa. Namun, sepertinya, tindak lanjut dari perjanjian kerjasama ini belum berjalan secara efektif dan optimal.

Berdasarkan data dari Kemhan RI, hingga 2020 setidaknya sudah sekitar 70 Ormas yang telah menandatangani kesepakatan tentang pembinaan kesadaran bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara ini memang dimaksudkan sebagai upaya dalam membangun dan membentuk jiwa karakter bangsa Indonesia, di mana penerapannya memerlukan upaya yang terpadu dan pelibatan tidak hanya Kementerian/Lembaga serta Pemda, namun juga komponen bangsa yang lainnya termasuk kontribusi organisasi kemasyarakatan, tokoh adat dan tokoh agama.

Adanya perjanjian kesepakatan antara Kemhan RI dengan beberapa Ormas tersebut patut diapresiasi sebagai upaya untuk membangun kesadaran bela negara secara masif. Namun, di sisi lain, masih terbatasnya jumlah Ormas yang ikut ambil bagian dalam penandatanganan kesepakatan tentang pembinaan kesadaran bela negara menyiratkan bahwa pembenahan masih perlu untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas. Lemahnya pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas dapat berimplikasi pada melemahnya pertahanan negara terutama dari aspek komponen pendukung. Padahal, peran Ormas sebagai salah satu komponen pendukung pertahanan negara cukup strategis dalam memberikan upaya pembinaan kesadaran bela negara, minimal bagi para anggota Ormas tersebut. Apabila pemahaman dan kesadaran bela negara telah terbangun secara masif di lingkungan Ormas, hal ini akan memberikan efek yang cukup besar dalam rangka membantu upaya pemerintah menyosialisasikan kesadaran bela negara di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas akan menjadi relevan dengan bagaimana Ormas tersebut mampu mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara dalam aktivitas keorganisasiannya.

Secara aktivitas organisasi, GP Ansor telah banyak berkiprah melalui aksi yang beragam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai program dan kegiatan telah banyak dilakukan oleh Ormas GP Ansor sebagai bentuk pelayanannya kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan tidak melulu terkait dengan aktivitas sosial-politik dan keislaman semata, namun juga dikembangkan dalam bentuk kegiatan lainnya seperti pemberdayaan ekonomi, dunia usaha, gerakan anti-narkoba, anti-terorisme, kesehatan, kemaritiman, dan sebagainya (Alamsyah, 2018, p. 2). Perluasan kerja tersebut merupakan bukti akan bentuk tanggungjawab sosial GP Ansor sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang harus memiliki nilai manfaat dan menjadi bagian solusi dari problematika yang dihadapi masyarakat.

Beberapa aksi kerja GP Anzor banyak mendapatkan persepsi positif dari masyarakat, namun sebagian pihak juga ada yang memandang negatif (Saleh, Anwar, & Alamsyah, 2018, p. 230). Dalam hal persepsi positif, misalnya ialah aksi membela toleransi oleh Banser yang diperlihatkan dalam bentuk menjaga keamanan tempat ibadah umat non-muslim dalam merayakan hari raya, melindungi kaum minoritas, membantu korban bencana alam, dsb. Persepsi negatif yang muncul di sebagian kalangan terhadap GP Anzor dan Banser, salah satunya adalah dalam hal isu persekusi yang dilakukan terhadap kelompok yang mendukung radikalisme. Misalnya, dalam aksi penolakan GP Anzor dan juga Banser terhadap ceramah dan pengajian yang dihadiri oleh beberapa tokoh yang dianggap radikal dan intoleran cukup disayangkan oleh beberapa pihak karena dianggap terlalu berlebihan.

Implementasi nilai-nilai bela negara yang dilakukan oleh Ormas GP Anzor sangat penting dalam optimalisasi pelayanannya kepada masyarakat serta menguatkan GP Anzor sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda berwatak kerakyatan, keagamaan dan kebangsaan. Optimalisasi pembinaan kesadaran bela negara dan strategi dalam implementasi nilai-nilai bela negara di lingkungan Ormas GP Anzor akan berdampak pula pada optimalnya ormas GP Anzor sebagai Komponen Pendukung (Komduk) dan potensial untuk dapat ditransformasikan sebagai kekuatan Komponen Cadangan (Komcad) dalam rangka memperkuat Sishankamrata. Selain itu, peran strategis Ormas GP Anzor sebagai organisasi kepemudaan yang berbasis keagamaan juga memiliki peran dalam menginternalisasikan nilai-nilai bela negara kepada para anggotanya dan juga masyarakat. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas yang juga sejalan dengan teori strategi, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul STRATEGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN GERAKAN PEMUDA ANSOR DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI BELA NEGARA GUNA Mendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini ialah bagaimana pembinaan kesadaran bela negara dan strategi Ormas GP Ansor dalam implementasi nilai-nilai bela negara guna mendukung pertahanan semesta. Berkaitan dengan hal tersebut, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yakni:

- a. Bagaimana pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas GP Ansor?
- b. Bagaimana strategi Ormas GP Ansor dalam implementasi nilai-nilai bela negara guna mendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini ialah:

- a. Menganalisis pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas GP Ansor
- b. Menganalisis strategi Ormas GP Ansor dalam implementasi nilai-nilai bela negara guna mendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat teoritis adalah manfaat terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian akademik. Sedangkan manfaat praktis merupakan manfaat dari hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun *stake holder* lainnya secara langsung dan aplikatif.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini ialah agar dapat memberikan sumbangan ilmu terhadap keilmuan strategi pertahanan negara, khususnya dalam hal strategi Ormas dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan pengayaan terhadap khazanah kajian implementasi nilai-nilai bela negara dan PKBN, khususnya implementasi nilai-nilai bela negara dan PKBN di lingkungan Ormas guna mendukung pertahanan negara.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan melalui penelitian ini, manfaat praktis yang dapat diambil ialah dapat mendapatkan *input* terhadap model implementasi nilai-nilai bela negara pada Ormas sebagai salah satu unsur komponen pendukung sistem pertahanan negara. Selain itu, penelitian ini juga dapat menghasilkan input kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan RI dalam rangka melakukan penataan dan pembinaan Ormas sebagai komponen pendukung pertahanan negara.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Dalam bab ini, dipaparkan berbagai macam kumpulan teori serta konsep yang terkait dan relevan dengan topik penelitian, yang didapat dari studi literatur dari berbagai sumber referensi. Landasan teori juga memiliki fungsi membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan penelitian sebagai kerangka teori. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori dan juga konsep guna mendukung penelitian antara lain, teori strategi, teori implementasi, teori pembinaan, konsep pertahanan negara, dan konsep bela negara.

##### **2.1.1 Teori Strategi**

Berdasarkan KBBI Daring (Kemdikbud, n.d), strategi adalah ilmu dan seni dalam menggunakan semua sumber daya bangsa (-bangsa) untuk mengimplementasikan sebuah kebijaksanaan dalam perang dan damai. Dahulu, terminologi strategi lebih banyak digunakan dalam ilmu kemiliteran. Namun, istilah strategi sekarang lebih umum digunakan di bidang non-militer. Beberapa ahli perang mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan strategi.

Menurut Clausewitz (Howard & Paret, 1984), strategi diartikan sebagai penggunaan sebuah keterikatan/keterlibatan untuk tujuan perang (p. 177). Sebagai salah seorang praktisi perang, definisi strategi Clausewitz memang didominasi oleh pengertian strategi dalam konteks militer atau perang. Pendapat lain, Liddle-Hart (1991) mengemukakan bahwa strategi adalah seni dalam mendistribusikan cara-cara militer untuk keperluan pemenuhan tujuan kebijakan (p. 321). Liddle-Hart beranggapan bahwa strategi militer hanyalah berkepentingan terkait dengan masalah memenangi perang/pertempuran.

Lebih lanjut menurut Liddell-Hart, strategi bergantung pada keberhasilan, pertama dan sebagian besar, pada perhitungan yang baik dan koordinasi tujuan dan sarana.

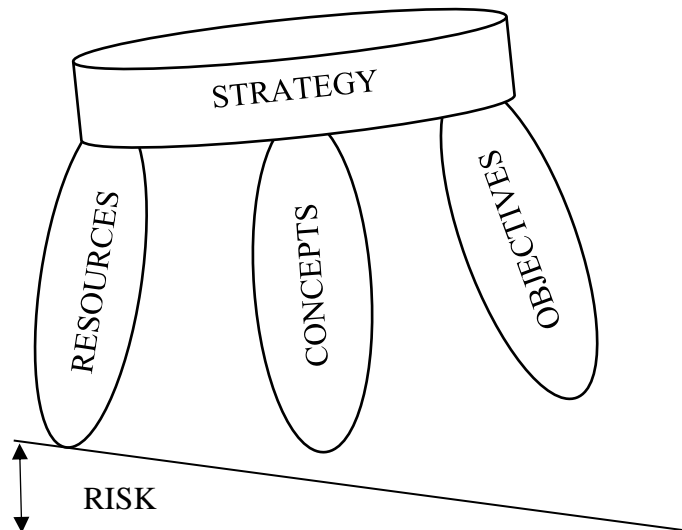
Pakar strategi lainnya, Collin Gray (1999), mengemukakan bahwa strategi adalah jembatan yang menghubungkan kekuatan militer dengan tujuan politik, bukan kekuatan militer semata atau tujuan politik. Strategi juga merupakan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk tujuan-tujuan kebijakan (p. 17). Definisi ini merupakan modifikasi dari terminologi strategi yang dicetuskan oleh Clausewitz.

Definisi lainnya dijelaskan oleh *Join Doctrin Note (JDN) The United States Armed Forces* bahwa strategi adalah tentang bagaimana negara menggunakan instrumen kekuatan nasional untuk melakukan kontrol terhadap orang, tempat, benda, dan peristiwa untuk mencapai tujuan strategis sesuai dengan kepentingan dan kebijakan nasional) (The Joint Staff, 2018, p. 1).

Lebih lanjut, Harry R. Yarger (2006) mendefinisikan strategi melalui model yang dicetuskan oleh Arthur Lykke. Menurut Yarger, strategi adalah tentang bagaimana (*way/cara* atau konsep) kepemimpinan dalam menggunakan kekuatan (*means/sarana* atau sumber daya) yang tersedia untuk negara dalam melakukan kontrol atas keadaan dan lokasi geografis untuk mencapai tujuan (*ends*) yang mendukung kepentingan negara. Dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan, strategi memberikan arah dalam penggunaan kekuatan secara paksa atau persuasif. Arah tersebut bersifat proaktif secara alamiah dan berusaha mengontrol keadaan lingkungan sebagai lawan bereaksi terhadapnya (p. 107).

Lykke memberikan bentuk yang koheren teori strategi dengan artikulasi model strategi “bangku berkaki tiga”-nya yang diilustrasikan bahwa strategi merupakan hasil dari *ends* (tujuan) + *way* (cara) + *means* (sumberdaya), dan jika ketiga komponen ini tidak seimbang, akan terdapat

asumsi risiko yang lebih besar. Secara umum, hubungan antara *ends* (tujuan), *way* (konsep) dan *means* (sumberdaya) digambarkan melalui model berikut ini:



**Gambar 2.1 Model Strategi Art. Lykke**

Sumber: Yarger (2006, p. 110)

Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian strategi yang telah diuraikan, peneliti mensintesis bahwa strategi merupakan metode yang digunakan dalam menggunakan segenap sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta dengan mempertimbangkan adanya aspek risiko dalam mencapai tujuan.

### 2.1.2 Teori Implementasi

Menurut KBBI Daring (Kemdikbud, n.d), implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), implementasi ialah pelaksanaan keputusan kebijakan elementer, biasanya dipadukan dalam regulasi, namun juga bisa berupa perintah dari eksekutif ataupun keputusan dari mahkamah pengadilan yang memiliki urgensi. Seharusnya, penyelesaian masalah dapat diidentifikasi dari hasil keputusan

tersebut, mengusahakan berbagai cara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta penyusunan proses implementasi (Hill & Hupe, 2002, p. 7). Lebih lanjut, Pressman and Wildavsky menyatakan bahwa implementasi adalah sebuah proses yang kompleks, atau lebih tepatnya sebuah sub-proses. Oleh karena itu banyak kemungkinan yang bisa salah. Rantai kausalitas yang semakin panjang, semakin banyak hubungan timbal balik antara tautan dan membuat implementasi yang menjadi lebih kompleks. Namun demikian, tidak dapat dihindari bahwa rantai (kausalitas) ini biasanya panjang (Hill & Hupe, 2002, p. 7).

Dalam melakukan pengkajian implementasi kebijakan, pada dasarnya terdapat beberapa model pendekatan, Pülzl dan Treib (2007, p. 90) membagi teori dan model implementasi menjadi tiga generasi yakni teori dan model *Top-Down*, teori dan model *Bottom-Up* dan teori dan model *Hybrid*. Teori *top-down* berawal dari adanya asumsi bahwa penerapan kebijakan dimulai dari keputusan pemerintah pusat kemudian diikuti oleh rakyat. Teori *top-down* pada intinya mengikuti pendekatan yang bersifat memberi petunjuk atau ketentuan (resmi) yang mengartikan masukan atau *input* sebagai kebijakan dan keluaran (*output*) dalam bentuk implementasi. Karena penekanan mereka pada keputusan pembuat kebijakan pusat, de Leon (dalam Pülzl dan Treib, 2007, p.91) menggambarkan pendekatan *top-down* sebagai "fenomena elit yang mengatur".

Pada teori *bottom-up*, merupakan teori yang hadir untuk sebagai antitesa terhadap teori *top-down*. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa resultan politik kurang memadai terkait dengan tujuan kebijakan asli, dan bahwa hubungan kausalitas yang diasumsikan demikian dipertanyakan. Penerapan teori ini menyandarkan pada jenis kebijakan publik, dimana implementasi kebijakan dijalankan sendiri oleh masyarakat. Namun, bisa juga pemerintah terlibat dalam proses implementasinya, akan tetapi tidak terlalu intens. Oleh karena itu, harapan publik yang menjadi target atau kliennya harus menjadi target kebijakan yang akan dibuat serta

dilaksanakan oleh pejabat eselon rendah. Model kebijakan seperti ini umumnya diinisiasi kelompok masyarakat secara langsung ataupun melalui organisasi masyarakat atau lembaga non-profit (Nugroho, 2017, pp. 746-747). Model pendekatan ketiga ialah model hibrida atau kombinasi/campuran. Pada model ini, implementasi kebijakan merupakan kolaborasi pendekatan pemerintah (*top-down*) dan juga partisipasi masyarakat (*bottom-up*) (Pülzl & Treib, 2007, p. 95).

Dalam memilih model implementasi yang tepat, Nugroho (2017) memberikan pertimbangan bahwa pilihan yang paling efektif adalah yang mengombinasikan antara kebijakan yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Kebijakan kombinasi ini, menurut Nugroho lebih efektif untuk diimplementasikan karena tidak terlalu memakan biaya yang besar. Lebih lanjut, dijelaskan, bahwa kebijakan sistem pertahanan rakyat semesta yang dimiliki Indonesia bisa menjadi contoh konkrit dari implementasi kebijakan tersebut, di mana kolaborasi antara unsur militer dan rakyat (sipil) dapat bekerja sama secara kooperatif murni dan tidak secara hierarkis (p. 755).

Penjelasan yang telah diuraikan tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa keputusan kebijakan sebagai pedoman implementasi dalam menetapkan dan mengidentifikasi berbagai tujuan dan sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang berorientasi pada hasil terhadap pencapaian tujuan ataupun sasaran dari sebuah kebijakan, di mana dalam pelaksanaannya dijalankan oleh berbagai aktor/pelaku.

### **2.1.3 Teori Pembinaan**

Secara akar kata, pembinaan berasal dari kata “bina” yang bermakna mendirikan atau membangun. Menurut KBBI Daring (Kemdikbud, n.d), pembinaan bermakna usaha untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang dilakukan secara efisien dan efektif. Makna lain dari pembinaan ialah segala aktivitas yang dilaksanakan secara terencana,

terarah, dan teratur, sadar, dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menumbuhkembangkan kemampuan serta berbagai sumber daya yang ada.

B. Simanjuntak dan I. L. Pasaribu (1990) mendefinisikan pembinaan sebagai upaya pendidikan formal maupun non formal yang diselenggarakan secara sadar, teratur, terarah, berencana, serta bertanggung jawab dalam rangka membimbing, menumbuhkan, dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian secara seimbang, utuh dan selaras. Pembinaan juga diarahkan dalam menambah, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan diri, antar sesama juga dengan lingkungan ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi yang mandiri (p. 84).

Sementara Mathis dan Jackson (2009) mendefinisikan bahwa pembinaan adalah proses untuk mencapai kemampuan tertentu dengan berorientasi pada tercapainya tujuan organisasi. Pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas, karena pada dasarnya proses pembinaan terkait dengan berbagai tujuan organisasi (p. 12).

Lebih lanjut, Thoha (2004) menguraikan pembinaan sebagai sebuah strategi yang unik dalam sebuah tindakan/proses yang menjelaskan tentang perubahan yang terencana dalam implementasinya serta selalu berupaya untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih baik, perubahan yang efisien dan kontinuitas pembaharuan (p. 19).

Sudjana (2006) mengatakan bahwa pembinaan merupakan serangkaian kegiatan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengembangkan sumber daya manusia serta organisasi agar patuh akan peraturan dan konsisten. Dalam melakukan aktivitas pembinaan, dikenal tiga subfungsi yang digunakan yakni, fungsi pengawasan (*controlling*), fungsi penyeliaan (*supervising*) dan fungsi pemantauan (*monitoring*). Fungsi pengawasan dilakukan kepada lembaga

penyelenggara program, fungsi penyaliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, sedangkan pemantauan dilaksanakan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Fungsi pembinaan tercermin dari kekonsistenan dalam setiap kegiatan pembinaan yang diimplementasikan.

Mencermati beberapa pengertian di atas, peneliti mencoba mensitesakan bahwa pembinaan merupakan cara atau proses yang dilakukan untuk membangun dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dalam konteks perubahan dan pembaruan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan organisasi melalui proses pendidikan formal maupun nonformal yang diselenggarakan secara teratur, terarah, berencana, dan bertanggung jawab.

#### **2.1.4 Konsep Pertahanan Negara**

UUD NRI 1945 pada Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”, menyiratkan bahwa usaha pertahanan-keamanan negara melibatkan rakyat sebagai salah satu subyek pertahanan. Dalam konsepsi pertahanan negara, makna yang terkandung dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut menyiratkan akan doktrin Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem pertahanan negara.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh teritorial NKRI sebagai satu kesatuan wilayah pertahanan, pertahanan negara difungsikan. Pemerintah menyelenggarakan pertahanan serta menyiapkannya secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui

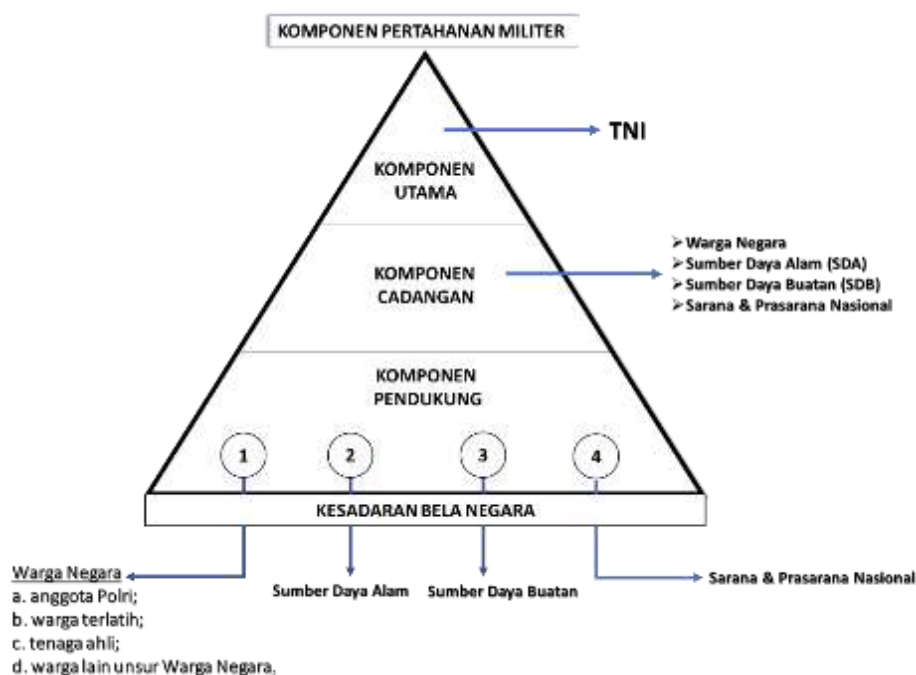
upaya membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.

Pertahanan negara Indonesia pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, di mana kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Kemhan, 2015, p. 27). Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta memiliki ciri kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Ciri kerakyatan berarti orientasi pertahanan diabdikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan artinya gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus sebagai negara maritim (Kemhan, 2015, p. 28).

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta mengintegrasikan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Sistem pertahanan militer terdiri atas komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI sebagai komponen utama berperan dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida dengan didukung oleh kekuatan komponen cadangan yang sudah dimobilisasi dan juga pendukung yang telah dipersiapkan secara dini untuk menggandakan kekuatan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen cadangan dan komponen pendukung merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Secara umum, konsepsi komponen sistem pertahanan militer telah tertuang dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, di mana

unsur komponen pendukung terdiri lima segmen. Namun, setelah berlakunya UU PSDN pada pasal 20 ayat (1), pengelompokan komponen pendukung hanya terdiri atas empat segmen yakni anggota Polri, warganegara yang terlatih, tenaga ahli dan warga lain yang termasuk ke dalam unsur warga negara. Adapun untuk lebih jelasnya, ilustrasi mengenai komponen pertahanan militer seperti gambar berikut:



**Gambar 2.2 Komponen Pertahanan Militer**

Sumber: Kemhan (2015)

Adapun dalam penjelasan Pasal 20, secara ringkas yang dimaksud dengan "warga terlatih" ialah warga negara yang terlatih dan terorganisir, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, baik dalam lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang berpotensi untuk didayagunakan untuk memperkuat pertahanan negara. Warga terlatih yang dimaksud antara lain adalah purnawirawan TNI dan Polri; anggota Menwa; anggota SatPol PP; PolSus; SatPam; LinMas; dan juga Ormas.

### **2.1.5 Konsep Bela Negara**

Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara telah mendapatkan jaminan dari konstitusi yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 45. Lebih lanjut, amanah ini pun diperkuat dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam mewujudkan usaha pertahanan dan keamanan negara, warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam keikutsertaannya. Eksplanasi yang lebih dalam tentang konsep bela negara juga tertuang dalam UU PSDN, pada Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 dalam menjaga keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sikap tersebut bukan merupakan sifat alamiah dari warga negara sejak lahir, sehingga perlu usaha untuk menumbuhkembangkan karakter tersebut sejak dini untuk dapat dipelihara secara berkelanjutan.

Saat ini, regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan bela negara telah mengalami perubahan seiring diberlakukannya UU PSDN untuk Haneg. Hal ini merupakan amanah regulatif dari UU Haneg yang mengamanatkan mengenai usaha bela negara, pembentukan komcad, dan penataan komduk diatur dengan UU tersendiri. UU PSDN merupakan sebuah perubahan paradigma baru dalam melakukan pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dengan melakukan upaya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, di mana salah satunya ialah melalui upaya bela negara,

Bela Negara telah menjadi amanah yang harus dijalankan dalam bingkai hak dan kewajiban konstitusi yang dikenakan pada setiap warga negara dalam rangka menegakkan kedaulatan dan keutuhan keselamatan bangsa. Bela negara sangat bergantung pada sejauh mana rasa kesadaran

bela negara warga negara dan keyakinan terhadap kekuatan sendiri yang diwujudkan melalui implementasi bela negara. Di sisi lain, upaya untuk melestarikan karakter nasionalisme bangsa Indonesia juga menjadi bagian integratif dari upaya bela negara yang dalam pengelolaannya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PKBN demi tujuan nasional.

Upaya Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) menjadi bagian penting dalam usaha untuk menghadirkan kesadaran bela negara warganegara yang pada akhirnya akan berorientasi pada terwujudnya aktualisasi bela negara masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKBN merupakan segala usaha dan tindakan yang dilakukan guna menumbuhkan sikap dan perilaku warganegara yang memiliki nilai-nilai bela negara. Agar terbangun rasa kesadaran bela negara dan internalisasi nilai-nilai bela negara terhadap masyarakat Indonesia, dibutuhkan adanya kesamaan pedoman dalam implementasinya. Oleh karena itu, dalam Permenhan No. 32 Tahun 2016 tentang PKBN menjadi panduan (*guide line*) dalam melaksanakan implementasinya.

Berdasarkan Permenhan RI No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang menyebutkan bahwa terdapat lima nilai bela negara yang dijadikan pedoman dalam pembinaan kesadaran bela negara, yaitu:

1. Cinta tanah air;
2. Sadar berbangsa dan bernegara;
3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara;
5. Memiliki kemampuan awal (kesiapan fisik dan mental) bela negara.

Dalam pelaksanaannya, implementasi nilai-nilai bela negara dapat diukur melalui indikator keluaran yang merupakan output dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, di mana terdapat 24 indikator

utama yang merupakan penjabaran dari 5 (lima) nilai bela negara. Adapun, indikator dari nilai-nilai bela negara dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

**Table 2.1 Indikator Nilai Bela Negara**

No.	Nilai-Nilai Bela Negara	Indikator
1.	Cinta Tanah Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia.</li> <li>2. Bangga sebagai bangsa Indonesia.</li> <li>3. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia.</li> <li>4. Memberi kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia.</li> <li>5. Mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian bangsa Indonesia.</li> </ol>
2.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kesadaran keragaman, budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat.</li> <li>2. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai WN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungannya.</li> <li>4. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.</li> </ol>
3.	Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami nilai dalam Pancasila.</li> <li>2. Mengamalkan nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.</li> <li>3. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia.</li> <li>4. Senantiasa mengembangkan nilai Pancasila.</li> <li>5. Setia pada Pancasila dan meyakinkannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ol>
4.	Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara.</li> <li>2. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman.</li> <li>3. Memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara.</li> <li>4. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya.</li> </ol>

		5. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
5.	Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara (Kesiapan Fisik dan Mental)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau kecerdasan dalam mengatasi kesulitan (AQ).</li> <li>2. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa &amp; raganya.</li> <li>3. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan.</li> <li>4. Terus membina kemampuan jasmani &amp; rohani.</li> <li>5. Memiliki kemampuan bela negara dalam bentuk keterampilan</li> </ol>

Sumber: Kemhan (2016)

## 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan salah satu bagian penting dalam proses penelitian dimana, peneliti dapat menggunakan penelitian tersebut untuk mendukung permasalahan yang terkait terhadap topik penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Langkah ini sangat bermanfaat untuk tidak terjadinya repetisi topik penelitian yang sama dan juga mengantisipasi adanya tindakan plagiarism terhadap karya ilmiah orang lain. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan juga bermanfaat untuk membantu menajamkan proses analisis data hasil penelitian, disertai dengan komparasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Pertama, penelitian Natawiria (2009) dengan judul Model Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Mahasiswa dalam rangka Pertahanan Negara (Studi di Institut Manajemen Telkom Bandung). Penelitian ini mencoba untuk mencari bentuk model strategi pembinaan kesadaran bela negara yang dikhususkan untuk para mahasiswa IMT Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menemukan terdapat tiga masalah utama dalam pelaksanaan pembinaan bela negara. Pertama ialah budaya unggul yang tidak tercermin

dalam sebagian bangsa Indonesia. Kedua, adanya krisis ideologi terhadap ideologi Pancasila, di mana kesetiaan terhadap Pancasila semakin berkurang. Ketiga yakni pengaruh nilai globalisasi terhadap nilai kejujuran mahasiswa. Kemudian, model pembinaan bela negara yang ditawarkan ialah pertama, menumbuhkan efek *deterrence* dengan melakukan transformasi kekuatan pertahanan. Kedua, dengan membangun dan menyiapkan mahasiswa sebagai unsur kekuatan yang mendukung kekuatan militer, terutama dalam mendukung pertahanan nir-militer dengan modal kekuatan lulusan (alumni) yang berkarakter Pancasila dan profesional di bidangnya atau berbudaya unggul.

Kedua, penelitian Safira et. al (2014) dengan judul Peran GP Ansor dalam Menumbuhkan Nasionalisme di Kalangan Pemuda Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran GP Ansor dalam rangka membangun dan mengembangkan rasa nasionalisme pemuda dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam hal tersebut. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran GP Ansor dalam membangun dan mengembangkan rasa nasionalisme pemuda adalah melalui kegiatan PKD dan PLD. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam menumbuhkan nasionalisme yakni kendala internal yang meliputi kesibukan bekerja, permasalahan keluarga, kebutuhan pribadi anggota serta kendala eksternal meliputi aspek pendanaan, pengaruh organisasi lain, dan antusiasme pemuda mengikuti kegiatan.

Ketiga, penelitian Widiatmaka, et.al (2016) yang berjudul Peran Organisasi Kepemudaan dalam Membangun Karakter Pemuda dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengupas tentang peran PC GP Ansor dalam kaitannya untuk mengembangkan karakter kepemudaan serta dampak terkait, dalam hal ini adalah ketahanan pribadi.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian di lapangan memperlihatkan bahwa peran GP ANsor kabupaten Sidoarjo belum maksimal karena masih menghadapi kendala-kendala, seperti kekosongan jabatan, kurang koordinasi dan keaktifan pengurus, kepentingan pribadi pengurus, serta faktor keuangan.

Keempat, penelitian Novyanti et.al (2019) yakni Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Bela Negara dalam Kontra Radikal pada Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian desain *case study* dengan metode kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini didapat kesimpulan bahwa terdapat lima strategi. Adapun strategi yang digunakan antara lain ialah melaksanakan sosialisasi syiar kebhinekaan, memunculkan nilai-nilai ke-Indonesiaan dalam setiap kegiatan, mengadakan acara-acara bernuansa kebangsaan, memakai *tagline* dan logo yang bercirikan Indonesia serta menggiatkan acara diskusi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Selain itu, dalam upaya kontra radikal strategi yang dikembangkan dalam konteks internal antara lain ialah proses pola kaderisasi, FGD yang kontinu, pelaksanaan seminar/diskusi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Sedangkan dalam konteks eksternal, strategi yang digunakan antara lain ialah mengadakan Deklarasi anti berita bohong, menyosialisasikan *event* dai KAMMI. Kesolidan SDM disertai adanya dukungan koneksi dari lingkungan eksternal menjadi strategi KAMMI dalam menginternalisasikan nilai-nilai bela negara.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu di atas, secara umum dapat digambarkan pada tabel berikut mengenai komparasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Table 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Model Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Mahasiswa dalam rangka Pertahanan Negara (Studi di Institut Manajemen Telkom Bandung)	Natawiria (2009), Tesis Magister Kajian Ketahanan Nasional UGM	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat tiga masalah utama dalam pelaksanaan pembinaan bela negara. Pertama ialah budaya unggul yang tidak tercermin dalam sebagian bangsa Indonesia. Kedua, adanya krisis ideologi terhadap ideologi Pancasila, di mana kesetiaan terhadap Pancasila semakin berkurang. Ketiga yakni pengaruh nilai globalisasi terhadap nilai kejuangan mahasiswa.</li> <li>• Model pembinaan bela negara yang ditawarkan ialah pertama, menumbuhkan efek <i>deterrence</i> dengan melakukan transformasi kekuatan pertahanan. Kedua, dengan membangun dan menyiapkan mahasiswa sebagai unsur kekuatan yang mendukung kekuatan militer, terutama dalam mendukung pertahanan nir-militer dengan modal kekuatan lulusan (alumni) yang berkarakter</li> </ul>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang aspek strategi</li> <li>• Membahas tentang pembinaan kesadaran BN</li> <li>• Menggunakan metode kualitatif</li> </ul> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subyek penelitian ini merupakan mahasiswa (IM Telkom Bandung)</li> <li>• Tidak membahas implementasi nilai BN</li> </ul>

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				Pancasila dan profesional di bidangnya atau berbudaya unggul.	
2.	Peran GP Ansor dalam Menumbuhkan Nasionalisme di Kalangan Pemuda Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang	Safira <i>et.al</i> (2014), Jurnal	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran GP Ansor dalam mengembangkan nasionalisme di kalangan pemuda adalah melalui metode Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan Pendidikan Latihan Dasar (PLD).</li> <li>• Kendala yang dihadapi dalam menumbuhkan nasionalisme yakni kendala internal yang meliputi kesibukan bekerja, permasalahan keluarga dan pemenuhan kebutuhan pribadi anggota</li> </ul>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang Ormas kepemudaan</li> <li>• Menggunakan metode kualitatif</li> </ul> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian in terlalu sempit, yakni level Kelurahan di Semarang</li> <li>• Tidak membahas implementasi nilai bela negara</li> <li>• Tidak membahas aspek strategi</li> </ul>
3.	Peran Organisasi Kepemudaan dalam Membangun Karakter Pemuda dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo	Widiatmaka, <i>et.al</i> (2016), Jurnal Ketahanan Nasional	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakter pemuda mampu dikembangkan PC GP Ansor, akan tetapi, terkendala antara lain keuangan dan koordinasi antar pengurus, kurang aktifnya pengurus, adanya jabatan yang lowong, serta adanya kepentingan pribadi.</li> </ul>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subyek Penelitian Ormas GP Ansor</li> <li>• Menggunakan metode kualitatif</li> </ul> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian ini pada peran Ormas GP Ansor dalam membangun karakter dan ketahanan pemuda</li> </ul>

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Provinsi Jawa Tengah)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subyek penelitian merupakan Ormas GP Ansor cabang Sukoharjo</li> <li>• Tidak membahas aspek strategi</li> </ul>
4.	Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Bela Negara dalam Kontra Radikal pada Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta	Novyanti et al (2019), Jurnal Prodi Peperangan Asimetris	Kualitatif (Studi Kasus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi yang digunakan KAMMI dalam menginternalisasikan nilai bela negara yakni memunculkan nilai-nilai ke-Indonesiaan dalam setiap kegiatan, mengadakan acara-acara bernuansa kebangsaan, menyosialisasikan syiar keberagaman, memakai <i>tagline</i> dan logo yang bercirikan Indonesia serta menggiatkan acara diskusi dan Focus Group Discussion (FGD).</li> <li>• Kesolidan SDM disertai adanya dukungan koneksi dari lingkungan eksternal menjadi strategi KAMMI dalam menginternalisasikan nilai-nilai bela negara</li> </ul>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang topik bela negara</li> <li>• Menggunakan metode kualitatif</li> <li>• Membahas aspek strategi</li> </ul> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian ini pada strategi internalisasi nilai bela negara</li> <li>• Lokus penelitian berada di lingkungan organisasi kemahasiswaan</li> </ul>

Sumber : Diolah Peneliti (2020)

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan seperti yang tersebut di atas, penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ialah

menganalisis pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas GP Ansor dan strategi GP Ansor dalam implementasi nilai-nilai bela negara guna mendukung pertahanan semesta. Diharapkan, dengan adanya penelitian ini, mampu menyumbangkan ilmu pengetahuan terhadap kajian strategi pertahanan negara, lebih khusus tentang strategi implementasi nilai-nilai bela negara di lingkungan Ormas sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara. Disamping itu, penelitian ini juga berguna untuk memperkaya khazanah kajian implementasi nilai bela negara, khususnya implementasi nilai-nilai bela negara di lingkungan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan secara praktikal, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbang saran terhadap input kebijakan untuk melakukan penataan dan pembinaan Ormas sebagai salah satu unsur komponen pendukung sistem pertahanan negara.

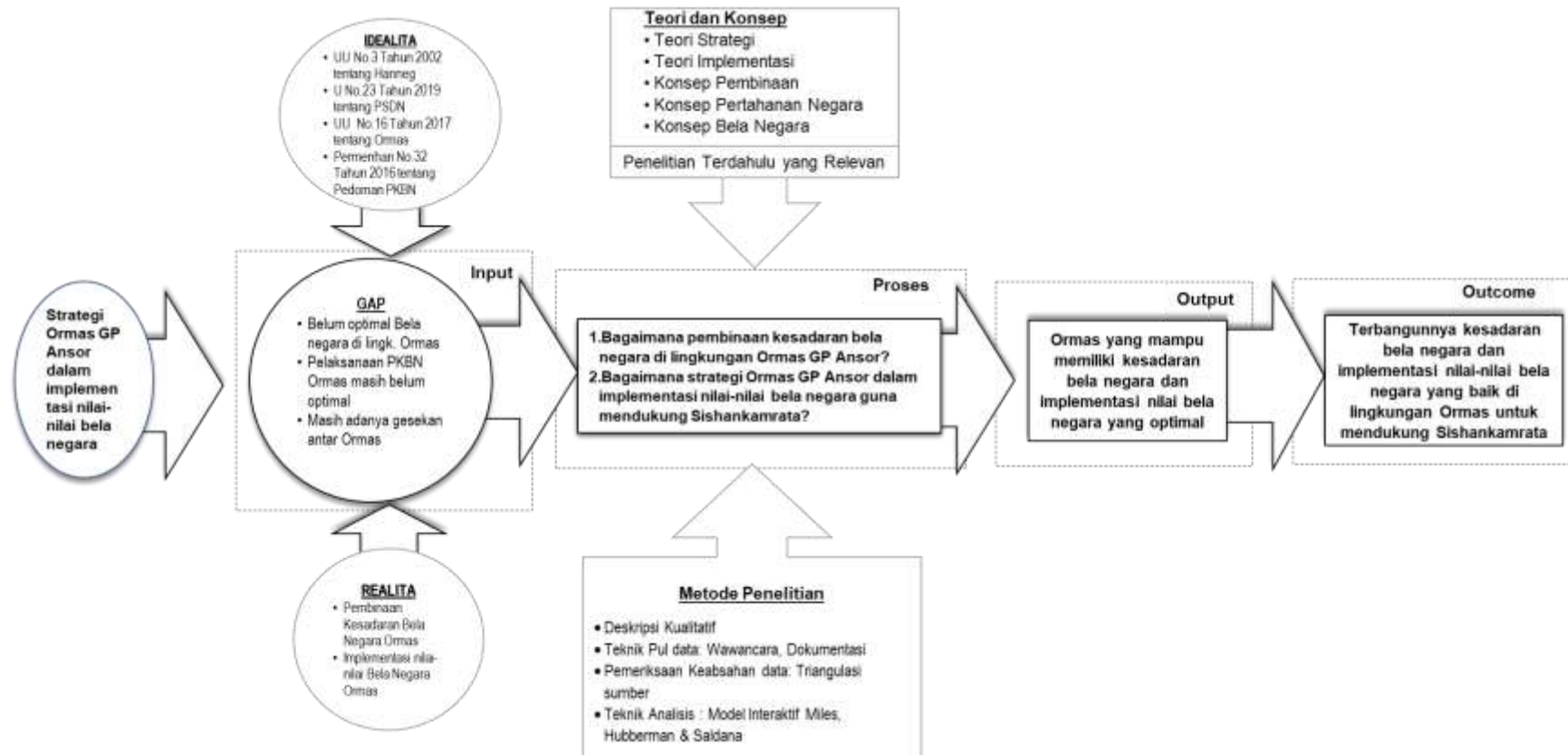
### **2.3 Kerangka Berpikir**

Dalam proses penelitian, kerangka berpikir dapat berfungsi sebagai model konseptual yang mengilustrasikan antara teori yang digunakan dihubungkan dengan beragam faktor yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai sebuah isu atau problematika yang penting untuk diteliti. Sedangkan, menurut Suriasumantri (1986), segala gejala objek permasalahan dapat diperjelas sementara dengan adanya kerangka pemikiran (Sugiyono, 2017, p. 60). Lebih lanjut, dengan adanya kerangka berpikir, hubungan antara variabel yang secara teoritis akan diteliti dapat lebih terlihat jelas.

Penelitian ini didasari atas masih belum optimalnya Ormas dalam mengimplementasikan nilai bela negara di tengah masyarakat. Keterlibatan Ormas terkait kegiatan pembinaan kesadaran bela negara masih perlu optimalisasi, terutama peran dari *stake holder* penyelenggara kegiatan pembinaan kesadaran bela negara yang masih belum banyak merangkul Ormas sebagai obyek pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan

masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam UU PSDN Pasal 9 bahwa kader Ormas merupakan salah satu target pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan permukiman.

Pembinaan kesadaran bela negara dan strategi dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di lingkungan Ormas GP Ansor akan menghasilkan *output* yang positif terhadap terwujudnya pertahanan negara yang kuat khususnya dalam hal pertahanan nir-militer. Selain itu, masyarakat sebagai salah satu sasaran implementasi nilai-nilai bela negara Ormas GP Ansor akan mendapatkan manfaat dari aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan bela negara dan implementasi nilai bela negara GP Ansor selayaknya dapat diidentifikasi untuk dapat dicarikan solusi agar implementasi nilai-nilai bela negara di lingkungan Ormas bisa dilakukan secara optimal. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka kerangka pemikiran secara konseptual dapat disajikan melalui bagan berikut:



**Gambar 2.3 Kerangka Berpikir**

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode dan Desain Penelitian**

Langkah penting dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dalam rangka mengumpulkan data dan informasi serta melakukan investigasi pada data yang telah diperoleh untuk memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian secara umum dapat dibedakan atas metode kualitatif, kuantitatif dan juga *mixed methods* (campuran/kombinasi). Sedangkan desain penelitian dapat diartikan sebagai strategi yang digunakan oleh peneliti dalam mengintegrasikan komponen penelitian untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam aplikasinya, terdapat beberapa perbedaan terhadap desain penelitian yang dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain ialah: penelitian etnografi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi, dan penelitian naratif.

##### **3.1.1 Metode Penelitian**

Didefinisikan sebagai metode akademik yang digunakan peneliti dalam upaya mendapatkan data penelitian untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2017, p. 2). Metode penelitian pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi 2 jenis metode, yakni metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta kombinasi kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*).

Metode penelitian kuantitatif biasanya dicirikan oleh penelitian sampel pada suatu populasi tertentu, instrumen penelitian umumnya berupa angket/kuisisioner, cenderung menggunakan analisa statistik, dan biasanya bersifat menguji hipotesis ataupun teori yang sudah dikonstruksi sebelumnya. Berbeda dengan kuantitatif, penelitian kualitatif lebih cenderung meneliti kondisi obyek alamiah dengan menggunakan peneliti

sebagai instrumen utama penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih fokus pada pemaknaan terhadap data ketimbang melakukan generalisasi seperti dalam penelitian kuantitatif. Selain itu, pemeriksaan terhadap keabsahan data dengan menggunakan beberapa metode menjadi ciri khusus dari penelitian kualitatif yang tidak ditemui dalam penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2017, pp. 8-9).

Berdasarkan penjelasan tersebut, metode penelitian kualitatif dipilih peneliti dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan karena metode kualitatif lebih sesuai digunakan untuk meneliti topik penelitian ini, di mana peneliti ingin memahami bagaimana implementasi nilai-nilai bela negara beserta strategi Ormas dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara guna mendukung pertahanan semesta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017) bahwa untuk penelitian yang belum memiliki masalah yang jelas, samar ataupun gelap, penuh makna sehingga tidak mungkin menggunakan metode penelitian kuantitatif, akan tetapi penelitian kualitatif lebih cocok digunakan. Dengan harapan, penggunaan metode kualitatif, akan membantu peneliti untuk memperdalam topik penelitian dengan melakukan wawancara secara *in depth* untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan agar terlihat jelas solusinya (p. 24).

### **3.1.2 Desain Penelitian**

Salah satu strategi dalam penelitian yang sering dijadikan pedoman ataupun arah oleh peneliti untuk mendapatkan penelitian yang efektif dan efisien ialah desain penelitian. Melalui desain penelitian, peneliti akan mendapatkan panduan ataupun pedoman serta prosedur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun dan menemukan solusi atas permasalahan penelitian. Pada dasarnya, pendekatan penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi lima jenis desain penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Cresswell (2009, p. 13) yakni: *ethnography, grounded theory, case studies, phenomenology, dan narrative*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain fenomenologi. Secara etimologis, istilah fenomenologi berasal dari kata "*phenomenon*" yang bermakna realita yang terlihat, dan "*logos*" yang bermakna ilmu. Sehingga dapat dikatakan bahwa fenomenologi selalu berusaha untuk menghasilkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Menurut Raco (2010, pp. 40-42), metode fenomenologi berakar dari filsafat fenomenologi, di mana prinsip dasarnya ialah membiarkan gejala-gejala yang disadari tersebut memperlihatkan dirinya (*to show themselves*). Sesuatu fenomena akan terlihat sebagaimana adanya (*things as they appear*). Masalah utama yang akan diteliti dalam metode ini adalah pengertian ataupun makna, struktur dan hakikat dari suatu gejala yang dialami oleh seseorang atau kelompok atas peristiwa hidupnya.

Dalam studi fenomenologi, peneliti tidak melakukan dugaan, namun berfokus pada topik tertentu yang baru, menyusun pertanyaan atau masalah untuk memandu penelitian, dan mendapatkan temuan yang akan memberikan dasar untuk penelitian dan refleksi lebih lanjut. Dalam ilmu fenomenologis, suatu hubungan selalu ada antara persepsi eksternal terhadap objek-objek alami dan persepsi internal, ingatan, dan penilaian (Moustakas, 1994, p. 33).

Berdasarkan penjelasan tentang desain penelitian tersebut di atas, peneliti akan menggunakan desain penelitian fenomenologi untuk mengungkapkan dan memahami lebih dalam tentang strategi implementasi nilai-nilai bela negara yang dilakukan oleh Ormas GP Ansor. Lebih lanjut, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan tujuan kualitatif eksplanatori, di mana menurut Leavy (2017) yang menyatakan bahwa "*When we want to explain causes and effects, correlations, or why things are the way, explanatory research is appropriate*" (p. 5). Dengan kata lain, fokus utama penelitian eksplanatori ialah untuk menjelaskan hubungan sebab akibat tentang sebuah fenomena atau mencari tahu lebih dalam tentang fenomena/masalah yang diamati. Dengan kata lain, penelitian

eksplanatori berusaha untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu fenomena dapat terjadi dengan menggambarkan gejala yang muncul serta mencoba memaknai penyebab kemunculannya dalam deskripsi yang rinci.

## 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Tempat Penelitian

Terkait dengan *locus* penelitian, penelitian ini mengambil tempat di Jakarta dengan pengambilan data sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat GP Ansor, Jl. Kramat Raya No. 65A, DKI Jakarta
- b. Kantor Pusat Banser GP Ansor, Jl. Kramat Raya No. 65A, DKI Jakarta
- c. Kantor Kementerian Pertahanan, Jl.Tanah Abang Timur 8, Gambir, DKI Jakarta

Alasan dari pemilihan *locus* dan pengambilan data tersebut ialah karena pada lokasi-lokasi tersebut terdapat informan yang bisa memberikan informasi mengenai topik penelitian yang akan diteliti.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Periode penelitian ini dilakukan selama beberapa bulan yakni mulai bulan Mei s.d Oktober 2020 dengan rincian:

**Table 3.1 Jadwal Penelitian**

No.	Uraian Kegiatan	Bulan					
		Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt
1	Melakukan studi pendahuluan						
2	Literatur study						
3	Penyusunan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Melakukan Penelitian Lap.						

6	Melakukan Olah Data						
7	Melakukan Analisis Data						
8	Penyusunan Hasil Penelitian						
9	Bimbingan dan Konsultasi						
10	Sidang Tesis						
11	Perbaikan Draf Hasil Sidang						

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

### 3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian, salah satu yang perlu menjadi perhatian ialah subyek dan obyek penelitian. Subyek penelitian biasanya terkait dengan orang, tempat dan juga benda yang diamati serta terkandung/melekat di dalamnya obyek (variabel) penelitian. Sedangkan obyek penelitian merupakan gejala atau fenomena yang menjadi pokok permasalahan yang akan dipelajari dan diteliti dalam penelitian.

#### 3.3.1 Subyek Penelitian

Keseluruhan objek di mana informan berada untuk memberikan informasi tentang masalah penelitian yang akan dilakukan merupakan subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian diistilahkan informan yakni pihak yang dipercaya mempunyai informasi yang akurat yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, istilah informan ataupun narasumber lazim digunakan bagi sampel penelitian kualitatif. Sementara, subyek penelitian bisa berupa lembaga/organisasi, manusia ataupun benda, di mana di dalamnya terkandung objek penelitian (Sugiyono, 2017, p. 216).

Saat melakukan pemilihan informan, terdapat dua teknik umum yang sering digunakan yakni *probability sampling* dan *non-probability sampling*. Teknik pengambilan sampel melalui *probability sampling* dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama dari setiap anggota populasi untuk dapat dijadikan sampel. Sebaliknya, teknik *non-probability sampling*

merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2017, p. 218). Lebih lanjut, teknik *purposive sampling* merupakan salah satu teknik pengambilan data dalam penelitian kualitatif *non-probability sampling* yang dilakukan atas pertimbangan/tujuan tertentu, misalnya narasumber tersebut dianggap memiliki informasi terhadap permasalahan penelitian

Peneliti lebih memilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan yang lebih sesuai untuk dalam metode kualitatif. Peneliti memilih beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang terkait dengan topik penelitian. Namun, tidak menutup kemungkinan, peneliti akan menggunakan teknik *non-probability sampling* lainnya yaitu *snowball sampling*, di mana teknik tersebut merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan informan lanjutan karena informan yang telah ditentukan sebelumnya tidak/belum mampu memberikan keterangan/informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mencari jawaban penelitian. Sehingga dibutuhkan informan baru yang dianggap lebih mengetahui tentang permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, beberapa informan dipilih sebagai subyek penelitian dalam penelitian ini, antara lain ialah Sekretaris Jenderal GP Ansor, Wakasatkornas BANSER GP Ansor, Ketua Bidang Kaderisasi GP Ansor, Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan RI dan Akademisi. Adapun rincian narasumber adalah sebagai berikut:

**Table 3.2 Data Narasumber**

No	Narasumber	Instansi	Jumlah
1	Sekretaris Jenderal GP Ansor	Ormas GP Ansor	1
2	Kasatkornas BANSER GP Ansor	Ormas GP Ansor	1
3	Ketua Bidang Kaderisasi GP Ansor	Ormas GP Ansor	1
4	Kasubdit Lingkungan Permukiman Dit. Bela Negara Kementerian Pertahanan RI	Kemhan RI	1
5	Akademisi	Unhan	1

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

### 3.3.2 Obyek Penelitian

Menurut Arikunto (2013, p. 161), obyek penelitian merupakan variabel penelitian yang menjadi inti dari permasalahan penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2017), yang dimaksud dengan obyek penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditentukan peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan (p. 39). Spradley menyatakan bahwa objek penelitian dalam penelitian kualitatif bisa berupa situasi sosial seperti *places, actor, activities* (tempat, aktor dan aktivitas) (Sugiyono, 2017, p. 229).

Adapun obyek penelitian, masalah, isu yang akan dibahas, diteliti dan diselidiki dalam penelitian ini ialah pembinaan kesadaran bela negara dan strategi Ormas GP Ansor dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara guna mendukung pertahanan semesta.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data hasil penelitian yang berkualitas, faktor instrumen penelitian serta pengumpulan data yang berkualitas sangat berperan penting. Kualitas instrumen penelitian terkait dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan kualitas pengumpulan data berhubungan

dengan kesesuaian metode mengumpulkan data. Jaminan akan validitas dan reliabilitas terhadap pengumpulan data sangat bergantung pada ketepatan dalam penggunaan instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi berpartisipatif serta dokumentasi sangat menentukan dalam pengumpulan data primer pada penelitian kualitatif yang menuntut adanya kondisi *natural setting* (Sugiyono, 2017, p. 225).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*in depth interview*) dan juga studi dokumentasi dengan harapan agar penggunaan kedua teknik pengumpulan data tersebut, dapat menghasilkan data hasil penelitian yang optimal.

#### **3.4.1 Wawancara mendalam (*in depth interview*)**

*Inerview* atau wawancara secara harfiah adalah percakapan dua pihak dengan maksud tertentu, yakni pewawancara dan terwawancara. Menurut Creswell (2009, p. 232) menyatakan bahwa wawancara bermakna *that the researcher conducts face-to-face interviews with participants, interviews participants by telephone, or engages in focus group interviews with six to eight interviewees in each group* (proses komunikasi peneliti dengan narasumber/informan secara tatap muka (*face to face*), menggunakan media seperti telepon, atau terlibat dalam wawancara kelompok fokus dengan 6 hingga 8 orang yang diwawancarai di setiap grupnya). Sementara menurut Esterberg (2002), *interview* adalah pertemuan dua pihak yang saling bertukar ide dan informasi mengenai suatu topik tertentu melalui beberapa pertanyaan dan tanggapan yang bertujuan untuk menghasilkan komunikasi dan konstruksi makna bersama (Sugiyono, 2017, p. 231).

Estenberg (2002) mengemukakan tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2017,

p. 233). Dari ketiga jenis wawancara tersebut, peneliti menggunakan wawancara semi-struktur. Wawancara semi-struktur tergolong wawancara mendalam, yang juga lebih leluasa dalam melontarkan pertanyaan dibandingkan dengan wawancara terstruktur tanpa mengurangi kadar informasi yang diterima peneliti dari informan. Pada saat melakukan wawancara, semua keterangan yang dinyatakan oleh narasumber secara cermat disimak dan dicatat oleh peneliti.

Pertimbangan peneliti menggunakan teknik wawancara semi-struktur ialah untuk tetap bisa fokus pada permasalahan penelitian pada saat melakukan wawancara, namun masih tetap membuka ruang untuk mengajukan pertanyaan tambahan untuk menggali lebih dalam informasi yang diinginkan dari informan. Untuk mendukung jalannya wawancara, alat bantu seperti *voice recorder*, catatan kecil, dsb, peneliti gunakan untuk mencatat setiap detail informasi yang disampaikan. Selain itu, peneliti juga membuat transkrip hasil wawancara sebagai bahan analisis agar membantu dalam proses analisa data.

### **3.4.2 Dokumentasi**

Dokumen secara sederhana dapat dikatakan sebagai rekaman informasi yang dapat dijadikan sebagai bukti keterangan. Menurut Schensul (2008, p. 232) , dokumen diartikan sebagai “*text-based file that may include primary data (collected by the researcher) or secondary data (collected and archived or published by others) as well as photographs, charts, and other visual materials*” (file berbasis teks yang dapat mencakup data primer (dikumpulkan oleh peneliti) atau data sekunder (dikumpulkan dan diarsipkan atau diterbitkan oleh orang lain) serta foto, grafik, dan bahan visual lainnya). Penjelasan Schensul tentang dokumen menerangkan bahwa dokumen dapat berbentuk dalam berbagai media (surat, buku, laporan, foto, grafik, film, rekaman suara, dsb). Metode dokumentasi pada intinya berfungsi selain sebagai pelengkap data hasil wawancara dan

observasi, namun juga sebagai bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dengan metode triangulasi

Terkait dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut didapatkan dari lingkungan Ormas GP Ansor sendiri, maupun dari Kementerian Pertahanan RI, melalui proses pemilahan untuk dijadikan data pendukung penelitian. Untuk melengkapi dokumentasi, peneliti juga membuat catatan-catatan kecil serta dokumentasi foto lapangan.

### **3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data**

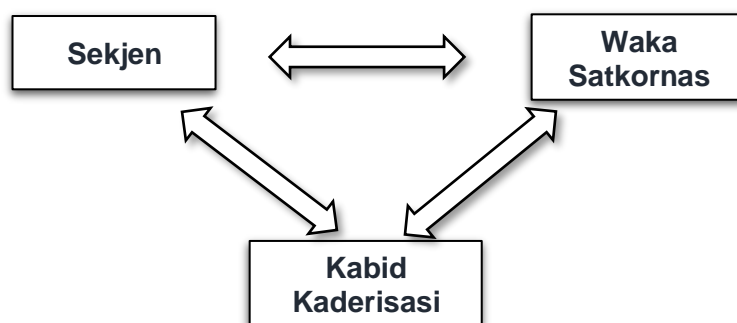
Pemeriksaan keabsahan data adalah salah satu tahapan penting dalam proses penelitian yang berfungsi sebagai sarana untuk melihat sejauh mana tingkat keakuratan dan keabsahan data hasil penelitian. Dalam pengujian keabsahan data, ada perbedaan istilah antara metode kuantitatif dengan kualitatif. Menurut Moleong (2017), dalam penelitian kualitatif, terdapat empat jenis uji keabsahan data yakni *credibility* (derajat kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (kepastian) (p. 324).

Adapun dalam penelitian ini, karena keterbatasan waktu penelitian, peneliti hanya menggunakan uji *credibility* (kredibilitas) untuk memeriksa keabsahan data. Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2017, p. 270), terdapat beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas di mana salah satunya ialah triangulasi.

Untuk mendapatkan keabsahan data penelitian, peneliti memilih untuk menggunakan metode triangulasi. Triangulasi berguna untuk menjamin validitas penelitian. Calabrese (2006), mendefinisikan triangulasi sebagai *a qualitative process that tests the consistency of findings gathered through different methods and sources data, including field notes, artifacts,*

*and transcripts* (proses kualitatif yang menguji konsistensi temuan yang dikumpulkan melalui metode yang berbeda dan data sumber, termasuk catatan-catatan lapangan, artefak-artefak, dan transkrip-transkrip) (Emilia, 2017, p. 197). Triangulasi dapat digunakan apabila dalam penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian, digunakan lebih dari satu metode atau jenis data.

Secara umum, triangulasi dapat dibedakan menjadi triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber adalah metode yang sering dipakai dalam memeriksa data yang dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber untuk kemudian diuji tingkat kredibilitas datanya dengan cara melakukan pengecekan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan (Sugiyono, 2017, p. 274). Adapun triangulasi sumber yang dimaksud dapat ditunjukkan melalui gambar di bawah ini:



**Gambar 3.1 Triangulasi Sumber**

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

Dalam penelitian ini, karena keterbatasan waktu penelitian peneliti hanya akan menggunakan teknik triangulasi sumber dengan didukung oleh teknik wawancara dan juga dokumentasi. Selain itu dalam penelitian ini juga akan dilengkapi dengan data foto kegiatan penelitian, rekaman wawancara, dan dokumentasi pendukung lainnya mengenai implementasi nilai-nilai bela negara di lingkungan ormas GP Ansor.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam metode kualitatif, analisis data merupakan proses yang dilakukan secara kontinu dari awal penelitian hingga penulisan laporan penelitian. Analisa data dilakukan dengan menyusun hasil penelitian lapangan berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, hasil dokumentasi untuk kemudian dilakukan pengolahan dan simplifikasi ke dalam bentuk pola yang lebih mudah dipelajari dan dipahami untuk dapat ditarik kesimpulan.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dioptimalkan untuk mendapatkan informasi sedalam mungkin, kontinu, hingga informasi yang didapatkan menjadi data jenuh sebagai bahan analisa. Analisis data kualitatif bersifat induktif, di mana menurut Sugiyono (2017, p. 245) tahapan analisis data kualitatif setidaknya terdiri dari tiga fase, yakni, analisis pra-lapangan, analisis di lapangan, dan analisis pasca-lapangan. Ketiga fase tersebut merupakan sebuah mata rantai analisa yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga proses analisis dalam penelitian kualitatif bersifat komprehensif dari awal hingga akhir penelitian.

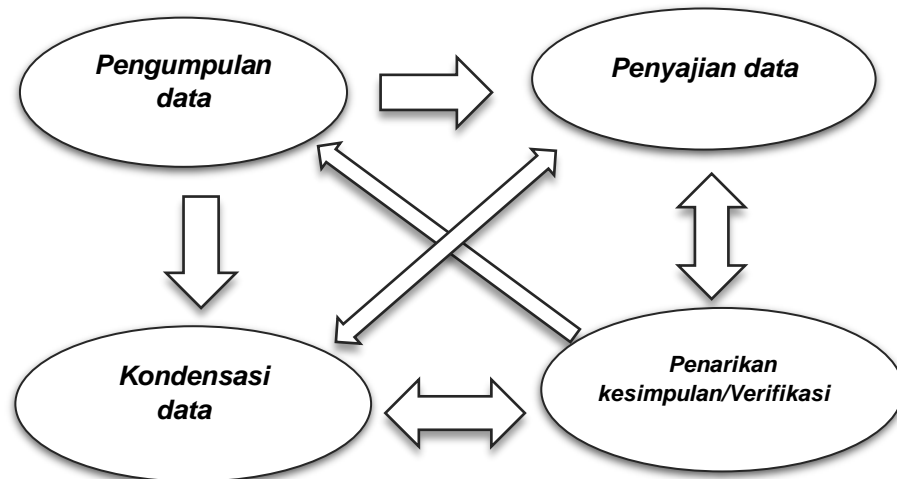
Penelitian ini memakai model analisis model interaktif kualitatif Miles, Huberman & Saldana (2014), di mana analisis ini terdiri atas tiga fase aktivitas yang dilakukan secara simultan yakni kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Miles, Huberman, & Saldana, 2014, p. 31). Adapun keterangan dari tiap tahapan tersebut dapat disajikan melalui penjelasan berikut ini:

- a. Kondensasi data (*Data condensation*); kondensasi data adalah bagian tidak terpisahkan dari proses analisis yang berguna untuk melakukan pemilihan dan pemilahan, serta simplifikasi data hasil penelitian, agar dapat dilakukan tindak lanjut untuk pengolahan, pengkodean dan bahan untuk mempertajam analisis. Data

kondensasi tidak selalu harus dikuantifikasikan penyajiannya, namun bisa juga dilakukan transformasi melalui beragam cara seperti ringkasan, parafrase dan sebagainya. Dengan kondensasi data sebagai tahapan awal analisis, data hasil penelitian telah melalui proses penyederhanaan sebelum dilakukan tahapan berikutnya, yakni penyajian data.

- b. penyajian data (*Data display*) adalah tahapan analisis selanjutnya dari model interaktif, di mana dalam tahapan ini, data hasil penelitian sudah hasil dari penyederhanaan dari data kondensasi dan sudah lebih terorganisir dan terpola yang bisa dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Sebagaimana kondensasi data, penyajian data juga merupakan bagian dari proses analisis. Tampilan data yang baik akan sangat membantu dalam memperkuat proses analisa kualitatif sehingga proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara cermat melalui *display data* yang benar.
- c. penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), sebagai langkah terakhir dalam proses analisis model interaktif, ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak pengumpulan data awal dilakukan, proses analisis kualitatif dilakukan oleh peneliti dalam mencatat setiap pola, hubungan kausalitas, dsb yang membantu untuk memperjelas permasalahan penelitian. Peneliti berpegangan pada data hasil kondensasi dan penyajian data yang telah mengalami penyederhanaan dari sebelumnya untuk dapat ditarik kesimpulan akhir dengan didukung oleh bukti yang *reliable* dan juga konsisten. Ketiga jenis aktivitas tersebut merupakan sebuah aktivitas analisa data interaktif dan bersiklus, di mana peneliti bertindak fleksibel di keempat node tersebut untuk dapat memadatkan, menampilkan maupun menarik kesimpulan dari hasil analisa data.

Adapun, penggambaran model interaktif analisis data menurut Miles, Hubberman & Saldana (2014) dapat disajikan melalui bagan berikut:



**Gambar 3.2 Komponen Analisis Data: Model Interaktif**

Sumber: Miles, Huberman & Saldana, (2014, p.33)

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Keberadaan kondisi dari obyek penelitian yang terkait dengan topik penelitian digambarkan melalui gambaran umum obyek penelitian. Beberapa permasalahan, problem, isu atau sifat keadaan lembaga/organisasi dapat tercermin dari adanya gambaran umum obyek penelitian. Sebelum menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan penelitian, peneliti mencoba untuk menjelaskan obyek penelitian secara umum.

##### **4.1.1 Profil Gerakan Pemuda Ansor**

Sejarah lahirnya GP Ansor diawali dengan inisiasi dari organisasi NU untuk mendirikan organisasi gerakan kepemudaan yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan kemerdekaan. Organisasi ini didirikan pada 24 April 1934 di Banyuwangi saat pelaksanaan kongres NU yang ke-9 pada 21-26 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur. Dipelopori oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah, NU mendeklarasikan berdirinya Ansor Nahdlatul Ulama (ANO) yang merupakan embrio lahirnya organisasi kepemudaan GP Ansor saat ini.

Organisasi ini pada awalnya merupakan hasil peleburan dari dua organisasi pemuda yang berkembang di wilayah Surabaya, Jawa Timur yang sudah ada sebelumnya, yakni *Syubhunal Wathan* (Pemuda Tanah Air) dan *Da'watus Syubban* (Panggilan Pemuda) yang akhirnya melebur menjadi *Nadhatus Syubban* (Kebangkitan Pemuda). Kelompok *Nadhatus Syubban* inilah yang kemudian berkembang menjadi ANO yang meski sudah diakui sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) akan tetapi karena

hubungan saat itu masih bersifat personal antar tokoh, ANO belum dapat terlegalisasi dalam struktur NU. Pada 24 April 1934, ANO diformalkan sebagai departemen kepemudaan Nahdlatul Ulama. Nama Ansor diambil dari bahasa Arab *Anshar*, yang bermakna kaum yang menolong. Nama ini diusulkan oleh KH. Abdul Wahab yang diambil dari nama penduduk Madinah yang telah berperan dalam memperjuangkan agama. Untuk itu ANO dimaksudkan agar dapat mengambil hikmah dan teladan dari para sahabat Ansor yang berwatak penolong.

Di masa pendudukan Jepang, seluruh organisasi pemuda diberangus termasuk juga dengan ANO. Pada tahun 1949, Moh. Chusaini Tiway, salah satu tokoh ANO berupaya menghidupkan ANO kembali. KH. Wahid Hasyim, yang juga Menteri Agama RIS menyambut baik upaya Tiway hingga akhirnya terjadi kesepakatan pada 14 Desember 1949, untuk menghidupkan kembali ANO dengan nama baru yaitu Gerakan Pemuda Ansor.

Sebagai organisasi kepemudaan yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merupakan cerminan dari sekumpulan anak muda NU yang memiliki idealisme untuk berkiprah dalam memberikan kontribusi bagi kehidupan bermasyarakat di berbagai bidang termasuk dalam hal sosial-politik kemasyarakatan. Semangat perjuangan, pembebasan, nasionalisme, dan juga etos kepahlawanan telah mewarnai kelahiran GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki tujuan besar dalam konteks keagamaan dan juga nasionalisme.

GP Ansor merupakan organisasi yang identik dengan keberadaan organisasi kepara-militeran yakni Banser (Barisan Serba Guna). Organisasi ini merupakan lembaga semi otonom dari GP Ansor. Organisasi yang dibekali dengan kemampuan fisik khusus dan telah menjadi andalan dalam menciptakan perdamaian, keharmonian dan kerukunan antar umat beragama. Organisasi ini pada awalnya dikembangkan secara diam-diam oleh ANO Cabang Malang. Pada awal terbentuknya organisasi ini disebut

Barisan Ansor Nahdlatul Oelama (Banoe) yang merupakan sebuah organisasi gerakan kepanduan. Dalam Kongres ANO II pada tahun 1937 di Malang, untuk pertama kalinya Banoe menunjukkan aksinya dalam kemampuan baris berbaris dengan menggunakan seragam lengkap, dengan instruktur seorang anggota TNI, Mayor TNI Hamid Roesdi, pejuang kemerdekaan asal kota Malang. Saat Kongres II ANO, salah satu keputusan penting yang menjadi dasar dari eksistensi organisasi Banoe ialah agar setiap cabang ANO mendirikan organisasi Banoe.

Sebagai organisasi paramiliter dari GP Ansor, Banser mempunyai beberapa satuan khusus yang menjadi andalan dalam berbagai aktivitas organisasi yang memiliki fungsi dan tugas tersendiri. Adapun satuan-satuan tersebut yakni:

- a. Detasemen Khusus 99 Asmaul Husna (DENSUS 99); yakni satuan bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan informasi terkait dengan tindakan pencegahan terhadap upaya yang mengarah pada tindakan radikalisme atas nama agama agar keamanan dan kenyamanan setiap warga negara Indonesia dalam menjalankan agama bisa terwujud. Satuan ini hanya berkedudukan di Satkornas saja.
- b. Banser Siaga Bencana (BAGANA); merupakan satuan khusus yang bertugas dalam bidang penanggulangan bencana. Selain itu juga bertindak dalam pengamanan program sosial kemasyarakatan GP Ansor.
- c. Banser Relawan Kebakaran (BALAKAR); Satsus yang memiliki kualifikasi untuk membantu sesama dalam menanggulangi bahaya kebakaran, sehingga satuan ini dibekali ketahanan fisik dan mental yang tangguh
- d. Banser Lalu Lintas (BALANTAS); Satsus yang memiliki tugas dalam penanganan peristiwa pengaturan lalu lintas dan transportasi jalan.

- e. Banser Maritim (BARITIM); satuan yang bertugas dalam program sosial kemasyarakatan yang memiliki kecakapan di bidang kemaritiman, khususnya di wilayah-wilayah yang berkarakter kepulauan dalam teritorial yuridiksi NKRI yang bercorak maritim.
- f. Banser Husada (BASADA); merupakan satuan yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, dan juga kesehatan baik modern maupun tradisional.
- g. Banser Protokoler; yakni satuan yang bertanggungjawab dalam keprotokoleran dan juga manajemen acara yang bersifat kenegaraan, serta acara resmi lainnya yang dilaksanakan di lingkungan NU, GP Ansor maupun Banser.

Selain itu, GP Ansor juga memiliki dua Lembaga semi otonom yang berfokus pada penanganan permasalahan Narkoba dan juga gerakan kepanduan (Pramuka) yakni Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) dan Satuan Komunitas (Sako) Pramuka.

GP Ansor kini telah tumbuh berkembang menjadi sebuah organisasi kepemudaan yang besar. Menurut keterangan Pimpinan GP Ansor, saat ini GP Ansor setidaknya telah memiliki kader sejumlah lebih dari 7 juta orang, dan 34 Pengurus Wilayah di seluruh pelosok Indonesia hingga ke tingkat desa/kelurahan. Banyaknya jumlah anggota GP Ansor yang tersebar tersebut menunjukkan bahwa GP Ansor memiliki peran strategis dalam membangun aktivitas sosial masyarakat dengan agenda kepemudaan.

Adapun, susunan pengurus PP GP Ansor untuk masa khidmat 2015-2020 terdiri dari Pengurus Harian; Dewan Penasehat; dan Dewan Instruktur. Pengurus Harian terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum. Saat ini Ketua Umum GP Ansor dijabat oleh H. Yaqut Cholil Qoumas dan Abdul Rochman sebagai Sekretaris Jenderal. Untuk struktur organisasi Dewan Penasehat, terdiri dari unsur Ketua, Wakil

Ketua, Sekretaris dan Anggota. Untuk posisi Ketua Dewan Penasehat dijabat oleh Dr. KH. As'ad Said Ali, yang juga pernah menjadi mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada periode 2001 hingga 2010, sedangkan salah satu wakilnya ialah Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur D.I Yogyakarta. Sementara untuk posisi Dewan Instruktur, diketuai oleh H. Nusron Wahid, serta diisi oleh beberapa anggota.

#### **4.1.2 Profil Kementerian Pertahanan**

Pasal 2 Perpres RI No. 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah unsur pemerintahan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pertahanan negara, di mana dalam struktur organisasinya, Kemhan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Saat ini, Menteri Pertahanan dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, yang memiliki visi "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong" yang memiliki 7 (tujuh) misi utama dalam bidang pertahanan negara.

Terkait dengan pelaksanaan Bela Negara, Menteri Pertahanan dibantu oleh seperangkat jajaran yang berada dalam struktur Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Potan) yang bertugas untuk melaksanakan fungsi dari Kementerian Pertahanan di bidang potensi pertahanan. Adapun tugas dari Ditjen Potan adalah bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang potensi pertahanan. Salah satu struktur organisasi yang bernaung di bawah Ditjen Potan adalah Direktorat Bela Negara. Sebagai salah satu unit Eselon II dari Direktorat Jenderal Potan, Direktorat Bela Negara (Dit. Bela Negara) yang dipimpin oleh Direktur Bela Negara bertanggungjawab dalam merumuskan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara. Adapun beberapa fungsi

pelaksanaan tugas dari Dit. Bela Negara antara lain ialah: menyiapkan rumusan kebijakan penataan dan pembinaan bela negara, menyusun peraturan terkait dengan penataan dan pembinaan bela negara, melaksanakan kebijakan penataan dan pembinaan bela negara, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan bela negara.

Direktorat Bela Negara terdiri atas:

- 1) Sub direktorat Lingkungan Pendidikan
- 2) Sub direktorat Lingkungan Pekerjaan
- 3) Sub direktorat Lingkungan Permukiman
- 4) Sub bagian TU, dan
- 5) Kelompok Jabfung.

Terkait dengan pelaksanaan bela negara di lingkungan organisasi kemasyarakatan, unit Eselon III yang bertanggungjawab untuk menangani hal tersebut ialah Subdirektorat Lingkungan Permukiman. Adapun, gambaran terkait dengan kebijakan pelaksanaan Bela Negara pada Kementerian Pertahanan, dapat dijelaskan melalui bagan dibawah ini:



**Gambar 4.1 Struktur Hirarki Kebijakan Bela Negara di lingkungan Ormas**

Sumber: Diolah peneliti

### 4.1.3 Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Salah satu langkah dalam penguatan dan pengokohan pertahanan negara dalam rangka menghadapi berbagai ancaman yang menghadang adalah dengan membangun kemampuan daya tangkal (*deterrence*) yang salah satunya diupayakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Upaya PKBN secara umum bertujuan untuk membentuk dan menguatkan karakter dan juga sikap mental warga negara agar memiliki jiwa bela negara yang dapat mendukung terhadap penguatan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.

Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu entitas komunitas yang juga menjadi obyek dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah (c.q Kemhan RI) serta *stake holder* lainnya seperti misalnya Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan bahwa kesadaran bela negara masyarakat telah terbangun, salah satunya di lingkungan pemukiman. Hal ini merupakan fondasi dasar dari wujud Perang Semesta, di mana membangun rasa kesadaran bela negara masyarakat diupayakan dilakukan disemua lini kehidupan, agar terbangun pemahaman kesadaran bela negara yang komprehensif guna menciptakan daya tangkal yang kuat di tengah masyarakat terhadap berbagai ancaman yang menghadang.

Pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas merupakan upaya untuk membangun rasa kesadaran bela negara dengan menanamkan rasa cinta tanah air, nilai-nilai kebangsaan, kesetiaan pada ideologi Pancasila, dan kemampuan rela berkorban untuk bangsa dan bernegara melalui berbagai macam bentuk kegiatan yang menjadi bagian dari aktivitas organisasi.

#### **4.1.4 Strategi dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela Negara**

Sebuah organisasi kemasyarakatan berfungsi untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Dalam aspek pertahanan negara, Ormas juga berkontribusi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta mendukung keutuhan NKRI. Di sisi lain, Ormas juga dapat berperan dalam memberikan manfaat dan mengedukasi masyarakat, memelihara ketertiban umum serta menciptakan suasana kedamaian di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari komponen rakyat Indonesia, Ormas dapat memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara sebagai bentuk kontribusi nyata Ormas dalam usaha pertahanan negara. Berbagai aktivitas organisasi yang dijalani dalam rangka bentuk pelaksanaan program kerja, dapat merupakan salah satu bentuk dari implementasi nilai-nilai bela negara yang dapat merefleksikan indikator keluaran (*output*) dari nilai-nilai bela negara.

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, Ormas memiliki strategi agar implementasi dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan penggunaan strategi dalam implementasi nilai bela negara yang efektif diharapkan mampu menjadikan Ormas dapat memperkuat pertahanan dalam kapasitas sebagai komponen pendukung pertahanan negara.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Pembinaan Kesadaran Bela Negara di lingkungan GP Ansor**

Pada bagian ini diuraikan tentang beberapa hal terkait pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan GP Ansor terkait dengan bentuk kegiatan, materi, pemateri dan sarana yang digunakan.

Terkait dengan bentuk pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara, dijelaskan oleh informan Bpk. Abdul Rochman dengan penjelasan sebagai berikut:

Tentu yang paling utama adalah melalui kaderisasi, kemudian melalui bimbingan terus-menerus dimana forumnya bisa bermacam macam, mulai dari pengkaderan, majlis pengajian, apel kebangsaan, ceramah, dan lainnya. Bagaimana cara Ansor mengajak anggotanya untuk atau menanamkan nilai-nilai cinta tanah air ini dengan memahamkan kepada anggota kita bahwa organisasi ini itu sesungguhnya dua misi utama, pertama menjaga agama dan menjaga tanah air, itu misi utamanya, jadi menjaga agama itu termasuk mengajarkan agama yang bisa menjadi rahmat kasih sayang semesta alam, karena untuk keberlangsungan misi yang pertama, kita perlukan satu negara atau manajemen kemasyarakatan yang tertib, karena tidak mungkin kita mengajarkan agama dalam kondisi perang atau konflik, itu tidak leluasa, itu yang kita tanamkan, apalagi dari aspek yang ada bahasanya keamanan itu sebelum iman, jadi menciptakan keamanan itu harus dilakukan sebelum mendakwahkan atau melaksanakan keimanan, jadi kita tidak bisa beragama dengan baik kalau kita itu dalam lingkungan yang tidak aman, oleh karena itu keamanan sangat penting, kesadaran itu yang kita sampaikan, bagaimana cara menyampaikannya? Di dalam kaderisasi dijelaskan soal yang tadi itu, kemudian detail-detail dari misi itu, misalnya bagaimana islam yang kita pahami, islam yang ramah bukan islam yang keras yang memandang orang lain sebagai musuh yang harus diperangi, kalau itu yang terjadi berarti kita akan menciptakan negara yang konflik, jadi pandangan keagamaan itu yang kita sampaikan di pengkaderan dan juga forum-forum yang lain (wawancara tanggal 31 Agustus 2020).

Pendapat yang lain disampaikan Waka Satkornas, Bpk. Hasan Basri yang menyatakan bahwa:

Pada dasarnya dalam kaderisasi Banser punya tiga jenjang kebanseran, yakni Diklatsar, Susbalan dan Susbanpim. Setiap pengkaderan, masing-masing punya tingkatan sesuai dengan

jenjang kebanseran, kalau Diklatsar itu dasarnya, kita beri materi dasar, disitu juga mengacu kepada agama, bela negara, Pancasila, UUD 1945, kapasitas gerakan, dsb disitu juga diberikan pembekalan fisik dan mental. Mereka juga dilatih agar kuat mental untuk mengawal ulama dan NKRI. Materi Susbalan lebih cenderung kepada pementapan kepemimpinan, ini akan mendapat beberapa hal atau persyaratan untuk lanjut ke jenjang pimpinan, paling tidak harus 3-4 tahun Susbalan baru bisa mencoba ke Susbanpim, dan ada kriteria untuk seleksi, terkait intelektualnya, fisiknya, dan kemampuannya dalam berorganisasi akan kita pertimbangkan karena Susbanpim adalah jenjang terakhir, dia akan menjadi pimpinan/komandan wilayah/nasional di organisasi-organisasi Ansor (wawancara tanggal 1 September 2020).

Dari hasil wawancara dengan Waka Satkornas, Bpk. Hasan Basri tersebut, dapat dikatakan pembinaan kesadaran bela negara dilakukan salah satunya melalui mekanisme jenjang kaderisasi dengan bentuk pemberian materi-materi dasar yang juga berkaitan dengan ke-Indonesiaan, ke-Pancasilaan, dan wawasan kebangsaan disamping materi yang terkait dengan keagamaan dan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid. Kaderisasi, Bpk. Ruchman Basori, menyatakan sebagai berikut:

Kita mengoptimalkan, masuk dalam pelatihan, pendidikan dan pelatihan jadi kita punya sistem kaderisasi yang baku yang didalamnya hampir, mungkin hampir 80% itu soal kebangsaan dan ke-Indonesiaan. Jadi di level dasar ada namanya Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD). Kemudian naik level PKL (Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan), kemudian Pelatihan Kepemimpinan Pelatihan Nasional (PKN), dan itu yang formal. Nah kemudian di Banser ada Diklatsar (Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Dasar), kemudian Susbalan (Kursus Banser Lanjutan), kemudian yang tinggi adalah namanya Susbanpim (Kursus Banser Pimpinan). Semua materi pasti menyinggung soal bagaimana komitmen kenegaraan kebangsaan kader profil Ansor, tidak bisa dilepaskan. itu juga mengkaji bagaimana

komitmen kebangsaan kita. Kemudian bicara keislaman ya sama apa lagi bicara peta gerakan, bicara kurikulumnya pokoknya didesain agar: satu, mencetak kader Ansor yang tadi komitmen kepada agama dan komitmen kepada bangsa. Pokoknya antara agama dan kita selalu bersama, itu melalui pengkaderan.

Jadi, sistem kaderisasi, kemudian apa tadi, gerakan sosial, mengempati sosial, yang ketiga soal melalui forum-forum pertemuan-pertemuan di Ansor tadi ada Majelis Dzikir dan Sholawat *Rijalul Ansor*, yang kemudian juga ada kajian-kajian kitab atau *Batsul Masail* kita itu juga telah mengkaji itu (wawancara tanggal 7 September 2020).

Berdasarkan penjelasan informasi dari beberapa informan tersebut, dapat dikatakan, bahwa kegiatan pembinaan kesadaran bela negara secara formal diberikan dalam materi, pelatihan dan keterampilan dalam fase-fase kaderisasi seperti Pelatihan Kader Dasar, Pelatihan Kader Lanjutan, dan Pelatihan Kader Nasional untuk di lingkungan GP Ansor. Sedangkan di lingkungan organisasi Banser, fase kaderisasi yang ada ialah Diklatsar (Pendidikan Latihan Dasar), Susbalan (Kursus Banser Lanjutan) dan Susbanpim (Kursus Banser Pimpinan). Sedangkan selain dalam fase kaderisasi, pembinaan kesadaran bela negara ditanamkan melalui forum-forum pertemuan (*halaqoh*), majelis pengajian, maupun apel kebangsaan, serta dengan membudayakan menyanyikan lagu syair cinta tanah air.

Terkait dengan pemateri, berdasarkan wawancara dengan Sekjen GP Ansor Bpk. Abdul Rochman menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program pelatihan kaderisasi seperti PKD, PKL, Diklatsar, dsb pemateri pada umumnya disampaikan oleh kader internal yang berkompeten sebagai instruktur. Namun, pihak lain juga diundang untuk memberikan wawasan, misalnya dari TNI/Polri atau akademisi, namun dengan jumlah sesi materi yang terbatas. Sedangkan untuk latihan fisik biasanya Banser rutin mengundang aparat TNI dari Kodim ataupun Koramil untuk menjadi instruktur. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh informan sebagai berikut:

Pada dasarnya itu dari internal, karena instruktur yang memberikan materi sebelumnya harus melewati proses-proses tertentu, karena setiap orang beda-beda bakatnya. Istilahnya kader yang strata Sarjana hanya bisa diajar oleh minimal strata Magister. Selain itu kadang kita juga mengundang narasumber lain diluar organisasi itu memberikan wawasan atau perkembangan baru dalam perspektif mereka dan itu banyak seperti TNI, Polri, atau akademisi. Kalau untuk latihan fisik rutin itu dengan Polri atau TNI, mengatur kedisiplinan dan baris-berbaris, jadi yang tadi itu mandiri, karena kita tidak punya anggaran tetap seperti itu, dan itu menjadi kewajiban pimpinan organisasi, jadi di dalam organisasi kita ada kewajiban yang wajib dilaksanakan, dan itu bagian dari penilaian organisasi atau akreditasi organisasi, itu di tiap cabang ataupun anak cabang (wawancara tanggal 31 Agustus 2020).

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Waka Satkornas Bpk. Hasan Basri yang menyatakan sebagai berikut

Ya memang itu didasar itu karena didasar berarti sifatnya dasar, untuk kedisiplinan itu memang dari TNI, kalau untuk Kamtibnas dari Polri, TNI dan Polri ikut menjadi partner kita, di tempat yang masih minim kita minta juga, sampai kapanpun ya kita sebagai organisasi berbadan hukum bekerjasama seperti itu sudah seharusnya dilakukan. Ada beberapa hal yang terkait perizinan, atau hal-hal materi yang harus disampaikan, kita selalu memberikan hak yang sesuai dengan aturan main baik dengan pihak Kepolisian ataupun TNI, jadi kami selalu bersinergi dengan TNI maupun Polri (wawancara tanggal 1 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Satkornas Bpk. Hasan Basri tersebut, menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan GP Ansor sebagai salah satu pemateri tentang kedisiplinan dan bela negara Diklatsar Banser, berasal baik dari Kodim ataupun Koramil setempat. Sedangkan untuk materi tentang kamtibmas, diisi oleh pihak Kepolisian RI (Polres atau Polsek setempat).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Kabid. Kaderisasi, Bpk. Ruchman Basori terkait dengan keterlibatan pihak lain dalam upaya pembinaan kesadaran bela negara menjelaskan sebagai berikut:

Untuk pelaksanaan diklat sendiri ada keterlibatan, misalkan dari ya tokoh-tokoh negara atau tokoh-tokoh pemerintah dihadirkan. Kemudian juga ada..untuk Banser, biasanya dengan, dari aparat TNI. TNI-Polri selalu kita hadirkan, untuk memberikan wawasan kebangsaan termasuk juga beragam latihan-latihan. Pelatihan mulai baris-berbaris, pertahanannya di kita kan ada, di Banser kan ada. Itu melibatkan TNI Polri (wawancara tanggal 7 September 2020).

Pendapat informan tersebut juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI/Polri sebagai pemateri maupun instruktur dalam kegiatan pembinaan kesadaran bela negara secara formal dalam jenjang kaderisasi intens dilakukan.

Sedangkan kerjasama yang terbangun dengan Kemhan RI terkait pembinaan kesadaran bela negara, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit Lingkungan Permukiman Direktorat Bela Negara Kemhan RI, Kol. Luhkito menyatakan bahwa GP Ansor merupakan salah satu Ormas yang berkomitmen melakukan pembinaan kesadaran bela negara. GP Ansor juga pernah dilibatkan dalam acara visi kemaritiman *Sail Karimata* pada 2016 yang diadakan oleh Kemhan bersama dengan beberapa ormas lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Kemhan RI dalam melakukan pembinaan kesadaran bela negara terhadap ormas. Namun, dikarenakan faktor keterbatasan anggaran, tidak bisa semua ormas diikuti. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh informan dalam pernyataannya sebagai berikut:

Saya ingat tahun 2016 dengan kesadaran bela negara visi maritim, dimana Direktorat Bela Negara terlibat aktif dalam kegiatan *Sail Selat Karimata*. Pada saat itu kita membawa 25 perwakilan Ormas masing-masing 5 orang, kebetulan saya sendiri sebagai ketuanya. Di situ ada GP Ansor ada FPI, ada dari FKPP, Budaya Nusantara, macam-macam Ormas kita pilih. Pada saat itu kalau tidak salah ada 60 atau 75 an ormas yang sudah PKS dengan kita. Tapi karena kuota nya terbatas hanya 130 orang, sehingga kita pilih hanya 25 ormas salah satunya dari GP Ansor. Ternyata selama sebulan mereka rukun, ga ada yang bertengkar, saya salut. Kalau ada semacam kegiatan ke

sekolah-sekolah atau ceramah agama mereka bekerja sama, tidak ada perbedaan, kita satu ternyata (wawancara tanggal 28 Agustus 2020).

Namun, menurut pandangan dari GP Ansor sendiri, keterlibatan Kemhan RI dalam turut serta mendukung kegiatan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan GP Ansor dirasakan masih kurang, karena memang tindak lanjut dari MoU yang mengatur tentang hal tersebut belum berjalan secara efektif.

Hal senada disampaikan oleh Akademisi dari Unhan, Dr. Sutrimo S dalam wawancara dengan peneliti yang menyatakan sebagai berikut:

Seingat Saya dukungan Kemhan RI terhadap Ormas GP Ansor masih belum optimal. Selama ini kalau ada kegiatan sosialisasi (PKBN) untuk ormas, wakil dari mereka diundang. Saya kira agar lebih efektif, kalau kegiatan PKBN itu bisa masuk ke dalam Ormas tersebut, misalnya mengadakan kegiatan PKBN khusus untuk lingkungan Ormas Ansor sehingga bisa lebih banyak diberi kesempatan untuk para anggotanya (wawancara tanggal 10 September 2020.)

Berdasarkan penjelasan dari beberapa narasumber tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa GP Ansor dalam melakukan pembinaan kesadaran bela negara selain memberdayakan kader internal sebagai pengisi materi, juga melibatkan pihak lain sebagai pemateri seperti tokoh nasional, tokoh masyarakat, akademisi dengan aparat TNI/Polri dalam memberikan wawasan seperti mengenai nasionalisme, kebangsaan, Pancasila dan juga bela negara. Dalam hal dukungan dari Kemhan RI, meskipun sudah pernah ada perjanjian kerjasama antara Kemhan RI dengan GP Ansor terkait Pembinaan Kesadaran Bela Negara, namun efektifitas dari kerjasama kedua belah pihak ini masih perlu ditingkatkan.

Terkait dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pembinaan kesadaran bela negara, berdasarkan wawancara dengan menurut Sekjen GP Ansor Bpk. Abdul Rochman yang menyatakan

bahwa salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara yang masuk dalam program kaderisasi ialah struktur organisasi dari atas hingga ke bawah yang solid dalam melakukan program kaderisasi. Hal ini karena pada dasarnya terdapat mekanisme pengontrolan yang ketat dalam bentuk standar akreditasi organisasi di tiap kepengurusan di daerah. Terkait hal tersebut, berikut penjelasan rinci yang dijelaskan oleh informan:

Karena Ormas seperti GP Ansor ini tidak memiliki sumber daya (anggaran) yang tetap/permanen seperti APBN, maka kegiatan kaderisasi dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, ini menjadi kewajiban pada pimpinan struktur organisasi untuk melaksanakannya. Jadi di GP Ansor ada kewajiban atau program-program yang wajib dilaksanakan oleh struktur organisasi di cabang dan ini merupakan bagian dari akreditasi (penilaian) organisasi di tiap cabang, anak cabang seperti di Perguruan Tinggi. Misalnya, apabila mereka tidak melakukan aktivitas tertentu (perekrutan, kaderisasi, pengajian, peringatan Hari Besar Islam, dsb), sebelum itu mereka ditegur, maka akan ada sanksi terkait hal tersebut seperti misalnya dicabut kepengurusannya karena dianggap tidak bisa melaksanakan kewajiban organisasi dan tidak amanah (wawancara tanggal 31 Agustus 2020).

Adanya dukungan dari unsur NU turut memberikan *support*/bantuan pelaksanaan kaderisasi dalam hal penyediaan logistik, akomodasi, dsb. Dengan demikian, kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dalam program kaderisasi dapat terlaksana dengan lancar.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Waka Satkornas Bpk. Hasan Basri, dalam wawancara yang dilakukan yang menyatakan sebagai berikut:

Kendala dalam kegiatan kaderisasi ya selalu ada, negara saja memiliki kendala, apalagi pelaksanaan program Ormas, pasti ada kendala. Namun, penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dalam program kaderisasi dapat di siasati. Misalnya dalam keterbatasan masalah tempat pelaksanaan, hal tersebut disiasati dengan salah satunya

menggunakan *resources* dari NU seperti pesantren, sekolah ataupun yayasan milik pengurus ataupun para kyai NU. Begitu juga dengan logistik, dapat disuplai oleh peran muslimat NU yang ikut membantu mendukung menyiapkan makanan selama pelaksanaan acara. GP Ansor ini kan anaknya NU, jadi ya kita memanfaatkan peran dan dukungan orang tua kita. Dalam hal anggaran, donasi/sumbangan dari peserta, masyarakat maupun pihak yang mendukung, juga dapat menjadi bantuan dalam pelaksanaan kegiatan. Karena GP Ansor dan NU merupakan organisasi yang hidup dan tumbuh bersama rakyat (wawancara tanggal 1 September 2020).

Pendapat informan tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya terdapat kendala yang bersifat teknis dalam pelaksanaan upaya pembinaan kesadaran bela negara dalam jenjang kaderisasi misalnya dalam tempat pelaksanaan, anggaran kegiatan, dsb. Namun hal tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan sumber daya di luar GP Ansor seperti dukungan dari NU, iuran swadaya kader, iuran peserta dan sebagainya.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Kabid. Kaderisasi, Bpk. Ruchman Basori terkait dengan faktor yang mendukung menyatakan:

Ya tentu, kita ini apa ya mas, selama 10 tahun ini sudah membenahi aspek kaderisasi luar biasa, yang dulu mungkin belum begitu mapan dan sekarang yang, sekarang ini sudah dilakukan betul. Hasilnya begini, tidak mungkin orang yang tidak melalui proses kaderisasi di dalam Ansor menjadi pimpinan. Karena kaderisasi akan menyeleksi, akan menjadikan orang itu terukur untuk jadi pemimpin. Untuk yang kedua, orang yang sudah melakukan tahap-tahap kaderisasi pasti akan mempunyai derajat pemahaman dan komitmen yang berbeda, dalam komitmen keagamaan, komitmen kebangsaan, komitmen sosialnya saya kira berbeda. Maka kami bisa menjamin, yang sudah pada ikut pengkaderan kita ya tentu akan mempunyai derajat kebangsaannya lebih tinggi, pemahaman keagamaan lebih bagus daripada yang lainnya. Nah itu pintu masuk kita, lah selainnya nanti diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Teruji di situ, keterpanggilan mereka kepada *problem-problem* kemasyarakatan,

keterpanggilan mereka pada masalah-masalah kebangsaan itu muncul (wawancara tanggal 7 September 2020).

Pendapat informan tersebut menjelaskan bahwa sistem kaderisasi GP Ansor yang sudah cukup mapan dalam hal perekrutan maupun pembinaan kader menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan upaya pembinaan kesadaran bela negara.

Berdasarkan penelitian di atas dapat dikatakan bahwa terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara seperti kendala sarana dan prasarana seperti tempat, logistik, anggaran, dan sebagainya. Namun demikian, kendala tersebut salah satunya diatasi dengan memberdayakan *resources* yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan tersebut seperti misalnya dari NU. Selain itu, sistem kaderisasi yang sudah cukup mapan juga menjadi faktor pendukung dalam melakukan upaya pembinaan kesadaran bela negara.

#### **4.2.2 Strategi Ormas GP Ansor dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela Negara**

##### **4.2.2.1 Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara di lingkungan GP Ansor**

Implementasi nilai-nilai bela negara, selalu berkorelasi dengan pemahaman dan pemaknaan terhadap konsep bela negara. Kaitan dengan hal tersebut, peneliti berusaha untuk meneliti lebih dalam terkait dengan pemaknaan terhadap bela negara yang dipahami oleh GP Ansor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekjen GP Ansor, Bpk. Abdul Rochman, menyatakan pandangan tentang bela negara, bahwa:

Pertama saya kira, karena Ansor ini organisasi pemuda dibawah NU, kemudian NU sendiri adalah organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, maka pendekatan terhadap semua tema dan isu selalu dekatnya dengan cara pandang agama, termasuk bela negara, bela negara itu dalam pandangan keagamaan itu bagian dari agama,

membela negara, membela tanah air termasuk mencintai tanah air dimana juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah dan ketika beliau merindukan Mekkah atau ketika dia keluar dari kota dan ingat dengan Madinah, itu menggambarkan kalau dia itu secara manusiawi terikat dengan mencintai tanah airnya, dan dalam statement dari KH. Hasyim Asy'ari pendiri NU bahwa "Cinta akan tanah air itu bagian daripada iman", kenapa? karena dalam prakteknya, semua nabi mencintai tanah airnya dan itu sifat yang manusiawi dari setiap orang. Karena percaya kepada nabi itu bagian dari iman, maka hadits sunnah nabi itu kalau kita percaya dengan sunnah nabi, mengimaninya itu termasuk dengan mempercayai sunnahnya, saya kira begitu. Bagi GP Anzor, salah satu ekspresi mencintai tanah air itu dengan membela negara, baik di situasi damai maupun krisis, bentuknya bisa bermacam-macam (wawancara tanggal 31 Agustus 2020).

Penjelasan informan memberikan gambaran bahwa pemahaman bela negara yang diyakini oleh NU maupun anggota GP Anzor merupakan pemahaman akan membela dan mencintai tanah air yang dilandasi oleh dimensi spiritual dan semangat beragama. Lebih lanjut, Bpk. Abdul Rochman menambahkan bahwa bela negara merupakan kewajiban dari setiap orang yang tinggal di suatu wilayah dan merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap orang. Termasuk tanggungjawab untuk membuat negara aman, tenang, damai. Ormas sebagai organisasi tempat orang berkumpul berperan membina, mendidik para anggotanya untuk membangun rasa memiliki dan mencintai tanah airnya.

Pendapat yang hampir senada dijelaskan lebih lanjut dalam oleh Bpk. Hasan Basri yang menjelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

Kalau ditanya bagaimana bela negara berdasarkan yang diperjuangkan pemuda Anzor jadi begini filosofinya, ini ibaratnya rumah, didalam rumah ada kamar-kamarnya, untuk ibu-ibu itu namanya Muslimah NU, untuk bapak-bapak itulah NU, untuk anak laki-laki paling besar namanya Anzor, untuk anak perempuan paling besar, untuk laki-laki remaja, dan seterusnya ada lagi namanya, posisi Banser dimana? posisinya ibarat kamar anak laki-laki tadi Anzor, didalamnya ada kamar lagi khusus namanya Banser, jika ditanya makna

bela negara bagi kami maka kami mengikuti ada yang sudah digariskan oleh PBNU, itu kami tidak bisa terlepas dari bagaimana NU dan Ansor memaknai bela negara itu sendiri, kami bisa pastikan Ansor menganggap bela negara itu sebagai sesuatu yang memang sudah ditetapkan dan menjadi garis perjuangan organisasi, kenapa itu menjadi *rules*? karena memang inilah kenapa Ansor ini dibuat, karena memang tujuannya itu, mungkin kalau dikembalikan sejarah kenapa NU didirikan? salah satunya untuk tetap melestarikan ulama, dan kedua bagaimana Indonesia ini bagaimana bisa merdeka dan menjadi negara yang terpisah dari penjajahan, tugas agama sekaligus tugas negara, program itu semuanya, muara dari semua ini sudah menjadi *rules*, bukan cuma Ansor dari seluruh lembaga-lembaganya. Terkait dengan kitab-kitab itu tercatat secara rapih. Disitu materinya juga cenderung tentang agama dan bela negara sesuai ajaran pendiri NU (wawancara 1 September 2020).

Penjelasan informan juga menegaskan bahwa bela negara yang dimaknai oleh NU dan juga GP Ansor merupakan sebuah tugas agama dan juga tugas negara sebagaimana latar belakang pendirian organisasi NU adalah dalam rangka melestarikan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* serta mewujudkan negara Indonesia yang merdeka.

Wawancara dengan Kabid. Kaderisasi, Bpk. Ruchman Basori terkait pandangannya tentang bela negara menyatakan bahwa

Saya kira ya membela negara sama saja dengan membela agama. Ada istilah *Hubbul Wathon Minal Iman* jadi mempertahankan negara, mempertahankan bangsa ini adalah bagian dari iman. Karenanya bagi kami mempertahankan sejenkal tanah Indonesia itu mati makanya dihukumi *syahid*. Jadi pertama, paradigma atau berpikir tentang, apa tadi, nasionalisme kita bela negara kita pertama bagi Anshor mempertahankan NKRI atau mempertahankan negara atau bangsa sama saja dengan menjalankan ajaran agama karena, misalkan, kita pakai banyaklah ayat-ayat hadits-hadits yang memberikan itu. Nah yang kedua, bagi Anshor, karena itu kewajiban maka dalam setiap rumusan-rumusan organisasi pasti akan mencantumkan bagian dari itu di dalam PD PRT nya dan sebagainya bagian dari komitmen itu silahkan dibuktikan.

Nah itu, itu rumusnya. Makanya program-programnya atau gerakan-gerakannya sampean bisa lihat. Beragama itu tidak akan terwujud kalau negara kita itu tidak aman. Maka kewajiban menjalankan agama juga kewajiban menjalankan mempertahankan negara. Jadi saya kira itu teori-teori negara kan itu ada kekuasaan betul-betul dianut oleh Nadhlatul Ulama termasuk GP Ansor (wawancara tanggal 7 September 2020).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit Lingkungan Permukiman Dit. Bela Negara Kemhan, Bpk. Kol. Luhkito menyatakan bahwa bela negara secara sederhana didefinisikan melalui pernyataan sebagai berikut:

Bahwa bela negara tidak selalu harus terkait dengan sesuatu yang militerisme atau dunia perang dalam artian perang militer, namun bela negara menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua pihak dapat terlibat dalam aksi bela negara sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Kemhan sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara di seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah (wawancara tanggal 28 Agustus 2020).

Dari hasil uraian penelitian yang telah dijelaskan tersebut, dapat dikatakan bahwa bela negara yang dimaknai oleh GP Anzor adalah bagian dari substansi keimanan dan keyakinan agama, sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air yang dilandasi oleh semangat beragama untuk tujuan melestarikan ajaran agama (*ahlus sunnah wal jamaah*) serta menjaga tetap tegaknya keutuhan negara. Selain itu, bela negara juga dimaknai sebagai ruh, jiwa dan garis perjuangan organisasi.

Terkait dengan implementasi nilai-nilai bela negara di lingkungan Ormas GP Anzor, dilakukan melalui berbagai macam aktivitas organisasi Ormas GP Anzor yang bergerak di berbagai bidang. Berdasarkan

wawancara dengan Sekjen Bpk. Abdul Rochman terkait dengan implementasi nilai bela negara menjelaskan sebagai berikut:

Pertama soal pemahaman yang tadi, itu menciptakan kecintaan tanah air, ekspresinya seperti apa? itu seperti kerelaan, rasa tanggungjawab bukan hanya sekedar kewajiban, jadi negara bisa saja mewajibkan tetapi itu sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai organisasi yang pernah terlibat berperang untuk proklamasi sebelum TNI/Polri terbentuk, kita telah ikut bela bangsa, itu diwujudkan dalam bentuk menciptakan kondisi berbangsa yang baik, ekspresinya adalah semua hal yang membuat negara ini baik dan masyarakat percaya dengan kita berbangsa ini mereka mendapatkan manfaat dan dihargai, ada kebaikan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, itu harus diwujudkan, makanya didalam Ansor yang setelah wawasan tadi, setelah pengkaderan tadi yang kita lakukan adalah melakukan program yang baik untuk bersama, contohnya kalau masyarakat disana terkena bencana, kita berangkat paling dulu dan pulang paling akhir dengan sumberdaya seadanya, tanpa komando, inisiatif sendiri. Apabila mudik, atau event-event tertentu yang sekiranya polisi membutuhkan bantuan untuk mengatur lalu lintas, maka kita membantu polisi melalui Balantas. Membantu tetangga yang tertimpa musibah kebakaran, maka kita bantu melalui Balakar. Membantu bedah rumah tetangga kita yang rumahnya rusak. Kemudian, menggalakkan program berbagi wifi gratis kepada siswa untuk belajar daring. Itu hal-hal yang sudah kita lakukan sebagai bentuk bela negara kecintaan kepada negara beserta orang yang ada di dalamnya (wawancara tanggal 31 Agustus 2020).

Dari hasil penjelasan informan di atas, menyatakan bahwa GP Ansor telah banyak melakukan implementasi nilai-nilai bela negara yang didasari atas kesadaran akan rasa tanggungjawab karena telah menjadi bagian integral dari pendiri negara ini, salah satunya ialah berusaha responsif terhadap permasalahan sosial seperti bencana alam, dengan menerjunkan tim tanggap bencana, bantuan kepada masyarakat, penanganan Covid-19, dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Hasan Basri terkait dengan implementasi nilai bela negara yang dipahami oleh Banser antara lain mengungkapkan:

Tugas utama kami ini adalah untuk menjaga agama dan bangsa, tidak hanya negara saja tapi juga agamanya. Implementasinya dibawah adalah melaksanakan program-program kaderisasi dan semua yang dibutuhkan untuk menjaga agama dan bangsa aman itu, dibuat. Termasuk juga di Banser ini, banyak satuannya. Seperti satuan khusus Balakar, satuan Banser yang khusus menangani kebakaran. Karena salah satu ancaman yang ada di Jakarta ini yakni kebakaran. Bagaimana kita latih masyarakat di kampungnya dasar-dasar untuk dapat menangani atau pencegahan kebakaran. Di Kalimantan Barat, ketua satuan Balakar-nya ialah orang pemadam kebakaran juga, di Riau juga. Banyak lagi satuan-satuan khusus lain di Banser ini, muaranya adalah bagaimana memberikan sumbangsih kepada agama dan bangsa dan juga manfaat kepada masyarakat. Seperti di Riau kemarin, anak-anak Banser turun memadamkan kebakaran membantu pemerintah dengan kapasitas yang kita miliki (wawancara tanggal 1 September 2020).

Lebih lanjut, informan Bpk. Hasan Basri menambahkan tentang implementasi nilai bela negara dalam aksi melawan radikalisme mengatakan bahwa:

Terkait dengan radikalisme, memang tujuan kita dalam kaderisasi itu, mohon maaf ya saya liat dalam menghadapi radikalisme itu tidak seluruhnya bisa sepaham, mohon maaf saja kami punya cara sendiri juga dalam menyikapi ini, kalau dalam kaca mata kami kan memang ada sesuatu yang rusak, atau tidak tersistem dalam rangka bagaimana radikalisme ini bisa kita singkirkan, namun walau begitu kami di organisasi ini ada materi kemerdekaan, ini sebenarnya salah satu tujuannya bagaimana radikalisme ini tersingkirkan, radikalisme dalam bangsa ini juga sesuatu yang harus diperhatikan, justru karena itu ancaman, bukan cuma ancaman bangsa negara, tetapi juga agama. Mereka mengklaim apa yang dikerjakan itu merupakan perintah Tuhan untuk membunuh manusia, padahal ayat atau hadits seperti ini tidak ada. Kami memberikan penjelasan bahwa ayat-ayat yang mereka

klaim itu untuk jihad itu salah. Jihad tidak dimaknai tentang membunuh orang, tetapi jihad dalam arti upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan kemerdekaan pada manusia, maknanya atau substansinya bukan bunuh diri begitu. Jihad untuk agama sesuai ketentuan agama dan juga jihad untuk bangsa. Semua ini dalam rangka menjaga agama dan bangsa tetap kuat dan lestari (wawancara tanggal 1 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan KaBid. Kaderisasi Bpk. Ruchman Basori terkait dengan implementasi nilai bela negara menjelaskan:

Kalau rumusan (implementasi) seperti Kemhan ya tidak ada, tapi misalkan Anda bisa lihat lagu-lagunya, marsnya, itu kan bagian dari implementasi nilai-nilai, misalnya lagu *Ya Lal Wathon* ini kan tidak ada malah di negeri ini yang sampai sejelas itu, tapi kita pakai lagu itu. Kemudian, mars banser misalkan mars GP Ansor itu bisa dibaca, jadi dari sisi mars saja sampean bisa mengatakan “ini lo implementasi pendiri kita soal itu”. Belum soal bagaimana implementasi gerakan nyata dalam masyarakat, seperti bersih-bersih lingkungan, terus pemberantasan narkoba dan sebagainya. Kemudian, ketika ada umat non-minoritas diserang Ansor hadir, ketika ada perayaan hari-hari besar agama lain kita ikut mengamankan, ketika terjadi korban, korban tertentu atas dasar ras itu kita hadir untuk mendampingi, berapa banyak ibu-ibu yang mengeluh di Ansor untuk mendapatkan perlakuan yang adil yang itu juga bagian dari tugas kita. Implementasi gerakan nyata ya itu (wawancara tanggal 7 September 2020)

Penjelasan informan terkait dengan uraian hasil penelitian tersebut, hal yang menjadi perhatian ialah bahwa terdapat implementasi nilai-nilai bela negara yang telah dilakukan oleh GP Ansor diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai bentuk pelayanan sosial terhadap rakyat seperti membantu korban bencana alam, membantu pemadaman kebakaran, pencegahan penggunaan narkoba, melindungi kaum minoritas, hingga melawan aksi radikalisme.

#### **4.2.2.2 Strategi Ormas GP Ansor dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela Negara**

Terkait dengan strategi yang digunakan Ormas GP Ansor dalam implementasi nilai bela negara, peneliti mencoba untuk memberikan interpretasi terhadap hasil *interview* terhadap beberapa informan yang telah dilakukan untuk dapat menyimpulkan strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.

##### **4.2.2.2.1 Aspek Tujuan (*ends*) Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekjen GP Ansor, Bpk. Abdul Rochman terkait dengan tujuan dari bela negara yang dilakukan menyatakan bahwa

Bela negara itu dalam pandangan keagamaan itu merupakan bagian dari (ajaran) agama. Membela negara, membela tanah air termasuk mencintai tanah air. Tujuan dari bela negara tidak bisa dipisahkan dari tujuan membela agama membuat negara menjadi aman, damai, tertib dan bisa memberikan kemashlahatan untuk warganya

Semangat bela negara yang dimiliki oleh kader Ansor tidak semata-mata nasionalisme yang dibangun atas kesadaran bahwa mereka adalah orang Indonesia, tapi didukung oleh pemahaman keagamaan yang mereka yakini, itu yang membuat mereka menjadi kokoh dan militan (wawancara pada 31 Agustus 2020)..

Pandangan ini juga diperkuat oleh pendapat yang disampaikan Waka Satkornas, Bpk. Hasan Basri yang menyatakan:

Tujuan bela negara tidak terlepas dari bagaimana organisasi NU didirikan adalah untuk tetap melestarikan ajaran *ahlussunah wal jamaah* dan menjadikan Indonesia menjadi negara merdeka dari penjajahan. Tugas agama dan tugas negara adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, tujuan dari bela negara di GP Ansor tidak lain adalah untuk menjaga agama dan juga menjaga NKRI (wawancara tanggal 1 September 2020).

Lebih lanjut, hasil wawancara peneliti dengan Kabid Kaderisasi, Bpk. Ruchman Basori yang menyatakan bahwa:

Beragama itu tidak akan terwujud kalau negara kita itu tidak aman. Islam tidak akan tegak di bumi Nusantara kalau tanpa negara, tanpa kepemilikan yang sah, tanah yang sah dan sebagainya. Maka kewajiban menjalankan agama juga kewajiban menjalankan mempertahankan negara. Jadi saya kira itu teori-teori negara kan itu ada kekuasaan, ada pemerintahan, itu betul-betul dianut oleh Nadhlatul Ulama termasuk Ansor (wawancara tanggal 7 September 2020).

Pendapat Bpk. Ruchman Basori juga menegaskan bahwa tujuan dalam implementasi nilai-nilai bela negara adalah tidak lepas dari kewajiban menjalankan syariat agama dalam konteks menjaga dan mempertahankan eksistensi negara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubdit Lingkungan Pemukiman Dit. Bela Negara Kemhan, Bpk. Kol. Luhkito pada 28 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa tujuan implementasi nilai-nilai bela negara adalah mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan agar negara ini tetap eksis hingga selamanya, tetap tegaknya NKRI.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, tujuan dari implementasi nilai-nilai bela negara di lingkungan GP Ansor ialah menjaga tetap tegaknya ajaran agama dan tetap mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini sedikit memiliki perbedaan substansi, di mana sebagai Ormas yang berbasis kepada keislaman, GP Ansor selalu berorientasi dan tidak terlepas dari aspek spiritual keagamaan termasuk dalam menetapkan tujuan implementasi nilai-nilai bela negara bela negara yang tidak bisa dipisahkan dari tujuan beragama.

#### **4.2.2.2.2 Aspek Cara (ways) dalam Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekjen GP Ansor, Bpk. Abdul Rochman terkait dengan cara yang digunakan dalam implementasi nilai-nilai bela negara ialah dengan melakukan beragam kegiatan yang berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. GP Ansor selalu mencoba responsif terhadap berbagai isu yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat dan menjadi bagian solusi atas permasalahan tersebut. Misalnya dalam hal bencana alam, seperti yang dikatakan oleh informan:

Contohnya kalau masyarakat mengalami bencana, maka kita berangkat paling dulu dan pulang paling akhir dengan sumberdaya seadanya, tanpa komando, inisiatif sendiri, ekspresi cinta negara itu kan bukan hanya manusianya, tetapi juga alamnya, dengan kesadaran sebagai bagian dari pendiri bangsa dan warga negara yang baik (wawancara tanggal 31 Agustus 2020).

Lebih lanjut, dikatakan oleh informan bahwa dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, GP Ansor berupaya mewujudkan suasana keberagamaan yang harmonis sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya dengan menunjukkan sikap toleransi beragama. Kaitan dengan hal ini dijelaskan oleh informan Bpk. Abdul Rochman sebagai berikut:

Misalnya cara kita menjaga agar toleransi kehidupan beragama itu ditunjukkan dengan cara turut bergembira dan menjaga tempat-tempat ibadah dimana saudara kita merayakan hari besarnya, baik itu Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, karena kita sesama warga negara turut menjaga bahwa toleransi beragama itu tumbuh dan semua warga negara itu mempunyai perasaan tidak terdiskriminasi apalagi terancam dalam menjalani keyakinannya yang dijamin oleh konstitusi kita (wawancara tanggal 31 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Satkornas, Bpk. Hasan Basri, terkait dengan cara yang digunakan dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dijelaskan sebagai berikut:

Seperti saya jelaskan di awal bahwa tugas utama kami ini adalah untuk menjaga agama, bangsa dan negara. Selain tadi dengan memperkuat program kaderisasi, satuan-satuan yang di Banser juga didayagunakan untuk dalam rangka menjaga agama dan juga menjaga bangsa dan negara. Seperti satuan Balakar, Balantas, Baritim dan juga Densus 99 Asmaul Husna, satuan yang bertugas untuk menghadapi ancaman radikalisme yang semakin menguat di tengah masyarakat. Ini adalah cara-cara yang kami pahami merupakan salah satu bentuk upaya kami dalam menjaga agama dan juga negara tadi (wawancara tanggal 1 September 2020).

Menurut pendapat dari Kabid Kaderisasi, Bpk. Ruchman Basori terkait dengan cara yang digunakan dalam implementasi nilai bela negara menjelaskan sebagai berikut:

Pada dasarnya bentuk bela negara yang kami lakukan adalah bagian dari *khidmat* (pelayanan) yang Ansor berikan kepada masyarakat. Seperti misalnya kami membentuk satuan-satuan Banser seperti Bagana, Balantas, Densus 99 Asmaul Husna, macam-macam bentuknya. Jadi kami selalu berusaha merespon isu-isu sosial kemasyarakatan yang muncul di tengah masyarakat untuk turun ikut membantu sesuai kapasitas yang dipunyai gitu. Membentuk tim gugus tugas Covid-19, layanan wifi gratis untuk pelajar, serta bantuan sosial lainnya. Dalam konteks yang lain soal *leadership*, kita kerap sekali mengundang para tokoh di Ansor untuk diskusi, mulai Presiden sampai menteri-menterinya, bahkan dirjen-dirjennya kerap diundang di kita itu (wawancara tanggal 7 September 2020).

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara cara ataupun metode yang digunakan seperti memperkuat sistem kaderisasi untuk menginternalisasi nilai-nilai bela negara dan juga agama terhadap para

kader. Kemudian, GP Ansor selalu bersikap untuk responsif terhadap isu-isu sosial yang muncul di tengah masyarakat dengan mencoba membantu dan memberikan solusi dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, ialah dengan memberdayakan satuan-satuan yang terdapat di dalam Banser itu sendiri guna mengoptimalkan aktualisasi bela negara GP Ansor di tengah masyarakat.

#### **4.2.2.2.3 Aspek Sumberdaya (*Means*) dalam Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara**

Terkait aspek sumber daya (*means*) yang digunakan dalam implementasi nilai-nilai bela negara, peneliti mencoba mendapatkan informasi dari informan melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekjen GP Ansor, Bpk. Abdul Rochman menyatakan bahwa:

Salah satu hal yang menjadi kekuatan dari GP Ansor dalam kaitannya dengan bela negara ialah kader yang kokoh dan militan. Ini dikarenakan kesadaran atau pemahaman yang dibangun berdasarkan keyakinan keagamaan yang kuat bahwa ini adalah tugas agama dan tugas negara. Itu yang membuat mereka menjadi militan (wawancara tanggal 31 Agustus 2020).

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Satkornas, Bpk. Hasan Basri yang menerangkan sebagai berikut:

Sebagai Ormas, kita ini mungkin punya keterbatasan *resources*, anggaran seperti itu, tapi kan kami juga punya sumber daya kader-kader yang siap didayagunakan untuk melaksanakan tugas agama dan juga tugas negara itu tadi, dalam satuan-satuan (tugas) yang sudah dibentuk. Selain itu, kita disini juga mungkin ya Ormas yang punya punya basis dan juga struktur kepengurusan sampai ke bawah, itu berapa, dan yang punya konsep bela negara yang riil dari pimpinan pusat sampai ke bawah itu berapa. Kami komitmen dengan itu. Dukungan dari NU juga menjadi sesuatu yang penting bagi

Ansor dalam berkiprah untuk melakukan tugas agama dan negara. Karena bagaimanapun juga kami adalah anak dari NU, yang butuh diayomi dan diarahkan oleh orang tua kami (wawancara tanggal 1 September 2020).

Pendapat dari informan tersebut menyatakan bahwa kekuatan militansi kader yang siap diberdayakan dalam satuan-satuan tugas kebangseran untuk melaksanakan tugas agama dan bela negara merupakan sumber daya penting dalam implementasi nilai bela negara.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Kabid. Kaderisasi, Bpk. Ruchman Basori terkait dengan sumberdaya yang dimiliki dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara sebagai berikut:

Salah satunya ialah kader-kader yang memiliki doktrin keagamaan yang kuat sehingga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kemudian, kader-kader yang ada di pos-pos jabatan publik mampu menjadi diseminator-diseminator atau duta-duta tentang... bela negara di kalangan lembaga yang diikuti. Jadi ya, istilahnya menjadi duta Ansor. Rochman itu duta Ansor yang di kementerian agama, mas Juri Ardiantoro itu duta Ansor yang walaupun tidak tertulis, walaupun tidak terucapkan, tapi otomatis, begitu (wawancara tanggal 7 September 2020).

Penjelasan dari para informan tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh kader GP Ansor ialah militansi keagamaan yang dimiliki oleh para kader. Selain itu, kader-kader yang menempati posisi-posisi strategis seperti birokrat, politisi, dan profesi lainnya menjadi sumber daya yang mendukung implementasi nilai-nilai bela negara yang dilakukan oleh GP Ansor.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan akademisi, Dr. Sutrimo S, yang menjelaskan bahwa:

Pada dasarnya, mereka (kader Ormas) punya anggota yg memiliki disiplin organisasi yang baik sehingga perlu dijadikan

salah satu sasaran utama dalam pembinaan kesadaran bela negara komunitas masyarakat. Ormas GP Ansor sudah memiliki jiwa dan tradisi cinta tanah air dan memiliki kesadaran bela negara yang cukup baik sebagaimana tradisi yang ada di organisasi induknya, NU yang telah terbukti ikut mendirikan RI (wawancara pada 10 September 2020).

Dari penjelasan informan tersebut, memberikan pengertian bahwa sumber daya (*means*) yang dimiliki oleh GP Ansor dalam implementasi nilai-nilai bela negara adalah adanya militansi kader rasa kesadaran bela negara yang sudah lama tumbuh di internal Ormas tersebut seperti pada organisasi induknya, NU serta kader yang menempati posisi-posisi strategis seperti birokrat, politisi, dan profesi lainnya sehingga bisa menjadi diseminator akan nilai bela negara.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkungan GP Ansor**

Pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan GP Ansor berdasarkan hasil penelitian, dilakukan melalui beberapa metode sebagaimana dinyatakan oleh beberapa informan kunci dari Ormas. B. Simanjuntak & I. Pasaribu (1990) menyatakan bahwa pembinaan merupakan upaya pendidikan formal maupun non formal yang diselenggarakan secara sadar, teratur, terarah, berencana, serta bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, membimbing, menumbuhkembangkan dasar-dasar kepribadian secara seimbang, utuh dan selaras. Pembinaan diarahkan untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan diri, antar sesama maupun dengan lingkungan ke arah pencapaian martabat, mutu serta kemampuan manusiawi yang optimal dan menjadi pribadi yang mandiri (p. 84). Sementara Hasibuan (2018) mengemukakan bahwa kesadaran adalah sikap perilaku seseorang yang dengan sukarela menaati semua peraturan dan didukung oleh rasa sadar terhadap tugas dan tanggung jawabnya (p. 195).

Pembinaan kesadaran bela negara adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan, menumbuhkan sikap dan perilaku warga negara agar memiliki nilai bela negara dalam jiwa dan karakternya.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU PSDN yang menjelaskan bahwa Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara dengan tujuan membangun dan membentuk sikap mental serta karakter warga negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai bela negara.

Pembinaan kesadaran bela negara di mana salah satunya ditujukan di lingkungan organisasi kemasyarakatan, adalah salah satu upaya untuk menyebarluaskan pemahaman tentang bela negara ke seluruh komponen bangsa. Sebagai salah satu entitas dari masyarakat, para kader Ormas merupakan obyek dari PKBN yang penting terkait dengan upaya membangun pertahanan negara yang kuat di sektor sosial-kemasyarakatan. Dengan terbangunnya kesadaran bela negara di lingkungan permukiman dan kemasyarakatan yang kuat, akan mendukung kekuatan pertahanan negara dalam hal keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya bela negara pada berbagai macam bentuk kegiatan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana dijelaskan oleh teori B. Simanjuntak dan I.L Pasaribu (1990) bahwa secara umum upaya pembinaan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni formal dan nonformal, pembinaan kesadaran bela negara yang dibangun di lingkungan Ormas GP Anzor dilaksanakan secara formal maupun nonformal. Secara formal, pembinaan kesadaran bela negara dimasukkan dalam fase atau jenjang kaderisasi internal organisasi. GP Anzor memiliki mekanisme jenjang kaderisasi sebagai

sarana rekrutmen, pembinaan, pengembangan, serta promosi dan pendayagunaan kader. Sedangkan, secara nonformal, pembinaan dilakukan dalam bentuk metode yang lain seperti forum internal kader, majelis dzikir/pengajian, dan juga apel kebangsaan.

Dalam jenjang kaderisasi ini terdapat pelatihan ataupun diklat yang bertujuan untuk penanaman nilai serta ideologi, peningkatan wawasan pengetahuan, pembangunan karakter, peningkatan kecakapan, dan membangun kemampuan diri kader untuk menjaga marwah organisasi. GP Ansor dan juga Banser memiliki beberapa pelatihan ataupun diklat yang berfungsi sebagai sarana kaderisasi, penanaman nilai organisasi, pengembangan potensi kader, dsb dengan muatan materi-materi tertentu yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan kader, termasuk di dalamnya materi ke-Indonesiaan, ke-Pancasilaan, serta kebangsaan. Adapun jenjang kaderisasi yang dimaksud ialah: a) Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD); b) Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL); dan c) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). Sedangkan di lingkup lembaga semi-otonom Banser, diklat yang diadakan berupa Diklatsar (Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Dasar), Susbalan (Kursus Banser Lanjutan), dan Susbanpim (Kursus Banser Pimpinan). Dalam prakteknya, pelaksanaan kaderisasi formal tersebut dilakukan secara terencana dan juga rutin sesuai dengan kebutuhan dari tiap pengurus untuk melakukan kaderisasi.

Pelatihan Kepemimpinan Dasar merupakan sarana pembinaan kader untuk jenjang pemula dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang diarahkan untuk menanamkan ideologi kepada anggota untuk melahirkan kader organisasi. Pada tahapan ini, para kader diberikan materi-materi tertentu seperti materi *Aswaja*, Dalil-dalil amaliyah dan Tradisi Keagamaan NU, Ke-Nahdlatul Ulama-an, Ke-GP Ansor-an, Ke-Indonesia-an dan Kebangsaan, dan sebagainya. Muatan penanaman ke-bela negaraan tercakup dalam materi ke-Indonesiaan dan kebangsaan yang mencakup

tentang substansi Pancasila serta UUD 1945 serta konsensus kebangsaan NKRI.

Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan merupakan sarana pembinaan kader untuk jenjang lanjutan dalam mekanisme kaderisasi GP Ansor yang ditujukan dalam rangka melahirkan kader pemimpin organisasi dengan berbasis pada pengembangan kecakapan keorganisasian. Materi yang diberikan dalam pendidikan dan pelatihan ini ialah kelanjutan dari materi Pelatihan Kader Dasar dengan diantaranya materi tentang Perspektif Aswaja (*Ahlusunnah wal Jamaah*) dalam masalah kemasyarakatan dan kebangsaan, dan juga terkait dengan masalah bela negara.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional merupakan pendidikan dan pelatihan kader jenjang tertinggi yang diarahkan untuk penguatan kapasitas gerakan. Pada fase ini, materi yang ditekankan untuk para kader lebih diarahkan pada materi kepemimpinan, politik nasional, dan sebagainya. *Output* dari jenjang kaderisasi pada level ini ialah lahirnya kader-kader pemimpin gerakan.

Dalam pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Banser berupa Diklatsar, Susbalan dan juga Susbanpim, juga terkandung muatan-muatan materi yang terkait dengan konsep kebangsaan, nasionalisme, dan juga bela negara. Dalam pemberian materi tersebut, biasanya diberikan oleh instruktur yang berasal dari Pengurus Pusat maupun Wilayah yang telah memiliki kualifikasi tertentu terhadap materi-materi yang diberikan. Akan tetapi, beberapa materi tertentu terkadang melibatkan pihak-pihak tertentu seperti akademisi, ataupun dari TNI/Polri.

Mengacu pada hasil penelitian tersebut di atas, di mana terdapat mekanisme pengkaderan yang berjenjang di lingkungan GP Ansor mulai dari level bawah hingga ke level atas, disertai dengan penguatan materi-materi pada setiap level menunjukkan adanya aspek keberlanjutan dalam proses pembinaan. Hal ini juga sesuai dengan konsep pembinaan yang

menjelaskan bahwa pembinaan harus dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana dijelaskan oleh B. Simanjuntak dan I. L. Pasaribu (1990, p. 84).

Selain melalui mekanisme jenjang kaderisasi dalam rangka proses pembinaan kesadaran bela negara secara formal, secara nonformal, penanaman kesadaran bela negara juga menggunakan media pertemuan lain seperti forum-forum pertemuan (*halaqoh*), majelis-majelis pengajian tentang kebangsaan yang secara rutin dilakukan di setiap tingkat struktur organisasi. Di internal GP Ansor, terdapat lembaga semi-otonom Majelis pengajian Rijalul Ansor yang berfungsi sebagai upaya memelihara akidah *Aswaja* ala NU dan forum konsolidasi kyai/ulama muda GP Ansor di tiap tingkatan. Ini dilakukan secara kontinu dan terus-menerus dengan cara dengan memberikan pemahaman kepada kader tentang orientasi organisasi yang membawa misi menjaga agama dan juga membela negara. Pembiasaan atau habituasi yang dilakukan oleh Ormas GP Ansor dalam menginternalisasi nilai-nilai bela negara juga sejalan dengan yang dikemukakan dalam penelitian Novyanti et.al (2019) tentang teori internalisasi yang salah satunya ialah introyeksi atau sebuah proses pengulangan atau penyalinan situasi yang terjadi secara repetitif agar menjadi *habit* atau kebiasaan. Dengan melakukan pembiasaan tersebut, nilai-nilai bela negara akan terinternalisasi dan tumbuh secara gradual dalam diri setiap kader. Selain itu, upaya nonformal lain untuk membangun kesadaran bela negara di GP Ansor ialah dengan mengadakan apel kebangsaan sebagai bagian konsolidasi internal. Apel kebangsaan juga merupakan bagian dari upaya untuk membangun rasa kesadaran bela negara para kader yakni dengan memberikan pemahaman secara mendalam tentang hakikat bela negara melalui isu-isu tertentu seperti anti-radikalisme, anti-Pancasila, jaga NKR, dst. Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa upaya pembinaan kesadaran bela negara baik formal maupun nonformal

di lingkungan GP Ansor telah dilakukan secara terarah, terencana dan berkesinambungan.

Terkait dengan pemberi materi dalam kegiatan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan GP Ansor, secara umum, proses kaderisasi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, dikelola dan ditangani sendiri oleh kader-kader internal, baik pemateri, instruktur, dan sebagainya. Hal ini karena di internal GP Ansor sendiri terdapat mekanisme peningkatan kompetensi keinstrukturan untuk dapat diberdayakan sebagai instruktur pendidikan dan pelatihan kader. Namun, khusus untuk jenjang kaderisasi Diklatsar yang diadakan oleh Banser, selalu melibatkan pihak TNI, baik dari Koramil ataupun Kodim setempat, serta Polri, untuk memberikan latihan kedisiplinan serta baris-berbaris untuk para kader sebagai bentuk penanaman nilai-nilai bela negara, dalam hal ini kemampuan fisik dan juga psikis.

Selain itu, dalam beberapa materi kaderisasi, GP Ansor juga melibatkan pihak lain sebagai narasumber untuk memberikan materi-materi tertentu pada pelatihan. Beberapa tokoh seperti akademisi, birokrat, tokoh publik terkadang diundang untuk memberikan materi tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, Pancasila, dan sebagainya.

Secara institusional, sinergi yang dibangun antara GP Ansor dan juga Kementerian Pertahanan terkait Pembinaan Kesadaran Bela Negara sudah pernah terbangun sejak 2014. Saat itu, perjanjian kerja sama antara Kemhan RI dengan GP Ansor ditindaklanjuti dengan pelibatan beberapa kader GP Ansor dalam acara Visi Kemaritiman Sail Selat Karimata yang digagas oleh Kemhan dalam rangka merekrut kader-kader bela negara dari beberapa Ormas yang telah melakukan kerjasama dengan Kemhan RI, termasuk GP Ansor. Dalam pandangan Kementerian Pertahanan RI, acara tersebut cukup berhasil, karena semua kader Ormas yang mengikuti acara tersebut mampu memiliki kesadaran bela negara yang cukup baik,

sehingga diharapkan menjadi *influencer* terhadap rekan-rekan kader yang lain dalam menularkan kesadaran bela negara.

Akan tetapi, dari pandangan Ormas GP Ansor, kerjasama yang terbangun belum terlalu efektif dan optimal karena kontinuitas dari kegiatan yang belum berjalan dengan baik. Dengan kata lain, sinergi antara Kemhan RI dan GP Ansor dalam hal pembinaan kesadaran bela negara masih belum optimal. Berdasarkan pengertian sinergi yang dijelaskan oleh Stoner et.al (1996) tentang konsep sinergi bahwa sinergi adalah tindakan sebagai hasil dari kerjasama, dimana komponen antar bagian dalam sebuah organisasi saling berhubungan, dan hasil yang didapatkan menjadi lebih baik apabila hal tersebut dilakukan secara sendirian. Sinergi ataupun kerjasama oleh kedua belah pihak perlu upaya pembenahan karena dinilai masih belum optimal dalam membangun kesadaran bela negara secara masif di lingkungan Ormas.

Pembinaan kesadaran bela negara yang dilakukan oleh Ormas GP Ansor tidak terlepas dari adanya faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat. Pembinaan kesadaran bela negara yang masuk dalam jenjang kaderisasi dilaksanakan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Kendala yang ditemui ialah masalah pendanaan dan teknis operasional kegiatan.

Hal ini juga menjadi temuan dari penelitian Safira (2016) dan juga Widiatmaka (2016) dalam penelitiannya tentang peran GP Ansor dalam mengembangkan nasionalisme dan membangun karakter pemuda di Semarang dan juga Sukoharjo, Jawa Tengah, bahwa masalah pendanaan kegiatan menjadi salah satu kendala teknis yang dihadapi, terutama terjadi pada struktur organisasi di tingkat anak cabang, maupun ranting. Kondisi ini menuntut adanya kreativitas dari para pimpinan organisasi di level bawah tersebut untuk mengusahakan agar kegiatan kaderisasi tetap berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, dukungan dari NU secara moral

terhadap kegiatan kaderisasi di lingkungan GP Ansor ini menjadi sebuah faktor pendukung tersendiri. Sebagai anak kandung dari NU, GP Ansor memanfaatkan *resources* yang dimiliki NU dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti menyediakan tempat pelatihan, menyuplai logistik dan sebagainya. Selain itu, para pengurus juga berinisiatif untuk mengadakan iuran keanggotaan untuk membantu meringankan biaya operasional kegiatan.

Adapun faktor yang mendukung yakni, mekanisme sistem kaderisasi yang melahirkan kader-kader instruktur yang dapat didayagunakan sebagai pemateri dan juga instruktur dalam pembinaan kesadaran bela negara pada jenjang kaderisasi di bawahnya. Kader-kader yang telah melalui tahapan kaderisasi internal dianggap memiliki derajat pemahaman keagamaan dan komitmen kebangsaan yang lebih baik daripada yang tidak mengikuti fase kaderisasi.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil pembahasan di atas ialah bahwa pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan di lingkungan Ormas GP Ansor dilaksanakan secara formal dan juga nonformal. Secara formal, proses pembinaan diwujudkan dalam bentuk fase/jenjang kaderisasi yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Selain itu, upaya pembinaan kesadaran bela negara juga dilakukan secara nonformal yakni dalam bentuk forum-forum pertemuan (*halaqoh*), majelis-majelis pengajian yang juga membahas tentang persoalan nasionalisme dan kebangsaan. Upaya pembinaan kesadaran bela negara juga dilakukan dalam bentuk pelaksanaan apel kebangsaan yang dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Apel kebangsaan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan juga semangat cinta tanah air para kader GP Ansor sebagai wujud kesadaran bela negara.

#### **4.3.1.1 Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkungan Ormas GP Ansor dalam Mendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta**

Pembinaan kesadaran bela negara yang berada di lingkungan Ormas sangat penting sebagai salah satu upaya untuk membangun dan mengelola sumberdaya manusia, khususnya di lingkungan permukiman sebagai salah satu target pembinaan. Dalam konteks upaya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan ormas akan berkontribusi terhadap terbangunnya kesadaran bela negara yang masif di tengah masyarakat yang akan menjadi fondasi dalam bangunan sistem pertahanan negara.

Sebagaimana dinyatakan oleh Akademisi dalam wawancara dengan peneliti yang menyebutkan bahwa Ormas sebagai sebuah wadah perkumpulan warganegara merupakan sumberdaya potensial yang dapat didayagunakan untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara. Sebagai bagian dari warga terlatih, anggota Ormas perlu diprioritaskan untuk menjadi sasaran dalam pembinaan kesadaran bela negara.

Dari hasil pembahasan terkait dengan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas GP Ansor dapat dikatakan bahwa PKBN yang telah dilakukan merupakan salah satu bentuk upaya penyiapan secara dini Ormas sebagai bagian dari komponen pendukung dalam rangka memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. GP Ansor memiliki komitmen untuk membangun kesadaran bela negara dengan paradigma keagamaan yang dipahami di internal organisasi sebagai modal guna mendukung terwujudnya sishankamrata yang kuat.

Doktrin Pertahanan Negara yang diilhami dari pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta di mana dalam penerapannya melibatkan seluruh

komponen bangsa secara nyata dalam pertahanan dan keamanan negara dalam bentuk mobilisasi dan demobilisasi komponen pendukung dan komponen cadangan guna memperbesar komponen utama.

Potensi besar yang ada di dalam tubuh Ormas GP Ansor berupa jumlah kader, struktur organisasi, serta dengan keberadaan organ paramiliternya, yakni Banser, yang memiliki kecakapan di bidang keahlian fisik dan mental, dapat menjadi sumber daya potensial sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Lebih lanjut, berbagai kelebihan yang dimiliki Banser sebagai organ paramiliter GP Ansor tersebut, berpotensi untuk ditransformasi menjadi kekuatan komponen cadangan pertahanan negara. Sebagai sebuah organisasi kepemudaan yang memiliki perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, GP Ansor berperan dalam memberdayakan segenap kader yang memiliki kesadaran bela negara untuk menjadi bagian dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Konsep perang semesta yang bermakna pelibatan seluruh SDN dalam upaya membangun pertahanan negara membutuhkan fondasi kesadaran bela negara masyarakat yang kuat. Fondasi kesadaran bela negara yang kuat tersebut, merupakan resultan dari adanya pembinaan kesadaran bela negara yang intensif, terencana, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa upaya pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas GP Ansor secara tidak langsung akan berimplikasi pada penguatan sishankamrata, di mana yang menjadi kekuatan ialah adanya partisipasi aktif warganegara yang terlibat di dalamnya.

### **4.3.2 Strategi Ormas GP Ansor dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela Negara**

#### **4.3.2.1 Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Ormas GP Ansor**

Bela Negara pada dasarnya merupakan bagian integratif dari upaya pertahanan yang bersifat semesta, di mana dalam pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan dan kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara, demi menjaga keberlanjutan hidup bangsa dan negara. Negara Indonesia tidak cukup hanya dipertahankan oleh para tentara saja, namun perlu pelibatan secara aktif dari segenap komponen bangsa untuk turut serta dalam berkontribusi bagi pertahanan negara.

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan beberapa narasumber di Ormas GP Ansor, secara umum konsepsi pemahaman bela negara sudah terbangun. Para informan menuturkan bahwa bela negara memiliki makna yang tidak hanya menyangkut terhadap mempertahankan eksistensi negara, namun makna bela negara yang dipahami oleh para kader Ormas GP Ansor bahwa bela negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen keagamaan yang juga menyangkut bagaimana menjaga keberlangsungan negara ini sebaik mungkin. Sebagai bagian dari keluarga besar Ormas NU, GP Ansor selalu memaknai tema dan isu sesuatu dalam paradigma keagamaan, termasuk dalam hal bela negara.

Pemahaman GP Ansor terhadap bela negara merupakan pemahaman yang integratif dengan pemahaman keagamaan. Hal ini yang sedikit membedakan antara pemahaman GP Ansor terhadap bela negara dengan konsepsi regulasi tentang bela negara itu sendiri yang tercantum dalam pasal 1 angka 9 UU PSDN tentang konsepsi bela negara. Namun, pemaknaan bela negara secara natural yang diyakini oleh Ormas GP Ansor bahwa bela negara adalah bagian dari bela agama tersebut berkorelasi dengan konsepsi pemikiran Ormas GP Ansor yang juga merupakan Ormas yang berbasiskan pada nilai-nilai agama, sehingga

orientasi pemikiran, tindakan juga bersumber pada teks-teks keagamaan. Dengan kata lain, mencintai Indonesia, bagi GP Ansor, bukan semata-mata didasari oleh nasionalisme yang terbangun karena lahir di Indonesia dan menjadi bagian dari warga negara Indonesia, tetapi juga nasionalisme yang tumbuh dari semangat keagamaan.

Selain itu pula, kesadaran akan makna historis bela negara yang dimiliki oleh GP Ansor, sebagai Ormas yang juga turut berjuang dalam merebut kemerdekaan menjadi faktor penguat dalam pemahaman ke-bela negaraan di lingkungan GP Ansor. Hal ini selalu menjadi materi dalam internalisasi nilai-nilai yang dilaksanakan di dalam GP Ansor kepada para kader. Setiap kader diberikan pemahaman bahwa menjaga negara merupakan salah satu bentuk usaha menjaga agama. Karena mereka berkeyakinan bahwa kemerdekaan yang diraih negara ini juga merupakan warisan salah satunya dari golongan para kyai atau ulama yang telah berjuang dalam merebut kemerdekaan pada era penjajahan.

Implementasi nilai-nilai bela negara secara prinsip merupakan aktualisasi dari nilai-nilai bela negara yang diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan yang positif dalam keseharian sesuai profesi dan bidang yang ditekuni dalam rangka merealisasikan kecintaan terhadap tanah air. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kebangsaan, keagamaan dan berwatak kerakyatan, GP Ansor juga memiliki komitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam bentuk aktivitas organisasi yang dijalankan selama ini. Walaupun dalam regulasi ataupun peraturan GP Ansor sendiri tidak secara eksplisit menginstruksikan untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, namun pemahaman natural akan kecintaan kader-kader GP Ansor terhadap NKRI tercermin dalam berbagai kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan sejalan dengan semangat bela negara yakni untuk berkontribusi yang terbaik untuk bangsa dan juga negara. Hal ini karena, implementasi yang dilakukan dalam rangka semangat untuk menjaga dan melestarikan ajaran

agama yang diyakini yang juga memuat tentang nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air.

Implementasi nilai-nilai bela negara yang dilakukan oleh GP Ansor berangkat dari sebuah pemahaman akan keyakinan keagamaan bahwa negara ini harus dipelihara dan dijaga eksistensinya agar ajaran keagamaan yang diyakini yang juga merupakan warisan dari para ulama terdahulu tetap lestari. Disamping itu juga, implementasi nilai-nilai bela negara juga bagian tidak terpisahkan dari tugas keagamaan yaitu sebagai bentuk *khidmat* (pelayanan) kepada masyarakat, agar organisasi ini mampu memiliki nilai tambah bagi keberadaan sekitarnya.

Dalam melakukan analisa terhadap implementasi nilai-nilai bela negara Ormas GP Ansor, peneliti mencoba untuk melihat bentuk implementasi dengan mengacu pada Permenhan RI No.32 Tahun 2016 tentang Pedoman PKBN. Regulasi tersebut merupakan pedoman yang digunakan dalam upaya pembinaan kesadaran bela negara, baik di lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemda maupun unsur lainnya.

Hal yang menjadi perhatian peneliti bahwa pada dasarnya aktivitas organisasi yang dilakukan oleh Ormas GP Ansor tidak murni dimaksudkan sebagai bentuk kegiatan bela negara saja, namun kegiatan tersebut sudah menjadi bagian dari aktivitas organisasi yang memang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Peneliti mencoba memandang aktivitas organisasi yang dilakukan oleh Ormas GP Ansor dalam perspektif nilai-nilai bela negara yang sudah menjadi standar. Meskipun, dari sisi Ormas tidak terlalu memikirkan pengelompokkan nilai bela negara terhadap aktivitas organisasi yang dijalani. Akan tetapi untuk memudahkan proses analisis, maka penggunaan lima nilai bela negara dirasakan akan cukup membantu untuk mendeskripsikan gambaran implementasi nilai bela negara Ormas GP Ansor. Adapun ke-lima nilai bela negara yang dimaksud adalah:

- 1) Cinta Tanah Air

- 2) Sadar Berbangsa dan Bernegara
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai Idiologi Negara
- 4) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara
- 5) Memiliki kesiapan awal Bela Negara (Fisik dan Psikis)

#### **4.3.2.1.1 Cinta Tanah Air**

Secara umum, cinta tanah air dapat diartikan sebagai mengenal, memahami dan mencintai wilayah nasional, memelihara tanah dan pekarangan dan seluruh ruang wilayah Indonesia, berkontribusi terhadap bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia, serta mencintai produk-produk Indonesia. Cinta tanah air yang dimaknai oleh kader GP Ansor adalah bahwa ekspresi mencintai tanah air merupakan bagian dari keimanan, sehingga tidak bisa dilepaskan dari konteks keagamaan. Beberapa kegiatan dilakukan oleh kader GP Ansor di daerah dalam rangka wujud kecintaan pada tanah air, seperti mengkampanyekan cinta lingkungan, membersihkan sungai irigasi, pantai, bersama personel TNI/Polri dan relawan lainnya, dan sebagainya.

Selain itu, keseriusan GP Ansor dalam menjaga tanah air ialah dengan membentuk satuan tugas Banser Maritim yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam pengamanan, pelestarian, pemeliharaan, dan juga konservasi wilayah kemaritiman NKRI, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Walaupun belum banyak kiprah yang dilakukan oleh satuan tersebut, namun setidaknya sudah terdapat usaha serius dari GP Ansor untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air.

Upaya lainnya yang dibangun GP Ansor dalam rangka berkontribusi pada kemajuan bangsa ialah dengan turut aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan membentuk Badan Ansor Anti Narkoba (Baanar). Pembentukan Baanar merupakan wujud peran aktif GP Ansor dalam membantu upaya pemerintah memerangi narkoba. Dalam

praktiknya, Baanar juga bekerja sama dengan pihak BNN, Kepolisian RI, dan instansi lainnya di beberapa daerah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba sebagai bentuk upaya pencegahan penggunaan narkoba di kalangan siswa. Meskipun, lembaga ini masih tergolong baru, namun kiprahnya di lapangan sudah cukup terlihat aktif.

Di bidang pendidikan dan pemberdayaan ummat, GP Ansor juga membaktikan diri dengan memberikan berbagai macam pendidikan, pelatihan dan pengembangan usaha bagi mereka yang membutuhkan melalui lembaga semi-otonom Ansoruna *Business School* yang fokus pada pengembangan di bidang pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan berbagai pelatihan-pelatihan yang bermanfaat seperti membuat *website*, *editing* video, pemasaran produk, dan *skill* berwira usaha lainnya. Dari perspektif implementasi nilai-nilai bela negara, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi positif terhadap kemajuan bangsa dengan memberikan *softskill* bagi para pemuda, pelajar ataupun mereka yang membutuhkan.

Bentuk lain yang digunakan dalam membangun kesadaran akan cinta tanah air ialah dengan membudayakan lagu yang bernuansa kecintaan terhadap tanah air, seperti lagu *Syubbanul Wathan*, yang merupakan lagu ciptaan pendiri Ansor, KH. Abdul Wahab Hasbullah, yang sudah lama dinyanyikan kaum Nahdliyyin sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Lagu tersebut merupakan lagu perjuangan yang dinyanyikan para santri untuk membangkitkan rasa cinta tanah air saat melawan kolonial. Spirit tersebut coba dipertahankan oleh kalangan NU dan juga GP Ansor pada masa sekarang ini untuk selalu memiliki perasaan cinta tanah air sebagai bagian dari nilai bela negara. Hal ini juga merupakan bagian dari teori internalisasi, yakni introyeksi yang mengemukakan bahwa penginternalisasian nilai-nilai bela negara dapat dilakukan melalui

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan melalui panca indera pada kebiasaan sehari-hari.

#### **4.3.2.1.2 Sadar Berbangsa dan Bernegara**

Dalam hal membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, didasari atas kesadaran akan adanya keragaman suku bangsa, agama, adat, dsb sehingga diperlukan sebuah kerukunan. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warganegara, mengenal keanekaragaman individu dan lingkungan serta berpikir dan melakukan tindakan untuk bangsa dan negara Indonesia dengan tindakan yang terbaik.

GP Ansor sebagai organisasi masyarakat yang mengedepankan toleransi beragama, konsisten untuk mewujudkan kerukunan antar agama. Misalnya dengan melindungi kaum minoritas yang berbeda agama, menjaga tempat ibadah agama lain saat menjalankan ibadah, serta turut aktif dalam menyebarkan pandangan kebhinekaan. Meskipun, di sisi yang lain, GP Ansor juga dinilai sebagian kalangan tidak konsisten terkait dengan sikap persekusi yang pernah dilakukan terhadap beberapa tokoh ataupun kelompok yang dianggap berseberangan, intoleran dan anti-Pancasila. Sikap seperti ini, mengundang pertanyaan publik akan kampanye toleransi yang sering digaungkan oleh GP Ansor, karena terkesan tidak berimbang. Namun, menurut pandangan GP Ansor, upaya ini dilakukan adalah dalam rangka untuk melindungi ideologi Pancasila dari pemikiran-pemikiran radikal yang bisa mengganggu keutuhan NKRI.

#### **4.3.2.1.3 Setia kepada Pancasila**

Kesetiaan kepada ideologi Pancasila tercermin dari pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, menjaga nama baik bangsa, dan meyakini Pancasila sebagai falsafah NKRI. Ideologi Pancasila merupakan ideologi bangsa yang lahir dari konsensus nasional yang dalam

perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia telah mampu berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Catatan sejarah telah tertulis bagaimana rangkaian aksi dari sekelompok orang atau organisasi yang berusaha merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bermaksud untuk mengganti ideologi negara dapat teratasi berkat kesetiaan komponen bangsa ini terhadap Pancasila.

Keyakinan kader GP Ansor terhadap eksistensi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia tidak lepas dari adanya keberhasilan para tokoh di NU dalam menemukan titik temu antara relasi agama dan negara sejak negara ini pertama kali didirikan, salah satunya ialah oleh KH. Wahid Hasyim. Pancasila sebagai salah satu hasil dari konsensus nasional merupakan hasil rumusan final dari para *founding father* dalam meletakkan dasar negara yang dapat diterima oleh semua kalangan. Keyakinan ini yang telah menjadi sebuah ruh dalam setiap aktivitas organisasi yang dilakukan oleh GP Ansor.

Komitmen GP Ansor terhadap Pancasila dibuktikan salah satunya dengan mengadakan acara apel kesetiaan Pancasila baik di pusat maupun daerah, dengan menyatakan kesetiaan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Selain itu, menumbuhkan semangat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai kebhinekaan serta turut mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini semakin meneguhkan posisi GP Ansor sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI.

Menurut pandangan GP Ansor, paham radikalisme dan kelompok radikal merupakan ancaman terhadap ideologi negara dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, GP Ansor mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan radikalisme. Untuk mendukung pemerintah dalam memberantas terorisme dan radikalisme, GP Ansor membentuk Detasemen Khusus 99 (*Densus 99 Asmaul Husna*) yang merupakan satuan

khusus Banser dalam memerangi radikalisme. Pembentukannya didasari pada fenomena semakin meningkatnya aksi-aksi terorisme dan radikalisasi yang mengatasnamakan agama. Tugas Densus 99 ini lebih kepada mencegah berkembangnya terorisme serta memberikan pemahaman kepada khalayak publik agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai gerakan yang merongrong kesatuan dan persatuan Indonesia. Selain itu, satuan ini juga bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang bernuansa kekerasan sehingga harus segera direspon dan dilaporkan kepada pihak berwajib.

Komitmen GP Ansor yang sungguh-sungguh dalam usaha membangun kesetiaan kepada Pancasila tentu perlu diapresiasi, namun dalam implementasi di lapangan tentunya terkadang tumpang tindih dengan tugas aparat yang berwajib. Sebagai organisasi kemasyarakatan, tentunya GP Ansor seperti juga organisasi kemasyarakatan lainnya dibatasi tugas dan wewenangnya dalam melakukan penindakan. Misalnya, pada kasus penolakan dan pembubaran acara pengajian atau kegiatan dari orang atau kelompok yang dianggap anti-Pancasila dan anti-kebhinekaan. Seharusnya ada pelibatan pihak yang berwajib untuk penanganan hal tersebut, sehingga potensi-potensi munculnya konflik dan juga benturan di tingkat akar rumput bisa dihindari. Karena jika perbedaan tersebut tidak disikapi dengan bijak maka potensi perpecahan akan semakin menguat. Hal ini tentunya tidak diinginkan oleh GP Ansor sendiri yang pada dasarnya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melindungi NKRI dari segala macam potensi perpecahan.

#### **4.3.2.1.4 Rela Berkorban untuk Bangsa dan Bernegara**

Sikap kerelaan mengorbankan pikiran, waktu, dan juga tenaga demi kemajuan bangsa dan negara, kerelaan untuk berkorban jiwa demi berjuang dalam membela bangsa dari berbagai ancaman yang

menghadang, memiliki empati dan kepedulian sosial terhadap mereka yang mengalami kesulitan, berjiwa patriot adalah bentuk dari sikap rela berkorban yang patut dihadirkan sebagai bentuk implementasi nilai bela negara.

Pemahaman terhadap sikap tersebut diwujudkan dengan berbagai macam aktivitas sosial-kemasyarakatan GP Ansor sebagai bagian dari pengabdian organisasi bagi bangsa dan negara. sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kepemudaan dan juga bagian dari keluarga besar NU, GP Ansor banyak terlibat aktif dalam gerakan-gerakan sosial, misalnya, dalam hal kebencanaan. Pembentukan satuan tugas Banser Siaga Bencana (Bagana) adalah bentuk realisasi dari wujud kepedulian GP Ansor terhadap permasalahan sosial. Dalam beberapa kejadian bencana yang terjadi di beberapa daerah, satgas Bagana telah turut serta untuk membantu menangani penanggulangan dampak bencana. Selain itu, satgas relawan kebakaran (Balakar) juga turut andil dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana kebakaran. Meskipun, satgas ini baru terdapat di kota-kota tertentu saja, mengingat biaya peralatan yang tidak murah, namun setidaknya membuktikan bahwa GP Ansor cukup *concern* terhadap isu kebencanaan.

Salah satu bentuk lainnya dari implementasi nilai-nilai bela negara yang diterapkan oleh GP Ansor terkait dengan nilai jiwa rela berkorban ialah dengan gerakan pemberian layanan *wifi* gratis secara nasional bagi siswa-siswi sekolah untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) di beberapa titik di Indonesia. Upaya ini dilakukan guna memberikan solusi bagi para pelajar yang mengalami kendala koneksi internet dalam melakukan sekolah daring saat pandemi Covid-19. Aksi positif seperti ini cukup membantu pemerintah dalam menyediakan layanan internet kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya pelajar sekolah. Dari perspektif implementasi nilai bela negara, perwujudan jiwa rela berkorban dapat tercermin dalam perbuatan seperti itu. Ormas harus mampu hadir menjadi bagian dari solusi

atas permasalahan bangsa yang sedang dihadapi disaat pemerintah masih belum mampu untuk optimal dalam menjalankan kewajibannya.

#### **4.3.2.1.5 Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara (Kesiapan Fisik dan Mental)**

Aspek kemampuan awal bela negara dalam hal kesiapan faktor fisik dan mental dicirikan oleh adanya berbagai macam kecerdasan (*intelligence, spiritual, emotional, dsb*) dan kecerdasan bertahan hidup, gigih dalam menghadapi setiap tantangan. Selain itu kemampuan untuk dapat menjaga kesehatan jiwa dan raga, serta mengembangkan kemampuan fisik/ruhani serta memiliki keterampilan tertentu menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka penyiapan kemampuan bela negara.

GP Ansor sebagai ormas kepemudaan memiliki perhatian yang cukup terhadap kesiapan fisik dan mental para kadernya. Dalam hal spiritual, pemenuhan aspek ruhani menjadi kebutuhan dasar dari para kader sebagai bekal dalam aktivitas organisasi. Upaya ini dilakukan dengan mengintensifkan majelis dzikir dan sholawat, yang secara rutin ditujukan bagi para kader GP Ansor, di mana didalamnya diberikan penguatan akidah dan juga pengetahuan keagamaan. Untuk kemampuan awal bela negara secara fisik, lebih terlihat dari bagaimana GP Ansor menyiapkan dan memberdayakan organ paramiliternya, Banser, dalam berbagai aktivitas melayani masyarakat.

#### **4.3.2.2 Strategi Ormas GP Ansor dalam Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara**

Dalam pembahasan strategi yang digunakan oleh Ormas GP Ansor dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, peneliti menggunakan pendekatan teori strategi yang dibuat oleh Kol. Arthur Lykke (1989) yang

dikenal dengan artikulasi model strategi “bangku berkaki tiga”. Model strategi seperti ini mengilustrasikan bahwa strategi merupakan hasil perpaduan dari adanya tujuan (*ends*), cara (*ways*) dan juga sumberdaya (*means*). Sehingga, dari pengertian tersebut dapat diuraikan, strategi merupakan suatu metode/cara dalam mencapai sebuah tujuan tertentu disertai penggunaan segenap sumber daya yang ada serta mempertimbangkan adanya aspek risiko dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, strategi implementasi nilai-nilai bela negara yang dijalankan oleh Ormas GP Ansor dapat dijabarkan melalui aspek *ends*, *means*, dan *ways*. *Ends* atau tujuan yang dimaksud di sini ialah tujuan dalam pelaksanaan implementasi nilai-nilai bela negara, *ways* merupakan metode atau cara yang dilakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, sedangkan *means* merupakan sumber daya yang digunakan dalam implementasi nilai-nilai bela negara.

#### **4.3.2.2.1 Aspek Tujuan (*ends*) dalam Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara**

Adapun, untuk aspek tujuan (*ends*) dalam implementasi nilai-nilai bela negara sebagaimana pengamatan peneliti terhadap wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan dari lingkungan Ormas GP Ansor ialah untuk menjaga ajaran agama serta tetap mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi Ormas GP Ansor, tujuan membela agama dan negara adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pada dasarnya tujuan dari implementasi nilai-nilai bela negara yang dipahami oleh Ormas GP Ansor tidak memiliki perbedaan dengan tujuan dari implementasi nilai-nilai bela negara secara normatif. Akan tetapi sebagai Ormas yang berbasis kepada keislaman, GP Ansor selalu berorientasi pada pencapaian aspek spiritual keagamaan termasuk dalam menetapkan tujuan bela negara yang tidak bisa dipisahkan dari tujuan beragama.

#### **4.3.2.2.2 Aspek Cara (*ways*) dalam Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara**

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk implementasi nilai-nilai bela negara GP Ansor diwujudkan dalam berbagai macam aktivitas organisasi yang dilandasi semangat kecintaan terhadap agama dan negara. Dalam perspektif strategi, metode atau cara (*ways*) yang diambil dalam kaitan implementasi nilai-nilai bela negara di Ormas GP Ansor secara umum berupa adanya penguatan sistem kaderisasi, pemberdayaan satuan-satuan tugas Banser, sinergi dengan TNI/Polri, mekanisme kontrol terhadap kinerja organisasi, responsif dan berusaha solutif terhadap isu-isu permasalahan sosial, ekonomi, dan sebagainya yang muncul di tengah masyarakat.

Penguatan sistem kaderisasi juga menjadi metode yang dipergunakan dalam konteks upaya GP Ansor terkait dengan implementasi nilai-nilai bela negara. Sistem kaderisasi yang ada di GP Ansor merupakan mekanisme penting dalam proses internalisasi nilai-nilai agama dan juga bela negara serta *skill* organisasi terhadap para kader. Penguatan sistem kaderisasi bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang *qualified* yang mampu diberdayakan dalam rangka menjalankan tujuan organisasi dalam konteks ini ialah implementasi nilai-nilai bela negara. Jenjang kaderisasi mulai dari tingkat dasar hingga tingkat nasional merupakan fase penting dalam pembangunan kapasitas dan kapabilitas kader.

Pembentukan dan pemberdayaan satuan-satuan tugas Banser, menjadi cara lainnya dalam mengoptimalkan implementasi nilai bela negara yang dilakukan oleh GP Ansor. Satuan-satuan tugas yang diberdayakan dalam Banser merupakan kader inti penggerak program-program sosial kemasyarakatan, pengamanan dan juga bela negara. Beberapa satuan tugas seperti Balakar, Bagana, Basada, dsb yang fokus terhadap masalah

sosial kemasyarakatan dan juga tugas-tugas kemanusiaan merupakan salah satu bentuk wujud dari aksi bela negara yang bisa dilakukan.

Sinergi dengan TNI/Polri dan juga pemerintah menjadi bagian penting strategi Ormas GP Ansor dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Keterlibatan GP Ansor dalam berbagai aktivitas sosial-kemasyarakatan yang bersinergi dengan TNI dan juga Polri serta pemerintah berperan dalam mengoptimalkan fungsi dan peran Ormas GP Ansor sebagai bagian dari wujud bela negara komponen masyarakat terhadap permasalahan pembangunan dan juga isu sosial kemasyarakatan. Sinergi tersebut diwujudkan dalam bentuk keterlibatan GP Ansor dalam program-program pemerintah, misalnya dalam hal pendistribusian bantuan kepada masyarakat.

Hal lainnya yang merupakan cara (*ways*) dalam rangka implementasi nilai-nilai bela negara agar dapat berjalan secara kontinyu dan optimal adalah dengan menggunakan mekanisme kontrol terhadap kinerja organisasi. Mekanisme kontrol internal yang dimaksud ialah dengan instrumen akreditasi yang merupakan penilaian secara komprehensif dari pimpinan pusat kepada pimpinan di bawahnya terkait kinerja organisasi. Penilaian ini dimaksudkan untuk menentukan kelayakan organisasi. Akreditasi berguna untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam manajemen organisasi dan mengukur seberapa manajemen organisasi tertata dengan baik. Dalam penilaian akreditasi, beberapa komponen penilaian dilakukan terhadap program pokok dari kepengurusan GP Ansor, diantaranya ialah program kaderisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan. Dengan akreditasi yang dilakukan oleh pimpinan pusat kepada kepengurusan di level bawah, secara tidak langsung akan mendorong pengurus di daerah untuk tampil baik dalam melaksanakan program kerja termasuk pula program-program yang terkait dengan implementasi nilai-nilai bela negara, seperti program-program sosial kemasyarakatan dan kepemudaan serta program kaderisasi.

Cara lainnya yang dilakukan GP Ansor dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara ialah responsif dan berusaha solutif terhadap isu-isu permasalahan sosial, ekonomi, dan sebagainya yang muncul di tengah masyarakat. Sikap bela negara tidak terlepas dari adanya *sense of crisis* terhadap situasi dan kondisi yang berkembang. Sikap responsif yang ditunjukkan oleh GP Ansor dalam konteks implementasi nilai bela negara ditunjukkan dalam bentuk misalnya saat ada peristiwa bencana yang seringkali terjadi di beberapa lokasi di Indonesia, maka GP Ansor sigap dengan segera menurunkan tim siaga bencana, pembentukan Satgas Covid-19 dengan memberikan literasi kepada masyarakat, menyalurkan bantuan kepada masyarakat saat pandemi, dsb. Langkah taktis solutif berikutnya yang dilakukan ialah dengan menyediakan layanan Wifi gratis bagi pelajar yang mengalami kendala Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Upaya ini dilakukan dalam rangka membantu para siswa sekolah yang kesulitan untuk belajar secara *online* tetap bisa mengikuti pelajaran sekolah. Dengan memberdayakan kemampuan kader untuk dapat berbagi koneksi internet kepada masyarakat pelajar sekitar lingkungannya yang membutuhkan, langkah tersebut merupakan bentuk wujud kepedulian dari GP Ansor terhadap kondisi masyarakat dan berusaha menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan tersebut.

Selain itu, upaya responsif lain yang dilakukan sebagai bagian dari strategi dalam implementasi nilai bela negara ialah dengan memberikan kursus keterampilan tertentu dan *skill* wirausaha secara gratis dengan metode daring bagi para pemuda dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menekan laju angka pengangguran. Upaya ini sangat membantu dalam meringankan beban masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Ormas GP Ansor menggunakan beberapa cara (*ways*) dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai bela negara yakni penguatan sistem

kaderisasi, pemberdayaan satuan-satuan tugas Banser, sinergi dengan TNI/Polri, mekanisme kontrol terhadap kinerja organisasi, responsif dan berusaha solutif terhadap isu-isu permasalahan sosial, ekonomi,

#### **4.3.2.2.3 Aspek Sumberdaya (*Means*) Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara**

Selanjutnya ialah sumber daya (*means*) yang digunakan oleh GP Ansor dalam implementasi nilai-nilai bela negara antara lain ialah militansi kader yang siap diberdayakan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Struktur organisasi GP Ansor yang tersusun hingga ke level anak cabang (kecamatan) bahkan beberapa hingga ke level ranting (desa/kelurahan) memberi peluang bagi kader untuk bisa lebih “dekat” dalam merasakan problematika masyarakat. Kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peran sentral sebagai penggerak (dinamisator) dalam masyarakat. Militansi kader juga disebabkan salah satunya oleh adanya proses sistem kaderisasi yang cukup mapan di internal GP Ansor itu sendiri. Sumber daya lainnya yang bisa menjadi bagian dari strategi GP Ansor dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara adalah adanya kader-kader GP Ansor yang menempati posisi-posisi strategis baik di birokrasi pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, dsb. Kader-kader yang berada di posisi strategis tersebut secara tidak langsung dapat menjadi diseminator atau duta bagi GP Ansor dalam menyebarkan nilai-nilai organisasi, termasuk di dalamnya nilai bela negara.

Sesuai dengan uraian pembahasan yang telah dijabarkan tersebut di atas, dikatakan bahwa kekuatan sumberdaya berupa militansi kader dan juga optimalisasi peran kader GP Ansor yang berada posisi-posisi strategis di birokrasi pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, dsb menjadi aspek penting dalam hal sumberdaya (*means*). Selain itu pula, struktur organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan tersusun hingga ke level

cabang/desa, mampu mendukung optimalisasi aktivitas organisasi Ormas GP Ansor dalam melakukan implementasi nilai-nilai bela negara.

#### **4.3.2.3 Strategi Ormas GP Ansor dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Bela Negara guna Mendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta**

Keterlibatan warganegara dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pertahanan semesta yang dianut di Indonesia. Kesadaran bela negara sebagai fondasi dasar dalam membangun komponen pertahanan negara. Kemampuan bela negara yang dimiliki warga negara diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan model sistem pertahanan yang dikembangkan sebagai pilihan logis pertahanan negara yang digali dari faktor historis bangsa Indonesia. Model sistem pertahanan ini mensyaratkan adanya totalitas akan pengerahan segenap komponen bangsa untuk ikut ambil bagian dalam, usaha pembelaan negara. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nasution (1980) bahwa peperangan yang muncul dewasa ini merupakan peperangan rakyat semesta, yang mengharuskan pula sifat kesemestaan dalam menghadapinya. Segenap komponen rakyat, baik harta dan tenaganya digunakan guna mengantisipasi kemenangan. Semua sumber-sumber daya nasional yang ada dimaksimalkan penggunaannya untuk melakukan perlawanan. Tidak cukup hanya dengan menaklukkan angkatan bersenjata lawan untuk meraih kemenangan, namun penghancuran terhadap segala susunan ketatalembagaan politik beserta aspek sosial ekonomi lawan menjadi suatu hal yang tidak kalah esensial. Oleh sebab itu, yang menjadi perhatian dalam konteks implementasi pertahanan semesta ialah bahwa

dalam melakukan penyerangan adalah bersifat semesta, begitu juga dalam pertahanan, menggunakan pertahanan rakyat semesta.

Sebagai bagian dari elemen rakyat Indonesia, Ormas menempati peran strategis dalam melaksanakan semua peran dan fungsinya, dalam hal ini sebagai bagian dari komponen pertahanan militer yakni komponen pendukung pertahanan negara. Eksistensi Ormas dalam mendukung pertahanan negara adalah wujud dari kesemestaan dalam sistem pertahanan, di mana untuk kepentingan pertahanan seluruh potensi Ormas mampu diberdayakan secara optimal, baik dalam kondisi damai maupun dalam situasi perang.

Dalam masa damai, potensi Ormas diberdayakan dalam kerangka pembangunan nasional yaitu guna membantu mewujudkan tujuan negara dalam konteks ikut menghadirkan kesejahteraan umum bagi rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan dalam masa perang, dalam konteks menghadapi ancaman militer dan hibrida, UU Haneg dan juga UU PSDN telah mengamanatkan bahwa Ormas berperan sebagai komponen pendukung pertahanan negara dapat diberdayakan memperkuat komponen utama dan juga komponen cadangan. Selain itu pula, potensi Ormas juga mampu untuk ditransformasikan sebagai komponen cadangan dalam membantu pertahanan.

Strategi Ormas GP Ansor dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, di satu sisi, merupakan bagian dari manifestasi kinerja organisasi Ormas GP Ansor dalam memberikan kontribusi positif Ormas dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi yang lain, strategi Ormas GP Ansor dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara secara tidak langsung adalah salah satu bentuk persiapan dini Ormas guna mendukung pertahanan semesta, di mana keterlibatan warganegara dalam upaya aktualisasi bela negara menjadi kekuatan untuk membangun kesadaran bela negara yang masif di lingkungan Ormas. Terbangunnya kesadaran bela negara yang masif di lingkungan Ormas-

ormas akan memperkuat salah satu komponen pertahanan negara yakni Ormas sebagai komponen pendukung yang pada akhirnya akan mampu diproyeksikan sebagai komponen cadangan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang kuat. Strategi Ormas dalam implementasi nilai-nilai bela negara akan bermakna pada penguatan aspek pertahanan negara, karena pada hakikatnya pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta salah satunya juga ditopang oleh rasa kesadaran bela negara warga negaranya serta aktualisasi bela negara masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada titik inilah kesemestaan dalam hal pelibatan rakyat dalam upaya bela negara untuk mendukung pertahanan semesta menemukan wujud nyatanya.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berangkat dari paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembinaan kesadaran bela negara dan strategi Ormas GP Ansor dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara guna mendukung Sishankamrata, dapat disimpulkan dalam uraian singkat di bawah ini:

1. Pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas GP Ansor sudah terlaksana secara terencana, terarah dan berkelanjutan, baik secara formal dan maupun nonformal. Pembinaan secara formal dilaksanakan melalui program kaderisasi dan secara nonformal melalui forum pertemuan internal kader, majelis pengajian, dan juga apel kebangsaan.
  
2. Strategi Ormas GP Ansor dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara bertujuan (*ends*) untuk menjaga ajaran agama serta tetap mempertahankan eksistensi NKRI, dengan mengoptimalkan semua sumber daya (*means*) yang dimiliki antara lain ialah militansi kader, adanya kader-kader yang menempati posisi strategis di birokrasi pemerintahan, serta struktur organisasi yang tersusun hingga ke tingkatan anak cabang dan ranting. Metode (*ways*) yang digunakan adalah penguatan sistem kaderisasi, pemberdayaan satuan-satuan tugas Banser, sinergi dengan pemerintah dan TNI/Polri, mekanisme kontrol terhadap kinerja organisasi, serta responsif dan berusaha solutif terhadap isu-isu permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Selain itu pula, strategi Ormas GP Ansor dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara berperan penting dalam mendukung terwujudnya sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta yang kuat sebagai bagian dari wujud partisipasi warga negara yang terhimpun dalam wadah organisasi kemasyarakatan dalam upaya bela negara.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, beberapa hal dapat dijadikan masukan terkait dengan strategi Ormas dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara guna mendukung Sishankamrata, antara lain:

- a. Untuk Kementerian Pertahanan RI,
  - 1) Pelaksanaan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara di lingkungan Ormas, sebaiknya bisa menjangkau pada tataran elit pimpinan Ormas, agar kesadaran bela negara di lingkungan Ormas dapat terbangun secara masif hingga ke seluruh anggota Ormas.
  - 2) Membuat *grand design* pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas seluruh Indonesia, yang terpadu dan integratif dengan turut serta melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.
  - 3) Melakukan penyiapan dan pembinaan intensif secara kelembagaan terhadap Ormas-ormas yang berkomitmen dengan implementasi bela negara yang mampu diproyeksikan menjadi Komcad guna memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
- b. Untuk Ormas GP Ansor,
  - 1) Dalam melakukan pembinaan kesadaran bela negara di internal lingkungan Ormas GP Ansor, dapat mengelaborasi lebih dalam tentang nilai-nilai bela negara dengan pendekatan pemahaman agama dalam pemberian materi-

materi pelatihan kaderisasi dan juga pertemuan-pertemuan informal internal kader.

- 2) Meningkatkan sinergisme dalam hal pembinaan kesadaran bela negara khususnya dengan Kemhan RI agar terbangun kesadaran bela negara yang masif di lingkungan Ormas GP Ansor.
- 3) Bersinergi dengan Ormas kepemudaan dan keagamaan lainnya mengenai urgensi pembinaan kesadaran bela negara di lingkup Ormas dalam upaya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alamsyah, A. R. (2018). Gerakan Pemuda Ansor: Dari era kolonial hingga pascareformasi. In A. R. Alamsyah, & B. A. Yulianto, Gerakan Pemuda Ansor: Dari era kolonial hingga pascareformasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Crenata, A. K., Alamsyah, A. R., Yulianto, B. A., & Damm, M. R. (2018). Reformasi, politik elektoral, dan politik identitas: Ansor pasca orde baru. Dalam B. A. Yulianto, & A. R. Alamsyah, Ansor dalam pertarungan ideologi era 60-an. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Creswell, J. W. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Sage Publications.
- Emilia, E. (2017). Menulis tesis dan disertasi. CV. Alfabeta.
- Gray, C.S. (1999). Modern strategy. Oxford University Press.
- Hart, B.L. (1991). Strategy: The indirect approach (2nd revised ed.). Praeger.
- Hasibuan, M.S. (2018). Manajemen sumber daya manusia. Bumi Aksara.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). Implementing public policy. Sage Publications.
- Howard, M., & Paret, P. (1984). On war (Carl Von Clausewitz). Princeton University Press.
- Leavy, Patricia.(2017). Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based, participatory research approaches. The Guilford Press
- Mathis, R.L., & Jackson, J. H. (2009). Manajemen sumber daya manusia. Salemba Empat.
- Miles, M.B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook (3rd. Ed). Sage Publication.
- Moleong, L.J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. SAGE Publications.

- Nasution, Abdul Haris. (1984). Pokok-pokok gerilya (*Fundamentals of Guerrilla Warfare*): Dan pertahanan Republik Indonesia di masa lalu dan yang akan datang. Angkasa.
- Nugroho, R. (2017). Public policy. PT. Elex Media Komputindo.
- Pülzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing public policy. In G. J. Frank Fischer, Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods. CRC Press, Taylor & Francis Group.
- Raco, J. R. (2010). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ripley, R.B., & Franklin, G. A. (1986). Policy implementation and bureaucracy. Brooks/Cole.
- Saleh, M.D., Anwar, J., & Alamsyah, A. R. (2018). Ansor di mata berbagai pihak. Dalam A. R. Alamsyah, & B. A. Yulianto, Gerakan Pemuda Ansor: Dari era kolonial hingga reformasi (hal. 230). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Schensul, J. J. (2008). Documents. In L. M. (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods: Vol. 1&2. Sage Publications.
- Simanjuntak, B., & Pasaribu, L. (1990). Membina dan mengembangkan generasi muda. Bandung: Tarsito.
- Sitompul, E.M. (2010). NU dan Pancasila . Jakarta: LKiS.
- Sudjana, Djudju. (2006) Evaluasi program pendidikan luar sekolah. PT Remaja Rosdakarya.
- Stoner. James A.F, Freeman, R. E., & Gillbert JR, D. R. (1996). Manajemen Jilid 1 (ed. Terjemahan). PT. Prenhallindo.
- Subagyo, A. (2015). Bela negara: peluang dan tantangan di era globalisasi. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. C.V. Alfabeta.
- Thoha, M. (2004). Pembinaan organisasi: Proses diagnosa dan intervensi. Raja Grafindo Persada.
- Triyanto, & Bawono, H. (2018). Ansor dalam tiga zaman: Kolonialisme, fasisme, dan kemerdekaan Indonesia. In A. R. Alamsyah, & B. A. Yulianto, Gerakan Pemuda Ansor: Dari kolonial hingga pascareformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Yarger, H. R. (2006). Toward a theory of strategy: Art Lykke and The Army War college strategy model. In J. B. Jr, Guide to national security policy and strategy (2nd ed.). U.S Army War College.

### **Jurnal dan Tesis**

Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama dan kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan NKRI. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 251-284.

Hartono, D. (2020). Fenomena kesadaran bela negara di era digital dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 41, 77.

Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Jurnal Sosioglobal*, 1(1), pp. 49-67.  
<http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/11185/5034>.

Pratin Nurdian Safira, S. M. (2014). Peran Gerakan Pemuda Ansor dalam menumbuhkan nasionalisme di kalangan pemuda kelurahan karangroto kecamatan Genuk kota Semarang. *Unnes Civic Education Journal*, 3(2), pp. 41-49.

Widiatmaka, P., Pramusinto, A., & Kodiran. (2016). Peran organisasi kepemudaan dalam membangun karakter pemuda dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi pemuda (studi pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), pp. 180-198.

### **Majalah**

Setiono, K. Y. (2017). Bela negara dalam perspektif strategi dan kebijakan pertahanan negara. *Majalah Wira*, Puskom Publik Kemhan.

### **Internet/Website**

Ansor, G. P. (n.d.). Tujuan Gerakan Pemuda Ansor. <https://ansor.id/profil/>

Aziz, M. (2015). Ansor, NU dan bela negara. <https://www.nu.or.id/post/read/63909/ansor-nu-dan-bela-negara>

- Sukoyo, Y. (2014). Kemhan-GP Ansor sepakat bina bela negara.  
<https://www.beritasatu.com/nasional/158771-kemhangp-ansor-sepakat-bina-bela-negara>
- The Joint Staff. (2018). Joint Doctrine Note 1-18.  
[https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/jdn\\_jg/jdn1\\_18.pdf?ver=2018-04-25-150439-540,](https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/jdn_jg/jdn1_18.pdf?ver=2018-04-25-150439-540)
- Kemdikbud. (n.d). KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kemhan. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan RI.
- Kemhan. (2018). Daftar MoU antara kemhan dengan ormas.  
<https://www.kemhan.go.id/poehan/2018/06/04/7515.html>
- Natawiria. (2009). Model Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Mahasiswa dalam rangka Pertahanan Negara (Studi di Institut Manajemen Telkom Bandung) (Tesis Magister, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta).  
[http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/44473](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/44473)

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- Peraturan Presiden RI No. 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan
- Peraturan Menteri Pertahanan RI No.32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

## SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : *Bi/681/VIII/2020*  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, *7* Agustus 2020

Kepada

Yth. Sekjen Ormas GP Ansor  
Pusat

di

Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
  - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
  - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Afrizal Zurman NIM 12019010101 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Strategi Penyiapan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor Dalam Mengimplementasikan Nilai-nilai Bela Negara Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : [rizal.zurman@gmail.com](mailto:rizal.zurman@gmail.com) dan HP +62 895-1886-9852.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warak III Bid. Karas Sema dan Ketembagaan,  
  
Dr. Hippizah S. Adm., M.Si.  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Kasubbid Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/1601/VIII/2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 7 Agustus 2020

Kepada

Yth. Kasatkornas Banser GP  
Ansor Pusat

di

Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
  - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
  - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Afrizal Zurman NIM 12019010101 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Strategi Penyiapan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor Dalam Mengimplementasikan Nilai-nilai Bela Negara Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : [rizal.zurman@gmail.com](mailto:rizal.zurman@gmail.com) dan HP +62 895-1886-9852.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warak III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hipdizah, S. Adm., M. Si.  
Mayor Jenderal TNI



Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : BI/681/VIII/2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 7 Agustus 2020

Kepada

Yth. Direktur Bela Negara Ditjen  
Potan Kemhan RI

di

Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
  - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
  - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Afrizal Zurman NIM 12019010101 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Strategi Penyiapan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Anshor Dalam Mengimplementasikan Nilai-nilai Bela Negara Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : [rizal.zurman@gmail.com](mailto:rizal.zurman@gmail.com) dan HP +62 895-1886-9852.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si.  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan

**LAMPIRAN 2**  
**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**



**PIMPINAN PUSAT  
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929  
Website : www.ansor.id | email : sekretariat.gp.ansor@gmail.com

Nomor: 2697/PP/SR-02/IX/2020  
Lamp : --  
Perihal : SURAT KETERANGAN

Jakarta, 10 S h a f a r 1442 H  
28 S e p t e m b e r 2020 M

*Bismillahirrahmaniirahim*

Merujuk surat Rektorat Universitas Pertahanan Nomor : **B1/681/VIII/2020**, Hal: **Pemohonan Izin Penelitian**, tertanggal **7 Agustus 2020**, dengan ini Pimpinan Pusat GP Ansor menerangkan bahwa :

<b>NAMA</b>	: <b>AFRIZAL ZURMAN</b>
<b>NIM</b>	: <b>12019010101</b>
<b>PROGRAM STUDI</b>	: <b>STRATEGI PERANG SEMESTA</b>
<b>UNIVERSITAS</b>	: <b>UNIVERSITAS PETAHANAN</b>

Adalah benar telah melakukan penelitian melalui wawancara dengan Narasumber yaitu : Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Wakil Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser dan Ketua Bidang Kaderisasi Pimpinan Pusat GP Ansor yang diperlukan dalam penyusunan Tesis dengan judul : "Strategi Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor dalam Mengimplementasikan Nilai Nilai Bela Negara ".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqamith Thariq*

**PIMPINAN PUSAT  
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Wakil Ketua Umum,

**MOH. HAERUL AMRI**

Sekretaris Jenderal,

**ABDUL ROCHMAN**



**DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN  
SEKRETARIAT**

Nomor : B/ 1217 /17/05/01/2020/SET  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Selesai Melakukan Penelitian

Jakarta, 8 September 2020

Kepada

Yth REKTOR UNIVERSITAS  
PERTAHANAN

di

Jakarta

u.p., Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan.

1. Dasar :
  - a. Surat Rektor Unhan nomor: B/1681/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
  - b. Surat Rektor Unhan nomor: B/1744/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
  - c. Surat Rektor Unhan nomor: B/1721/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
  - d. Surat Rektor Unhan nomor: B/1819/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
  - e. Surat Rektor Unhan nomor: B/1822/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
  
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa/i UNIVERSITAS PERTAHANAN, Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Tahun Ajaran 2019/2020, Telah selesai Melakukan Penelitian melalui Wawancara, Observasi dan Studi dokumen/laporan sesuai dengan judul Tesis selama 1 (satu) Bulan, terhitung mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2020 dengan Baik, adapun nama-nama Mahasiswa/i sebagai berikut :

No	NAMA SISWA	JENIS KEL. L/P	NIM	JUDUL PENELITIAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	<u>AFRIZAL ZURMAN</u>	L	12019010101	Strategi Penyiapan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor Dalam Mengimplementasikan Nilai Nilai Bela Negara Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam rangka menjaga Keutuhan NKRI	

2. ATAM ...

Jalan Tanah Abang Timur Nomor 8 Jakarta Pusat 10110 Telp: (021) 3828832, Fax: (021)

1	2	3	4	5	6
2.	ATAM	L	12090101003	Implikasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Masyarakat Terhadap Pertahanan Negara	
3.	KARTOLI	L	12090101007	Strategi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas Klas I Cipinang Jakarta	
4.	HARIMURTI WICAKSONO	L	120190101004	Peran Badan Pengawas Pemilu Sebagai Kekuatan Nir-Militer (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya).	
5.	HERY MISBIYANTORO	L	120190101005	Tantangan Implementasi Bela Negara Masyarakat Hulu Sungai Citarum Dalam Menghadapi Globalisasi Global	

3. Demikian mohon menjadikan periksa.



Direktaris Direktorat Jenderal,

Santoso, S.T., M.Sc.  
Direktur Jenderal TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Dirjen Pothan Kemhan
3. Sesditjen Pothan Kemhan
4. Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan.

**LAMPIRAN 3**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

Informan : **Kasubdit Lingk. Permukiman Dit. Bela Negara Kemhan RI**

Hari /Tanggal wawancara : Jumat, 28 Agustus 2020

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Tempat : via daring (Zoom)

**A. PKBN Ormas GP Ansor**

1. Apa tujuan/urgensi bela negara di lingkungan Ormas?
2. Apa saja bentuk bela negara yang bisa dilakukan Ormas?
3. Menurut pandangan Kemhan, bagaimana pembinaan kesadaran BN Ormas selama ini?
4. Bagaimana tindak lanjut kegiatan PKBN yang sudah dilakukan Kemhan RI terhadap Ormas selama ini?
5. Apa saja bentuk dukungan Kemhan RI terhadap pelaksanaan PKBN di lingkungan Ormas (GP Ansor)?

**B. Strategi Ormas GP Ansor dalam Implementasi Nilai-nilai Bela Negara**

1. Apakah tujuan (*ends*) dari implementasi nilai-nilai bela negara di lingkungan Ormas?
2. Bagaimana pandangan Kemhan RI terhadap bela negara Ormas GP Ansor selama ini?
3. Apa dampak yang dihasilkan dari bela negara yang dilakukan Ormas terhadap pertahanan negara?
4. Apa saja sumber daya yang dapat digunakan oleh Ormas untuk mengoptimalkan bela negaranya?

## PEDOMAN WAWANCARA

Informan : **Sekjen GP Ansor**  
Hari /Tanggal wawancara : **Senin, 31 Agustus 2020**  
Waktu : **16.00-17.00 WIB**  
Tempat : **Depok**

### **A. Pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas GP Ansor?**

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas GP Ansor?
2. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan GP Ansor? Apakah GP Ansor melibatkan pihak lain dalam rangka melakukan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan GP Ansor?
3. Bagaimana dengan sarana-prasarana, materi dan juga anggaran yang digunakan dalam kegiatan pembinaan kesadaran bela negara?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan GP Ansor? Bagaimana langkah yang sudah dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut selama ini?
5. Apakah terdapat dukungan Kemhan RI terhadap upaya pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Ormas GP Ansor selama ini?

### **B. Strategi Ormas GP Ansor dalam implementasi nilai-nilai bela negara?**

1. Apa pandangan Anda tentang bela negara? Apakah makna bela negara bagi GP Ansor?

2. Apa tujuan yang melandasi GP Ansor dalam mengimplementasikan nilai bela negara?
3. Bagaimana GP Ansor mengimplementasikan nilai bela negara dalam aktivitas organisasi?
4. Bagaimana aktivitas organisasi yang dilakukan oleh kader GP Ansor yang sesuai dengan nilai bela negara?
5. Apa saja sumber daya yang digunakan oleh Ormas GP Ansor dalam implementasi nilai-nilai bela negara?
6. Apakah antara GP Ansor dengan beberapa kelompok/Ormas lain pernah muncul pertentangan/gesekan dalam melakukan dalam melakukan aktivitas organisasi? Bila ya, bagaimana menurut Bapak tentang hal tersebut?
7. Bagaimana sinergi/keterlibatan yang terbangun baik antar Ormas maupun dengan pemerintah/TNI dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara

## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara daring (Webinar) dengan Bpk. Kol. Luhkito,  
Kasubdit Lingkungan Permukiman Direktorat Bela Negara Dirjen Potan  
Kementerian Pertahanan RI



Wawancara dengan Bpk. Abdul Rochman,  
Sekretaris Jenderal Ormas GP Ansor



Wawancara dengan Bpk Hasan Basri Sagala, M.Si,  
Waka Satkornas Ormas GP Ansor



Wawancara dengan Bpk.Ruchman Basori, M.Ag  
Ketua Bidang Kaderisasi Ormas GP Ansor

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Afrizal Zurman, lahir di Jakarta pada tanggal 13 April 1982. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 09 Pagi Bukit Duri, Jakarta Selatan pada tahun 1994, SMP Negeri 3, Manggarai, Jakarta Selatan lulus tahun 1997, SMU Negeri 37, Tebet, Jakarta Selatan lulus pada tahun 2000, Sarjana Sains, Departemen Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia, Depok lulus pada tahun 2005 dan pada tahun 2019 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti saat ini masih aktif sebagai PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Mengawali karir pada tahun 2009, jabatan saat ini sebagai Arsiparis Muda di Direktorat Pengolahan dengan pangkat Penata Tk.I (III/d)

Riwayat Pekerjaan:

1. Anggota tim penyusun Guide Arsip Perbatasan NKRI (2012)
2. Anggota Tim penelusuran arsip berbahasa Belanda di Pulau Jawa (2016)
3. Anggota Tim penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP)-Aparatur Pemerintah (AP) Direktorat Pengolahan ANRI (2017)
4. 2015-2019 Anggota Ikatan Arsiparis ANRI (2015-sekarang)